



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 233

TAHUN 2015

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
21. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
24. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
25. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

26. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
27. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
30. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
31. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
32. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau periode yang berjalan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini merupakan pedoman sistem akuntansi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual.

BAB III
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- 1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Penyajian Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. LRA;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.

Pasal 4

- 1) Sistem akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sistem akuntansi PPKD; dan
 - b. Sistem akuntansi SKPD.
- 2) Sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup teknik pencatatan dan pengakuan, atas pendapatan-LO, beban, pendapatan- LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- 3) Sistem akuntansi Satuan Kerja Pengelola Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan keuangan SKPD.
- 4) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 5 Juni 2015

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima
pada tanggal 5 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA

ABD. WAHAB, SH
NIP. 19650903 199803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
LAMPIRAN I	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Mekanisme Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah	4
F. Komponen Pemrosesan Transaksi.....	5
G. Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.....	8
BAB II SISTEM AKUNTANSI PPKD.....	10
A. Ketentuan Umum	10
B. Akuntansi Anggaran	11
C. Sistem Akuntansi Pendapatan	11
D. Sistem Akuntansi Belanja Dan Beban.....	15
E. Sistem Akuntansi Pembiayaan.....	21
F. Sistem Akuntansi Aset.....	23
G. Akuntansi Kewajiban.....	28
H. Koreksi Kesalahan Dan Penyesuaian	30
I. Jurnal, Buku Besar Dan Neraca Saldo.....	34
J. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD.....	36
K. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian.....	46
BAB III SISTEM AKUNTANSI DI SKPD	58
A. Akuntansi Anggaran	58
B. Sistem Akuntansi Pendapatan	58
C. Sistem Akuntansi Belanja Dan Beban.....	64
D. Sistem Akuntansi Piutang.....	75
E. Sistem Akuntansi Aset Tetap	78
F. Sistem Akuntansi Aset Lainnya.....	84
G. Sistem Akuntansi Kewajiban.....	93
H. Koreksi Kesalahan	96
I. Jurnal, Buku Besar Dan Neraca Saldo.....	102
J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	105
LAMPIRAN II	
BAGAN AKUN STANDAR	
LAMPIRAN III	
KONVERSI PENYAJIAN LRA	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BIMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang memuat Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrua!. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu sendiri.

SAPD adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

Guna mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibuat Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang sesuai dengan kondisi daerah serta mampu mengantisipasi perubahan di masa mendatang. Sistem dan prosedur akuntansi dibuat untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, asset, catatan akuntansi dan laporan keuangan. Diharapkan dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan

ini dapat meningkatkan efisiensi, keefektivan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBD.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) Kota Bima ini adalah untuk:

1. Memberikan acuan pelaksanaan sistem akuntansi PPKD Kota Bima dalam melakukan pencatatan akuntansi keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerapkan standar akuntansi keuangan yang dianggap paling tepat dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di SKPKD Kota Bima dengan menyelenggarakan sistem pembukuan *double entry*.
3. Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam sehingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya dapat dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan dan keperluan-keperluan lainnya.
4. Membakukan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bima sehingga diperoleh kesamaan pengertian antara penyusun laporan keuangan dan pemakai laporan keuangan.

C. DASAR HUKUM

Landasan utama pemerintah daerah menyusun laporan keuangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

D. RUANG LINGKUP

Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bima disusun dalam tiga bagian, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan, merupakan pembahasan mengenai:
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Dasar Hukum
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Mekanisme Pencatatan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - f. Komponen Pemrosesan Transaksi
 - g. Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
2. Bab II Pedoman Sistem Akuntansi PPKD merupakan pembahasan mengenai:
 - a. Ketentuan Umum Sistem Akuntansi PPKD
 - b. Akuntansi Anggaran
 - c. Sistem Akuntansi Pendapatan
 - d. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban
 - e. Sistem Akuntansi Aset
 - f. Sistem Akuntansi Kewajiban
 - g. Sistem Akuntansi Pembiayaan
 - h. Koreksi kesalahan dan Penyesuaian
 - i. Penyusunan Laporan Keuangan
3. Bab III Pedoman Sistem Akuntansi SKPD, merupakan pembahasan mengenai:

- a. Ketentuan Umum Sistem Akuntansi SKPD
- b. Akuntansi Anggaran
- c. Akuntansi Penerimaan Kas dan Pendapatan
- d. Akuntansi Pengeluaran Kas, Belanja dan Beban
- e. Akuntansi Aset
- f. Akuntansi Kewajiban
- g. Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian

Ruang lingkup pembahasan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima ini meliputi sistem akuntansi yang diterapkan oleh SKPD dan SKPKD. SKPD yang menerapkan PPK BLUD tidak termasuk dalam pedoman ini.

E. MEKANISME PENCATATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi berpedoman kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi yang meliputi dasar pengakuan, pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, beban dan pembiayaan serta laporan keuangan, dan atau dapat dikatakan kebijakan akuntansi mengatur perlakuan terhadap alur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bima mengacu pada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan. Kebijakan akuntansi ini mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian setiap unsur-unsur laporan keuangan yang menganut 2 basis akuntansi, yaitu sebagai berikut :

1. Basis Kas dalam mencatat setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
2. Basis Akrual dalam mencatat transaksi keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kekayaan daerah dan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Seluruh laporan tersebut, baik yang berdasarkan basis kas maupun basis akrual diungkapkan secara penuh dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai prinsip *full disclosure*.

F. KOMPONEN PEMROSESAN TRANSAKSI

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kota Bima terdapat beberapa komponen pemrosesan transaksi. Komponen-komponen tersebut adalah:

1. Dokumen Sumber

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan dokumen sumber yang dihasilkan dari kegiatan keuangan pemerintah daerah. Dokumen sumber berisi informasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan transaksi antara lain:

- a. Dokumen sumber untuk pengakuan anggaran: Perda APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
- b. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dan Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Perimbangan;
- c. Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LRA: Surat Tanda Setoran (STS) atau Nota Kredit/Bukti Transfer Bank atau bukti lain yang dipersamakan untuk Pendapatan Asli Daerah, Nota Kredit/Bukti Transfer Bank atau bukti lain yang dipersamakan untuk Pendapatan Dana Perimbangan;
- d. Dokumen sumber untuk pengakuan Beban: Surat Tagihan, Berita Acara Serah terima Barang; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; Berita Acara Opname Persediaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap.
- e. Dokumen sumber untuk pengakuan Belanja: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal;
- f. Dokumen sumber untuk pengakuan Penerimaan Pembiayaan: Surat Tanda Setoran (STS)/Nota Kredit atas penerimaan kembali pokok dana bergulir, penerimaan pinjaman dari Bank dan Bukti Pencairan Dana Cadangan;
- g. Dokumen Sumber untuk pengakuan Pengeluaran Pembiayaan: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS.

Dokumen sumber tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pada SKPD dan PPKD sesuai peruntukannya masing-masing.

2. Jurnal

Jurnal adalah catatan akuntansi awal dalam prosedur akuntansi. Sistem entri jurnal yang digunakan adalah sistem entri ganda (*double entry accounting*) dimana setiap transaksi dibukukan minimal pada dua buah rekening yang berlawanan. Entri ini memperlihatkan nilai (jumlah) debit dan kredit yang terlibat, serta rekening yang cocok untuk jumlah debit dan kredit tersebut dalam jumlah yang sama. Dalam proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal satu hal yang penting adalah masalah pengakuan (*recognition*). Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat berdasarkan basis akuntansi yang telah ditetapkan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, dan bukan hanya berdasarkan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Ada dua kategori jurnal, yaitu Jurnal Umum dan Jurnal Khusus. Jurnal Umum memuat serangkaian kolom dalam format yang bersifat umum sehingga setiap transaksi akuntansi dapat dicatat. Jurnal Khusus menggunakan format khusus yang disesuaikan dengan tipe transaksi yang relatif sering terjadi. Jurnal khusus memungkinkan transaksi-transaksi yang serupa dicatat, ditotal, dan diposting ke dalam Buku Besar secara lebih efisien. Jurnal khusus terdiri dari :

- a. Jurnal Penerimaan Kas (*Cash Receipt Journal*)
- b. Jurnal Pengeluaran Kas (*Cash Disbursement Journal*)

Dapat dikatakan jurnal khusus ini menampung sebagian besar transaksi, sehingga jurnal umum hanya mencatat transaksi yang jarang terjadi serta penyesuaian akhir periode.

Format buku jurnal yang digunakan dalam SAPD Pemerintah Kota Bima:

PEMERINTAH KOTA BIMA
BUKU JURNAL

SKPD:.....

Halaman :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6

xxxx,.....

PPK SKPD
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

- a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam bukti transaksi;
- b. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kwitansi, STS, TBP, dan sebagainya;
- c. Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas Pendidikan adalah:
1.01.1.01.01.02.5.2.2.03.01
1.01 Kode Urusan (Urusan Wajib Kesehatan)
1.01 Kode Organisasi (Dinas Pendidikan)
01.02 Kode Program & Kegiatan (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran & Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik)
5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja (Belanja Telepon)
- d. Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misalnya "Belanja Telepon";
- e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debet;
- f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit

3. Buku Besar

Buku besar merupakan media catatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan transaksi pada akun atau rekening yang sejenis. Buku Besar diperoleh dari hasil posting atas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Posting adalah proses pemindahan

catatan dari Buku Jurnal ke dalam Buku Besar/Sub Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing.

4. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan hasil proses pengikhtisaran dan perhitungan saldo-saldo dari masing-masing akun buku besar pada tanggal tertentu. Dalam proses pembuatan neraca saldo dimungkinkan adanya pembuatan jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sehingga diperoleh saldo yang wajar dari masing-masing akun yang dibukukan. Hasil perhitungan Neraca Saldo selanjutnya diproses dan disajikan dalam laporan keuangan.

5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah disajikan dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen laporan keuangan menjadi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

G. PROSEDUR SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan siklus akuntansi dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan mulai jurnal atas bukti keuangan, diposting ke buku besar, kemudian terhadap pos-pos buku besar yang memerlukan rincian dibuatkan buku pembantu. Dari buku besar selanjutnya disusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal

berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening yang berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

Dalam Bab II akan diuraikan Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan untuk Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diuraikan dalam Bab III.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PPKD

A. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan pengertian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu:

1. SKPKD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima.
2. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemerintah Kota Bima secara keseluruhan. Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Transfer, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.

Sistem akuntansi di PPKD ini fokus pada peran SKPKD sebagai PPKD, bukan sebagai SKPD. Sistem akuntansi di DPPKD selaku SKPD mengacu pada Bab III yang membahas tentang Sistem Akuntansi di SKPD. Prosedur akuntansi yang digunakan dalam Sistem Akuntansi PPKD meliputi:

1. Sistem Akuntansi Pendapatan;
2. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban;
3. Sistem Akuntansi Aset;
4. Sistem Akuntansi Kewajiban;
5. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
6. Koreksi dan Penyesuaian;

7. Penyusunan Laporan Keuangan.

Pada masing-masing pembahasan sistem akuntansi akan dijelaskan mengenai ruang lingkup, fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan serta jurnal standar yang dijadikan acuan.

B. AKUNTANSI ANGGARAN

Pemerintah Kota Bima tidak menerapkan akuntansi anggaran. Untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, informasi anggaran diambil dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pertimbangan efisiensi merupakan faktor utama tidak diterapkannya akuntansi anggaran. Di samping itu, ketentuan sistem akuntansi lebih tepat digunakan untuk mencatat realisasi transaksi, bukan aktivitas anggarannya.

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Ruang Lingkup

Pendapatan yang dikelola oleh PPKD adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut dan lain-lain pendapatan yang sah dan dikelola oleh Sistem Akuntansi Pendapatan PPKD.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

2. Fungsi Yang Terkait

- a. Fungsi Akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - 1) Mencatat transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
 - 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Bendahara PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;
 - 2) Membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari pendapatan;
 - 3) Membuat dan mengesahkan bukti penerimaan atas penyeteroran yang masuk ke rekening kas umum daerah.
- c. PPKD Selaku BUD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- 1) Menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain atau pihak lainnya;
 - 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD.
- d. Kuasa BUD
- Kuasa BUD bertugas untuk melakukan verifikasi atas kebenaran data antara STS yang diterima dengan rekening Koran yang berasal dari Bank Persepsi serta mencatatnya ke dalam Buku Kas Kuasa BUD.
- e. Pihak ketiga lainnya
- Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah sebagai berikut:

KELOMPOK	JENIS	DOKUMEN
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah : • Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan/Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan
	• Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang dipersamakan
	• Tuntutan Ganti Rugi	SKTJM/Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:	

KELOMPOK	JENIS	DOKUMEN
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil Pajak • Bagi hasil bukan Pajak • DAU • DAK 	PMK/Dokumen yang dipersamakan PMK/Dokumen yang dipersamakan Perpres/Dokumen yang dipersamakan PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Otonomi Khusus • Dana Keistimewaan • Dana Penyesuaian 	PMK/Dokumen yang dipersamakan PMK/Dokumen yang dipersamakan PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan bagi hasil Pajak • Bantuan Keuangan 	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan Dokumen yang dipersamakan

4. Jurnal Standar

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dikelompokkan dalam beberapa jurnal standar:

a. Pendapatan Asli Daerah

Ketika pihak ketiga, bank misalnya, menyetorkan/memindah-bukukan pendapatan asli daerah dari hasil investasi atau jasa deposito/giro ke Rekening Kas Umum Daerah maka Bendahara Umum Daerah membuat bukti memorial berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari Bank. Berdasarkan Bukti Memorial fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
8.1.x.xx	Pendapatan Asli Daerah-LO		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.x.xx	Pendapatan Asli Daerah.....-LRA		xxxx

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan penetapan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian mencatat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Transfer.....	xxx	
8.2.1.xx	Pendapatan Transfer...-LO		xxx

Dalam hal penyaluran dana transfer dikaitkan dengan persyaratan tertentu, seperti Dana Alokasi Khusus yang prosentase penyaluran dikaitkan dengan besaran realisasi penerbitan SP2D dari BUD kepada Pihak Ketiga/pelaksana kegiatan maka pengakuan pendapatan LO diakui berdasarkan klaim yang sudah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau bagian telah menjadi hak Pemerintah Daerah.

Ketika Pemerintah Daerah menerima transfer dari Pemerintah Pusat, maka bank akan mengirimkan Nota Kredit. Berdasarkan Nota Kredit tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.3.xx	Piutang TransferLO/Neraca		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
4.2.1.xx	Pendapatan Tansfer-LRA		xxx

c. Pendapatan Bagi Hasil

Ketika Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan mengenai bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Transfer	xxx	
8.2.1.xx	Pendapatan Transfer-LO		xxx

Ketika Pemerintah Daerah menerima transfer bagi hasil, maka bank akan mengirimkan Nota Kredit/Rekening Koran. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening koran dari bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.3.xx	Piutang Transfer.....		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
4.2.1.xx	Pendapatan Tansfer-LRA		xxx

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ketika Pemerintah Daerah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Pendapatan Hibah	xxxx	
8.2.1.xx	Pendapatan Hibah-LO		xxxx

Ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, bank akan memberitahukan adanya penerimaan tersebut melalui Nota Kredit. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening Koran dari bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
1.1.3.xx	Piutang Pendapatan Hibah		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.3.1.xx	Pendapatan Hibah-LRA		xxxx

D. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

1. Ruang Lingkup

Dalam sistem penganggaran APBD terdapat beberapa jenis belanja dikelola langsung oleh PPKD yakni belanja hibah, belanja bunga, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja-belanja tersebut diadministrasikan dan dikelola oleh PPK-PPKD dengan Sistem Akuntansi Belanja dan Beban PPKD ini dan pencatatannya dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPKD.

2. Fungsi Yang Terkait

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- 1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan atas belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja yang tertuang dalam DPPKAD lainnya;
 - 2) Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) PPKD;
 - 3) Meminta dan mengadministrasikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- 1) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran ke dalam buku kas pengeluaran;
 - 2) Membuat Laporan Posisi Harian Kas;
 - 3) Menerbitkan SP2D.
- c. Fungsi Akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- 1) Mencatat transaksi pendapatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
 - 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. PPKD Selaku BUD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- 1) Menandatangani SPM-LS PPKD;
 - 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi belanja dan beban PPKD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan;
- d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- e. Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan;
- f. Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kota;
- g. Peraturan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa;
- h. Surat Tagihan dari pihak ketiga;
- i. Nota Debet dari Bank;
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- k. Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Jurnal Standar

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pengelolaan belanja dan beban maka akuntansi untuk transaksi belanja dan beban di PPKD dikelompokkan dalam beberapa jurnal standar:

a. Beban Bunga

Ketika Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekwensi dari utang tersebut akan timbul kewajiban bunga. Berdasarkan dokumen perjanjian pinjaman tersebut, atas bagian bunga yang sudah *accrued* fungsi akuntansi membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.3.xx	Beban Bunga Pinjaman	xxxx	
2.1.2.xx	Utang Bunga		xxxx

Selanjutnya, untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman PPK-PPKD menyiapkan SPM-LS PPKD untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah. Apabila BUD telah menerbitkan SP2D-LS pembayaran bunga, fungsi akuntansi PPKD melakukan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.2.xx	Utang Bunga	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.3.xx	Belanja Bunga Pinjaman	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

b. Beban Subsidi

Ketika Pemerintah Daerah menerima tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai

dengan persyaratan pemberian subsidi, PPK-PPKD melakukan verifikasi atas berkas persyaratan yang diajukan. Apabila tagihan telah dinyatakan sah untuk dibayar oleh PPKD, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.4.xx	Beban Subsidi	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Subsidi		xxxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM-LS PPKD hingga penerbitan SP2D oleh BUD. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Subsidi	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.4.xx	Belanja Subsidi	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

c. Beban Hibah

Ketika Kepala Daerah menetapkan nama-nama penerima hibah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dan telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) maka timbul kewajiban belanja hibah kepada pihak ketiga penerima hibah. Atas kejadian tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti memorial dan NPHD fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.5.xx	Beban Hibah	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Hibah		xxxx

Kemudian pada saat terjadi pencairan bantuan hibah kepada pihak ketiga/penerima hibah, PPK-PPKD menerbitkan SPM-LS untuk diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-PPKD Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan menyerahkan uangnya kepada yang berhak menerima hibah. Berdasarkan SP2D-LS, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Hibah	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.5.xx	Belanja Hibah kepada	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

d. Beban Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan sosial serta menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan penerima bantuan untuk memberikan bantuan sosial berupa uang. Berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, fungsi akuntansi membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.6.xx	Beban Bantuan Sosial	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Lain-lain		xxxx

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan realisasi pencairan bantuan sosial, PPK-PPKD mengajukan SPM-LS PPKD kepada Kuasa BUD. Berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima bantuan sosial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Lain-lain	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.6.xx	Belanja Bantuan Sosial kepada...	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

e. Beban Transfer

1) Beban Transfer Bagi Hasil

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak kepada entitas pelaporan lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bagi Hasil Pajak tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.2.xx	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Transfer		xxxx

Kemudian Pemerintah Daerah mencairkan dana bagi hasil kepada entitas lain dengan menerbitkan SP2D-LS. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Transfer	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
6.1.1.xx	Transfer Bagi Hasil....	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan ke Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan ke Desa tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.2.4.xx	Beban Transfer Bantuan Keu.Ke	xxxx	
2.1.5.xx	Desa Utang Transfer....		xxxx

Kemudian Pemerintah Daerah mencairkan dana bantuan keuangan kepada desa dengan menerbitkan SP2D-LS. Berdasarkan dokumen tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Transfer....	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
6.2.2.xx	Transfer Bantuan Keu. Kepada Desa	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

f. Beban Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan serta menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima bantuan keuangan. Berdasarkan surat keputusan kepala daerah dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak, fungsi akuntansi membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.2.x.xx	Beban Transfer Bantuan Keuangan	xxxx	
2.1.6.xx	Utang Belanja Bantuan Keu.		xxxx

Pada saat Pemerintah Daerah melakukan realisasi pencairan bantuan keuangan, PPK-PPKD mengajukan SPM-LS PPKD kepada Kuasa BUD. Berdasarkan pengajuan tersebut selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima bantuan keuangan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.6.xx	Utang Belanja Bantuan Keuangan	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.7.xx	Belanja Bantuan Keuangan kepada ...	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

E. SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Pembiayaan adalah teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan dapat berasal dari:

- a. Pinjaman;
- b. Hasil Divestasi;
- c. Penerimaan kembali Dana Bergulir;
- d. Pencairan Dana Cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan antara lain:

- a. Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman;
- b. Pemberian Pinjaman kepada Entitas Lain;
- c. Penyertaan Modal Pemerintah;
- d. Perguliran Dana.

2. Fungsi Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan yaitu fungsi Akuntansi PPKD, Kuasa BUD dan PPKD.

- a. Fungsi Akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
 - 2) Memposting jurnal – jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing – masing Rekening (sampai dengan rincian obyek);
 - 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP – SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
- Dalam Akuntansi Pembiayaan, Kuasa BUD melakukan fungsi mengadministrasikan transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi/kejadian untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya telah disahkan oleh Kepala SKPKD.
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- Dalam Akuntansi Pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya laporan keuangan tersebut diserahkan ke BPK dan pihak yang berkepentingan lainnya.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait transaksi pembiayaan;
- b. Naskah Perjanjian Kredit atau dokumen yang dipersamakan;
- c. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dana;
- d. Nota Kredit;
- e. Dokumen lainnya yang terkait.

4. Jurnal Standar

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan di PPKD, sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadi penerimaan pembiayaan

Berdasarkan Nota Kredit dari bank mengenai masuknya dana pinjaman ke Rekening Kas Umum Daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
2.2.1.xx	Kewajiban Jangka Panjang		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
7.1.4.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxxx

- b. Pada saat terjadi pembayaran bunga

Berdasarkan SP2D-LS pembayaran bunga dari Kuasa BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.3.xx	Beban Bunga	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.3.xx	Belanja Bunga Utang	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

- c. Pada saat terjadi pembayaran pokok pinjaman

Berdasarkan SP2D-LS pengeluaran pembiayaan dari Kuasa BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.2.1.xx	Kewajiban Jangka Panjang	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
7.2.3.xx	Pengeluaran Pembiayaan	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

F. SISTEM AKUNTANSI ASET

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Aset PPKD dimaksudkan adalah sistem akuntansi atas Investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang meliputi Perolehan Investasi, Hasil Investasi dan Pelepasan Investasi, yang didasarkan pada bukti/dokumen yang valid.

2. Fungsi Yang Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi aset PPKD adalah, sebagai berikut:

- a. Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas dan fungsi:
- 1) Mencatat transaksi atas Investasi (pembiayaan) berdasarkan bukti-bukti yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

- 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian Investasi (pembiayaan) LO dan pembiayaan LRA ke Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
 - 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas:
- 1) Menandatangani SPM-LS PPKD;
 - 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD.
- c. Kuasa BUD
- 1) Mengesahkan penerimaan kembali investasi (Nota Kredit dan STS).
 - 2) Menerbitkan SP2D-LS untuk penyertaan modal/investasi.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset PPKD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Investasi atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. SP2D-LS;
- c. Surat Tanda Setoran (STS);
- d. Nota Kredit dari Bank.

4. Jurnal Standar

- a. Sistem Akuntansi atas Perolehan Investasi
- 1) Perolehan Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat berupa deposito jangka pendek, investasi dalam SUN, investasi dalam SBI dan investasi jangka pendek lainnya.

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek maka BUD akan menerbitkan SP2D-LS sebagai dasar pencairan pengeluaran untuk investasi jangka pendek tersebut. Berdasarkan SP2D-LS dari BUD, fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.2.xx	Investasi Jangka Pendek	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Ketika BUD menerima Nota Kredit dari bank atas adanya aliran kas masuk dari pendapatan bunga maka BUD membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
8.1.4.xx	Pendapatan Bunga....-LO		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
4.1.4.xx	Pendapatan Bunga....-LRA		xxx

2) Perolehan Investasi Jangka Panjang

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Berdasarkan SP2D-LS yang diterbitkan BUD, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.2.2.xx	Investasi Jangka Panjang	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
7.2.2.xx	Pengeluaran Pembiayaan	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

b. Sistem Akuntansi atas Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Berdasarkan surat pemberitahuan pembagian dividen fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Pendapatan Lainnya	xxxx	
8.1.3.xx	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah-LO		xxxx

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah Daerah, BUD menerima Nota Kredit dari bank. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening Koran dari Bank, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
1.1.3.xx	Piutang Pendapatan Lainnya		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.3.xx	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA		xxxx

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Investee, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan laporan keuangan tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan Bukti Memorial, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.2.2.xx	Investasi Jangka Panjang.....	xxxx	
8.1.3.xx	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah -LO		xxxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, bank akan mengirimkan Nota Kredit kepada BUD. Berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari BUD, fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat Penerimaan Deviden dengan membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
1.2.1.xx	Investasi Jangka Panjang...		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.3.xx	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan-LRA		xxxx

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan terutama digunakan untuk mencatat akuntansi dana

bergulir. Apabila terdapat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir, maka Bendahara Penerimaan dana bergulir akan membuat STS untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan STS dari Bendahara Penerimaan Dana Bergulir, fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
8.1.4.xx	Pendapatan Bunga Dana Bergulir-LO		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.4.xx	Pendapatan Bunga Dana Bergulir- LRA		xxxx

c. Sistem Akuntansi Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Pada saat terjadi pelepasan investasi maka terdapat aliran uang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Atas transaksi tersebut BUD menerima Nota Kredit dari Bank sebagai bukti bahwa uang telah masuk ke RKUD. Berdasarkan Nota Kredit atau Rekening Koran dari bank atas transaksi pelepasan Investasi Jangka Pendek, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
8.1.4.xx	Pendapatan Bunga-LO		xxxx
1.1.2.xx	Investasi Jangka Pendek		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.4.xx	Pendapatan Bunga-LRA		xxxx

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Pelepasan investasi jangka panjang Pemerintah Daerah misalnya dalam bentuk saham. Berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial dan jurnal:

- a) Apabila penerimaan kas lebih besar dari nilai investasi jangka panjang yang dilepas

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
8.4.1.xx	Surplus Pelepasan Investasi Jangka panjang-LO		xxxx
1.2.2.xx	Investasi Jangka Panjang		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
6.1.1.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxxx

- b) Apabila penerimaan kas lebih kecil dari nilai investasi jangka panjang yang dilepas

Kode	Uraian	Debit	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
8.4.1.xx	Defisit Pelepasan Investasi Jangka panjang-LO	xxxx	
1.2.2.xx	Investasi Jangka Panjang		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
6.1.1.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxxx

G. AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi kewajiban PPKD merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang.

2. Fungsi Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD adalah fungsi akuntansi PPKD, Kuasa BUD dan PPKD.

- a. Fungsi akuntansi PPKD, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - 1) Mencatat transaksi/kejadian lain berdasarkan bukti-bukti yang sah ke dalam Jurnal Umum;
 - 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
 - 3) Menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - 1) Menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
 - 2) Menerbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan;

- 3) Menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD.
- c. PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD meliputi dan tidak terbatas pada:

- Peraturan Kepala Daerah mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Surat Perjanjian Utang/Pinjaman;
- Nota Kredit dari bank;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Jurnal Standar

Jurnal standar yang dipergunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD dikelompokkan:

- Saat terjadi penerimaan utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
2.2.x.xx	Kewajiban Jangka Panjang		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
6.1.1.xx	Penerimaan Pembiayaan		xxxx

- Saat pembayaran bunga

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.3.xx	Beban Bunga	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
5.1.3.xx	Belanja Bunga Utang	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

- Saat pelunasan kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D-LS. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.2.x.xx	Kewajiban Jangka Panjang	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxxx
6.2.1.xx	Pengeluaran Pembiayaan	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

- d. Saat reklasifikasi kewajiban yang akan jatuh tempo
 Pada akhir periode pelaporan fungsi akuntansi mengidentifikasi bagian dari kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dan membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.2.x.xx	Kewajiban Jangka Panjang	xxxx	
2.1.3.xx	Bagian Lancar UtangJk.Panjang		xxxx

H. KOREKSI KESALAHAN DAN PENYESUAIAN

1. Ruang Lingkup

Pedoman akuntansi koreksi kesalahan ini membahas sistem akuntansi untuk transaksi koreksi kesalahan baik yang terjadi pada periode berjalan maupun periode sebelumnya. Kesalahan bisa berupa salah mencatat (membuku) atau terdapat kesalahan dalam realisasi transaksi. Kesalahan juga dibedakan menjadi kesalahan yang mempengaruhi kas dan yang tidak mempengaruhi kas. Sub bab ini membahas prosedur untuk melakukan koreksi kesalahan serta memberikan pedoman penjurnalan ketika terjadi kesalahan dilingkup SKPKD.

2. Fungsi Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan koreksi dan penyesuaian adalah sebagai berikut:

- Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD);
- Bendahara Penerimaan;
- Bendahara Pengeluaran;
- Pengurus Barang;
- Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan koreksi dan penyesuaian adalah sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) dalam hal terjadi kelebihan penyetoran pajak daerah;
- Bukti Surat Tanda Setoran (STS) kembali belanja;

- c. Bukti Surat Setoran Sisa TU (S3TU);
- d. Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi pendapatan;
- e. Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi belanja.

4. Jurnal Standar

a. Koreksi Kesalahan Pencatatan

1) Pengembalian Belanja Tahun Lalu

Sebagai contoh terjadi pengembalian belanja bantuan sosial karena penerima yang berhak tidak ditemukan atau pindah alamat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bendahara Pengeluaran PPKD meminta kembali uang bantuan sosial kepada SKPD teknis dan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan TBP pengembalian belanja, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
3.1.1.xx	Ekuitas		xxx

Pada saat pengembalian belanja bantuan sosial tahun lalu tersebut di setorkan ke Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan bukti STS pengembalian belanja bantuan sosial, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
4.1.3.xx	Lain-lain Pendapatan Yg Sah- LRA		xxx

Perlakuan yang sama juga diterapkan untuk pengembalian belanja PPKD tahun sebelumnya, seperti: belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja transfer.

2) Pengembalian belanja tahun berjalan

Contoh terjadi pengembalian belanja bantuan sosial dalam tahun berjalan karena penerima yang berhak tidak ditemukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bendahara Pengeluaran PPKD meminta kembali bantuan sosial tersebut kepada SKPD teknis dan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan TBP pengembalian belanja bantuan sosial, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
9.1.6.xx	Beban Bantuan Sosial		xxxx

Pada saat pengembalian belanja bantuan sosial tahun berjalan tersebut di setorkan ke Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan bukti STS pengembalian belanja, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
5.1.6.xx	Belanja Bantuan Sosial		xxxx

Perlakuan yang sama juga diterapkan untuk pengembalian belanja PPKD dalam tahun berjalan, seperti: belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja transfer.

3) Koreksi pergeseran belanja dan beban

Pada saat ditemukan kesalahan pencatatan belanja, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial atau dokumen lain dipersamakan. Sebagai contoh ditemukan kesalahan pencatatan belanja hibah yang seharusnya menurut SPJ adalah belanja bantuan sosial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.6.xx	Beban bantuan sosial	xxx	
9.1.5.xx	Beban Hibah		xxx
5.1.6.xx	Belanja bantuan sosial	xxxx	
5.1.5.xx	Belanja Hibah		xxxx

4) Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu

Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan tahun sebelumnya, PPK-SKPD melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang menunjukkan adalah kelebihan pembayaran transfer dari pemerintah pusat/provinsi dan pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial kelebihan pendapatan. Berdasarkan bukti tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.1.xx	Ekuitas	xxx	
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya		xxx

Pada saat dilakukan realisasi pengembalian pendapatan maka PPK-PPKD menyiapkan SPM-LS pembayaran kelebihan pendapatan untuk diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-PPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk dibayarkan kepada pihak penerima. Berdasarkan dokumen SP2D-LS, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxx
5.3.1.xx	Belanja Tidak Terduga	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

5) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan tahun berjalan, PPK-PPKD melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang menunjukkan adalah kelebihan pembayaran transfer dan pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-PPKD membuat bukti memorial kelebihan pendapatan. Berdasarkan bukti tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.1.1.xx	Pendapatan....-LO	xxx	
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya		xxx

Pada saat dilakukan realisasi pengembalian maka PPK-PPKD menyiapkan SPM-LS pembayaran kelebihan pendapatan untuk diajukan kepada Kuasa BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-PPKD, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk dibayarkan kepada pihak penerima. Berdasarkan dokumen SP2D-LS, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah		xxx
5.3.1.xx	Belanja Tidak Terduga	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Atas transaksi tersebut harus dilakukan penyesuaian sehingga pendapatan LRA mencerminkan

jumlah penerimaan pendapatan yang secara riil masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan bukti memorial dan dokumen pendukungnya, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
4.1.1.xx	Pendapatan.....LRA	xxx	
5.3.1.xx	Belanja Tidak Terduga		xxx

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode akuntansi sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang.

Koreksi penyesuaian nilai penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan daftar aging piutang. Berdasarkan Daftar Aging Piutang, fungsi akuntansi PPKD membuat Bukti Memorial dan melakukan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.8.xx	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang Tdk Tertagih		xxx

Apabila dalam tahun yang bersangkutan terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang, berdasarkan bukti tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

1) Apabila nilai penyisihan piutang sudah mencapai 100%

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang Tdk Tertagih	xxx	
1.1.3.xx	Piutang		xxx

2) Apabila nilai penyisihan piutang belum mencapai 100%

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang Tdk Tertagih	xxx	
9.4.1.xx	Beban Luar Biasa	xxx	
1.1.3.xx	Piutang		xxx

I. JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO

1. Jurnal PPKD

Jurnal di PPKD dilaksanakan dengan menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus digunakan untuk

mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya sejenis, berulang dan volumenya sangat tinggi. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak sejenis dan frekuensinya jarang diinput melalui jurnal umum. Penggolongan jurnal ini untuk mempermudah proses jurnal dan mengurangi kesalahan.

Jurnal khusus yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jurnal penerimaan, digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan PPKD,
- b. Jurnal pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi belanja dan beban PPKD.

Sedangkan transaksi lain yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam jurnal umum PPKD. Format buku jurnal yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD Pemerintah Kota Bima adalah:

PEMERINTAH KOTA BIMA
BUKU JURNAL PPKD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
				Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6

Raba-Bima.....
Fungsi Akuntansi PPKD

ttd

Nama Lengkap
Nip

2. Buku Besar

Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum diposting ke dalam Buku Besar. Transaksi akun-akun yang sejenis digolongkan dalam satu rekening buku besar sehingga diperoleh saldo untuk setiap masing-masing rekening buku besar. Misalnya akun Buku Besar belanja listrik berisi hal posting dari transaksi-transaksi pembayaran rekening listrik mulai dari bulan Januari s/d Desember.

Format buku besar yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD Pemerintah Kota Bima adalah:

PEMERINTAH KOTA BIMA

BUKU BESAR PPKD

Kode Rekening :
 Anggaran :
 Mutasi D :
 Mutasi K :
 Saldo Akhir :

No	Tanggal	No. Bukti No. Dokumen	Uraian	Jumlah	
				Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6

Raba-Bima.....
 Fungsi Akuntansi PPKD

ttd

Nama Lengkap
 Nip

3. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan hasil peringkasan buku besar yang menunjukkan saldo setiap rincian obyek rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD. Neraca saldo diperlukan sebagai bahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Neraca Saldo yang digunakan dalam sistem akuntansi PPKD Pemerintah Kota Bima adalah:

PEMERINTAH KOTA BIMA

NERACA SALDO PPKD

Kode Rekening	Nama rekening	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5

Raba-Bima.....
 Fungsi Akuntansi PPKD

ttd

Nama Lengkap
 Nip

J. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

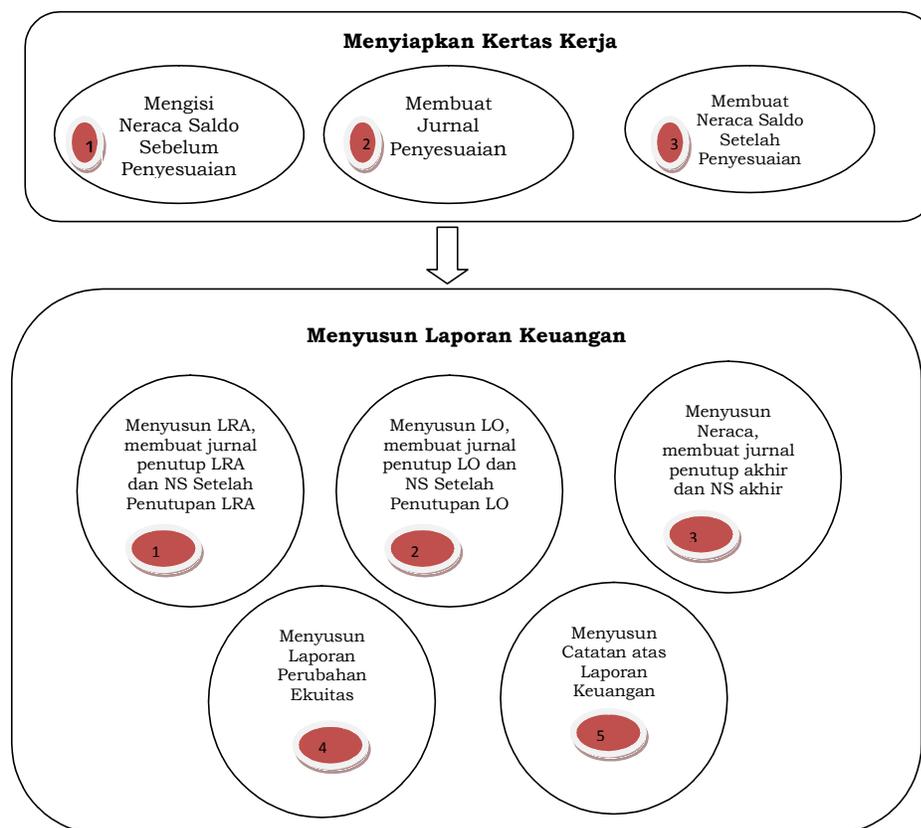
1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD diperoleh melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD :



2. Fungsi Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Fungsi Akuntansi PPKD,
- b. PPKD.

3. Langkah-Langkah Teknis

a. Menyiapkan Kertas Kerja

- 1) Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
- 2) Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam format kertas kerja tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo (NS)		Penyesuaian		NS Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K

b. Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja.

c. Membuat Jurnal Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- 1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan;
- 2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan;
- 3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.

d. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

e. Menyusun Laporan Keuangan

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

a) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-LRA

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
4.x.x.xx	Pendapatan LRA	xxx	
6.1.x.xx	Penerimaan Pembiayaan	xxx	
5.x.x.xx	Belanja		xxx
6.2.x.xx	Pengeluaran Pembiayaan		xxx
3.1.2.xx	Surplus Defisit LRA		xxx

b) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA pada akun Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.2.xx	Surplus/Defisit-LRA	xxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxx

Kemudian setelah membuat jurnal penutup, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini adalah format LRA PPKD:

PEMERINTAH KOTA BIMA

PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	PENDAPATAN TRANSFER				
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
9	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
15	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
28	<u>BELANJA</u>				
29	BELANJA OPERASI				
30	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Belanja Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	BELANJA TAK TERDUGA				
36	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Jumlah Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
38	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xxx
39	<u>TRANSFER</u>				
40	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
41	Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
44	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
45	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Jumlah Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
50	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
51	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
52	<u>PEMBIAYAAN</u>				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
54	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
56	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
66	Penerimaan Kembali Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
67	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	xxx	xxx	xxx	xxx
68	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xxx	xxx
69	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
70	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
71	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xxx	xxx
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xxx	xxx
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xxx	xxx
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
80	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
81	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xxx	xxx
82	JUMLAH PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
83	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN)	xxx	xxx	xxx	xxx

2) Menyusun Laporan Operasional (LO)

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol). Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.x.x.xx	Pendapatan-LO	xxx	
3.1.1.xx	Surplus Defisit-LO		xxx
9.x.x.xx	Beban		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini adalah format LO PPKD:

PEMERINTAH KOTA BIMA
PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/	Kenaikan/ (%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
27	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
28	BEBAN				
29	BEBAN OPERASI				
30	Beban Subsidi				
31	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Beban lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xxx
35	BEBAN TRANSFER				
36	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
42	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
43	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
44					

NO.	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/	Kenaikan/ (%)
45	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
46	SURPLUS NON OPERASIONAL				
47	Surplus Penjualan Aset Non lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
48	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
49	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
50	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
51	DEFISIT NON OPERASIONAL				
52	Defisit Penjualan Aset Non lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
53	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
56	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
57	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
58	<u>POS LUAR BIASA</u>				
59	PENDAPATAN LUAR BIASA				
60	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
61	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
62	BEBAN LUAR BIASA				
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
65	POS LUAR BIASA				
66	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

3) Menyusun Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit...-LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.1.xx	Surplus Defisit-LO	xxx	
3.1.1.xx	Ekuitas		xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut merupakan contoh format neraca PPKD:

PEMERINTAH KOTA BIMA
PPKD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
5	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
6	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
7	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
8	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
10	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
11	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
12	Piutang Lainnya	xxx	xxx
13	RK SKPD	xxx	xxx
14	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
15	INVESTASI JANGKA PANJANG		
16	Investasi Nonpermanen		
17	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
18	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
19	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
20	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
21	Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
22	Investasi Permanen		
23	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
24	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
25	Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
27	DANA CADANGAN		
28	Dana Cadangan	xxx	xxx
29	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
30	ASET LAINNYA		
31	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
33	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
34	Aset Lain-lain	xxx	xxx
35	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
36	JUMLAH ASET	xxx	xxx
37	KEWAJIBAN		
38	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
39	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
40	Utang Bunga	xxx	xxx
41	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
42	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
43	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
44	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
45	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
46	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
47	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
48	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
49	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
50	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
51	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
52	EKUITAS		
53	EKUITAS		
54	Ekuitas	xxx	xxx
55	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
56	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	xxx	xxx

4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD Pemerintah Kota.

PEMERINTAH KOTA BIMA

PPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	XXX	XXX
2	Surplus/Defisit-Lo	XXX	XXX
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	XXX	XXX
4	Koreksi Nilai Persediaan	XXX	XXX
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	XXX	XXX
6	Lain-Lain	XXX	XXX
7	Ekuitas Akhir	XXX	XXX

5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota.

PEMERINTAH KOTA BIMA
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD	
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah		
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah	
		3.1.1	Pendapatan
		3.1.2	Beban
		3.1.3	Belanja
		3.1.4	Aset
		3.1.5	Kewajiban
		3.1.6	Ekuitas Dana
3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.		
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah		
BAB V	Penutup		

K. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Ketentuan Umum

Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili

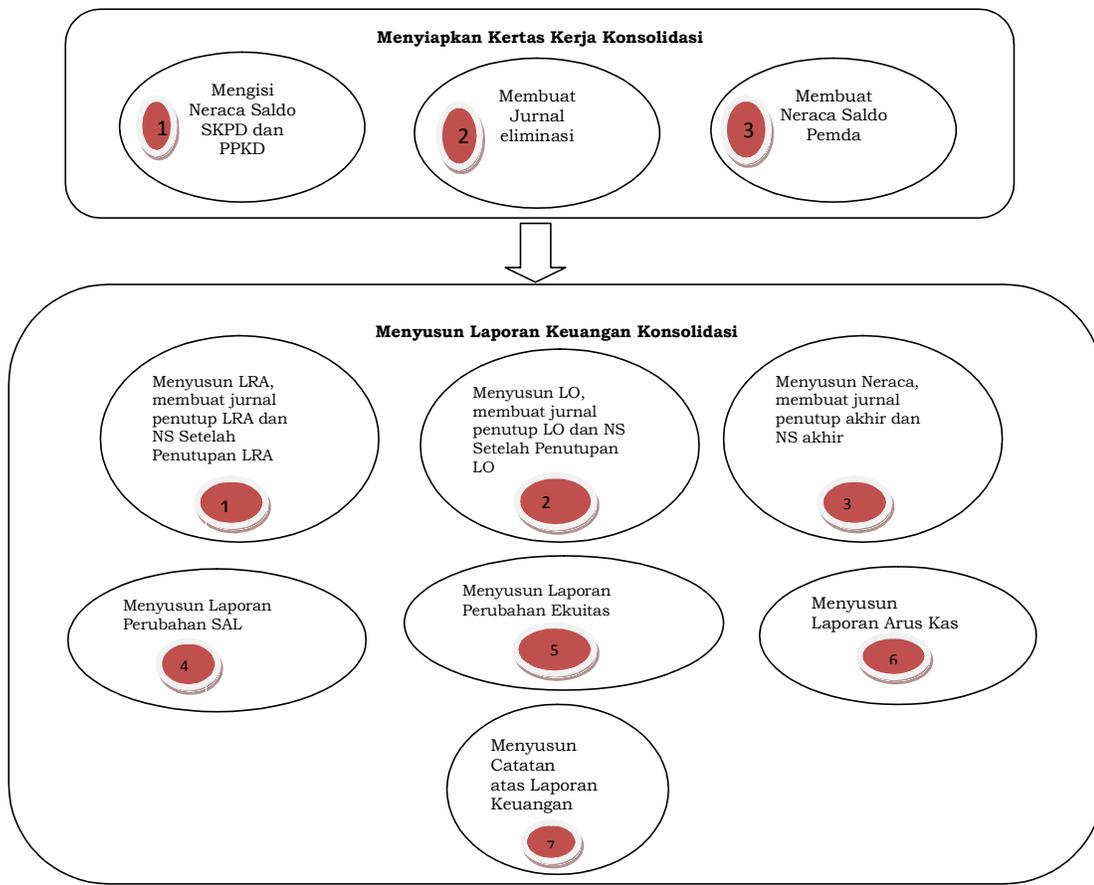
Pemerintah Daerah sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office–Branch Office). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat tujuh Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ketujuh Laporan Keuangan ini disampaikan oleh Walikota Bima kepada BPK RI untuk diaudit selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan hasil auditnya diserahkan kepada DPRD Kota Bima bersamaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selambat-lambatnya 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:



2. Fungsi Yang Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Fungsi Akuntansi PPKD,
- PPKD.

3. Langkah-Langkah Teknis

- Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca

Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo ke dalam kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK-PPKD dan RK-SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD serta Jurnal Eliminasi, Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat “RK-PPKD” di debit dan “RK-SKPD” di kredit dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	R/K PPKD	xxx	
2.1.7.xx	R/K SKPD		xxx

Berikut ini disajikan format kertas kerja konsolidasi:

PEMERINTAH KOTA BIMA
KERTAS KERJA KONSOLIDASI

Periode: 31 Desember 20XX

Kode Akun	Nama Akun	L/K SKPD A		L/K SKPD B		L/K SKPD dst		L/K PPKD		Eliminasi		L/K Pemkot Bima	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Kertas kerja tersebut dibuat untuk seluruh kode akun yang diurutkan mulai dari kode akun aset sampai dengan kode akun biaya.

Eliminasi dilakukan terhadap akun-akun resipokal, yaitu akun yang bersifat sementara karena adanya mutasi akun antar entitas baik antar entitas pelaporan dengan entitas akuntansi maupun antar entitas akuntansi dengan entitas akuntansi. Eliminasi dilakukan atas akun R/K PPKD dan R/K SKPD yang menjadi bagian dari neraca di PPKD maupun di SKPD.

b. Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang

termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Laporan Realisasi Anggaran” dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun berjalan”. Nilai ini ditempatkan di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA APBD), PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
4.x.x.xx	Pendapatan-LR	xxx	
7.1.x.xx	Penerimaan Pembiayaan-LRA	xxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxx
5.x.x.xx	Belanja		xxx
7.2.x.xx	Pengeluaran Pembiayaan		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini disajikan format Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi:

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASI

NOMOR	URAIAN	SKPD A	SKPD B	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				

NOMOR	URAIAN	SKPD A	SKPD B	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil				
1.2.3.2	Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah Pendapatan				
1.3.2	Dana Darurat Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan					
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Modal Tanah				
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
2.4	TRANSFER				
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak				
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi				
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
2.4.2	BANTUAN KEUANGAN				
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Desa				
2.4.2.2	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
Jumlah Belanja					
Surplus/(Defisit)					
III	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Penggunaan SILPA Pencairan				
3.1.2	Dana Cadangan				
3.1.3	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Daerah Lain yang Sah				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				

NOMOR	URAIAN	SKPD A	SKPD B	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain yang Diperlukan				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
	Jumlah Pembiayaan				
	PEMBIAYAAN NETTO				
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran				

2) Menyusun Laporan Operasional (LO)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol).

Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

a) Apabila terjadi Surplus

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.x.x.xx	Pendapatan-LO	xxx	
3.1.1.xx	Surplus-LO		xxx
9.x.x.xx	Beban		xxx

b) Apabila terjadi Defisit

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.x.x.xx	Pendapatan-LO	xxx	
3.1.1.xx	Defisit-LO	xxx	
9.x.x.xx	Beban		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini disajikan format Laporan Operasional Konsolidasi:

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASI
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015

NOMOR	URAIAN	SKPDA	SKPDB	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				

NOMOR	URAIAN	SKPDA	SKPDE	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil				
1.2.3.2	Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah Pendapatan				
1.3.2	Dana Darurat Pendapatan Lainnya				
1	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BEBAN				
2.1	Beban Pegawai				
2.2	Beban Persediaan				
2.3	Beban Barang dan Jasa				
2.4	Beban Pemeliharaan				
2.5	Beban Perjalanan Dinas				
2.6	Beban Bunga				
2.7	Beban Subsidi				
2.8	Beban Hibah				
2.9	Beban Bantuan Sosial				
2.10	Beban Penyusutan				
2.11	Beban Transfer				
2.12	Beban Penyisihan Piutang				
2	JUMLAH BEBAN				
3	Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)				
4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
4.1	Surplus (Defisit) Penghapusan Aset Lancar				
4.2	Surplus (Defisit) Penghapusan Aset Non Lancar				
4.3	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
4.4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
5	Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa (3+4)				
6	POS LUAR BIASA				
6	Pendapatan Luar Biasa				
6.2	Beban Luar Biasa				
7	Surplus/Defisit LO (5+6)				

3) Menyusun Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke akun Ekuitas.

Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.1.xx	Ekuitas	xxx	
3.1.1.xx	Defisit-LO		xxx
3.1.1.xx	Surplus-LO	xxx	
9.x.x.xx	Ekuitas		xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca

Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini disajikan format Neraca Konsolidasi:

PEMERINTAH KOTA BIMA
NERACA KONSOLIDASI
Per 31 Desember 2015

URAIAN	SKPDA	SKPDB	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5=2+3+4
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
Kas di Kas Daerah				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Kas Lainnya				
Setara Kas				
Investasi Jangka Pendek				
Piutang				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Piutang Lain-lain PAD yang sah				
Piutang Dana Perimbangan				
Piutang Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
Piutang Lain-Lain				
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga				
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran				
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				
Penyisihan Piutang				
Persediaan				
Beban Dibayar Dimuka				
Jumlah Aset Lancar				
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Investasi Permanen				
Jumlah Investasi Jangka Panjang				
AKTIVA TETAP				
Tanah				
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan				
Jalan, Irigasi dan Jantringan				
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Jumlah Aset Tetap				
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan				
Jumlah Dana Cadangan				
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan pihak Ketiga				
Aset Tetap Non Operasional				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-Lain				
Jumlah Aset Lainnya				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Beban				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
Utang Bunga				
Pendapatan Diterima Dimuka				
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				
Utang Jangka Pendek Lainnya				

URAIAN	SKPDA	SKPDB	PPKD	Konsolidasi
1	2	3	4	5=2+3+4
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri				
Utang Luar Negeri				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang				
JUMLAH KEWAJIBAN				
EKUITAS				
Ekuitas				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

4) Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Fungsi Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 + 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-Lo	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
7	Lain-Lain	xxx	xxx
8	Ekuitas Awal	xxx	xxx

6) Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.

7) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Rincian dalam bentuk angka disajikan secara komparatif dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima.

PEMERINTAH KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN XX

BAB I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD		
	2.1	Ekonomi makro	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
BAB IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah	
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah	
		5.1.1	Pendapatan-LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Transfer
		5.1.4	Pembiayaan
		5.1.5	Pendapatan-LO
		5.1.6	Beban
		5.1.7	Aset
		5.1.8	Kewajiban
		5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.	
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah		
BAB VII	Penutup		

BAB III

SISTEM AKUNTANSI DI SKPD

A. AKUNTANSI ANGGARAN

Pemerintah Kota Bima tidak menerapkan akuntansi anggaran. Untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, informasi anggaran diambil dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pertimbangan efisiensi merupakan faktor utama tidak diterapkannya akuntansi anggaran. Disamping itu, ketentuan sistem akuntansi lebih tepat digunakan untuk mencatat realisasi transaksi, bukan aktivitas anggarannya.

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD mengimplementasi kebijakan akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis Akrua menyajikan hasil pencatatan penerimaannya ke dalam Akun Pendapatan-LO, sedangkan Basis Kas digunakan untuk pertanggungjawaban penerimaan APBD yang disajikan dalam Akun Pendapatan LRA.

Dua jenis pendapatan di atas dilaporkan ke dalam laporan keuangan yang berbeda, sesuai basis akuntansinya, yaitu (a) Laporan Operasional (LO) dengan akun Pendapatan-LO yang menggunakan berbasis akrua dan (b) Laporan Realisasi Anggaran dengan akun Pendapatan-LRA yang menggunakan berbasis kas.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*, atau

- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima atau belum.

2. Pihak Yang Terkait

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1) Menandatangani/mengesahkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang dipersamakan;
 - 2) Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD.
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pendapatan SKPD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Mencatat transaksi/kejadian Pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) Mencatat posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
 - 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam Buku Kas Penerimaan;
 - 2) Membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
 - 3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke Kas Daerah setiap hari.

d. Bank Persepsi

Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bima untuk menerima setoran dari Bendahara Penerimaan dan wajib bayar. Bank Persepsi berfungsi mengesahkan dokumen penyeteroran pendapatan (STS/bukti lain yang sah) yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan wajib bayar serta berkewajiban menyampaikan laporan harian penerimaan disertai bukti-bukti setoran penerimaan daerah, nota debit, nota kredit, rekening koran kepada BUD setiap hari kerja termasuk yang diterima kantor cabang pembantu/kantor layanan/unit lainnya bank persepsi.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKPT);
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- c. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- d. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
- e. Surat Tanda Setoran (STS);
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- g. Nota Kredit atau dokumen lain yang dipersamakan;
- h. Rekapitulasi harian SKP Daerah, Rekapitulasi SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan, yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Rekapitulasi harian Tanda Bukti Penerimaan (TBP)/dokumen yang dipersamakan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Jurnal Standar

Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jurnal standar sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu.

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Rekapitulasi harian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD adalah:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Pajak	xxxx	
8.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LO		xxxx

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKPD, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Rekapitulasi Harian TBP dari Bendahara Penerimaan sebagai tanda bukti telah membayar pajak.

Berdasarkan tembusan TBP yang diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD mencatat pendapatan pajak dengan menjurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
1.1.3.xx	Piutang Pajak		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LRA		xxxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Daerah maka Bendahara Penerimaan membuat dokumen Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan tembusan STS yang diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

Bila wajib pajak membayar secara langsung tagihan pajak ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari Bank Persepsi, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Piutang Pajak		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LRA		xxxx

- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri (self-assesment) dan dilanjutkan dengan

pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assesement), Bendahara Penerimaan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Rekapitulasi Harian TBP. Berdasarkan tembusan TBP)/Rekapitulasi Harian TBP yang diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
8.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LO		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LRA		xxxx

Ketika pembayaran pajak tersebut disetorkan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran. Berdasarkan tembusan STS PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

Bila wajib pajak membayar secara langsung tagihan pajak ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran dari Bank Persepsi, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
8.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LO		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LRA		xxxx

Pada akhir tahun saat penyusunan laporan keuangan dilakukan inventarisasi SPTPD yang belum dilunasi. Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan penyesuaian atas piutang pajak yang belum dibayar. Sehubungan dengan hal tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal :

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Pajak	xxxx	
8.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LO		xxxx

- c. Pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak, yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode, Bendahara Penerimaan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan tembusan TBP yang diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
2.1.4.xx	Pendapatan diterima dimuka		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LRA		xxxx

Ketika pembayaran pajak tersebut disetorkan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan tembusan STS yang diterima dari Bendahara PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

Pada akhir tahun atau akhir periode akuntansi diterbitkan bukti memorial untuk mengakui Pendapatan LO yang sudah menjadi hak dalam tahun berjalan (*accrued*). Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK-SKPD menjurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.4.xx	Pendapatan diterima dimuka	xxxx	
8.1.1.xx	Pendapatan Pajak/Retribusi - LO		xxxx

- d. Pengakuan pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya telah diterima

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
8.1.2.xx	Pendapatan Retribusi - LO		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.2.xx	Pendapatan Retribusi - LRA		xxxx

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum dilunasi, PPK SKPD mencatat dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.4.xx	Piutang Retribusi	xxxx	
8.1.2.xx	Pendapatan Retribusi - LO		xxxx

C. SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD adalah suatu sistem yang mengimplementasi kebijakan akuntansi yang menggunakan dua basis akuntansi yang berbeda. Basis Akrua menyajikan hasil pencatatannya ke dalam Akun Beban, sedangkan Basis Kas yang digunakan untuk pertanggungjawaban APBD disajikan dalam Akun Belanja.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan Belanja Gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan yang diperkenankan, karena berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh fungsi Akuntansi PPKD.

Potongan-potongan terkait dengan pengeluaran belanja seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pajak

daerah dan perhitungan fiskal pihak ketiga lainnya yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dibukukan oleh PPK-SKPD.

Akuntansi Beban pada SKPD meliputi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban pegawai, beban barang dan jasa, beban murni akrual.

2. Pihak Yang Terkait

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Menandatangani SPM;
- 2) Menandatangani/mengesahkan dokumen SPJ;
- 3) Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD.

b. PPK SKPD

Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian Beban LO dan Belanja LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Mencatat posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Beban LO dan Belanja LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
- 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam BKU SKPD;
- 2) Membuat SPJ atas Beban dan Belanja.

d. Penyimpan dan Pengurus Barang

Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, Penyimpan Barang SKPD mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah.
 - 2) Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang.
 - 3) Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
- e. Pengurus Barang

Dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, Pengurus Barang SKPD mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan.
- 2) Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola.
- 3) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);
- b. Faktur dan Kwitansi Pembayaran;
- c. Daftar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU/LS/;
- e. Bukti Pengeluaran Barang;
- f. Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF);
- g. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK)/ Kontrak Kerja Sama;
- h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen lain yang dipersamakan; dan
- i. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan.

4. Jurnal Standar

Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur akuntansi Beban dan Belanja di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jurnal standar sebagai berikut:

a. Beban dan Belanja Pegawai

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.1.xx	Beban Gaji Pokok	xxxx	
9.1.1.xx	Beban Tunjangan	xxxx	
9.1.1.xx	Beban Tunjangan	xxxx	
9.1.1.xx	Beban Pembulatan	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.1.1.xx	Belanja Gaj Pokok	xxxx	
5.1.1.xx	Belanja Tunjangan	xxxx	
5.1.1.xx	Belanja Tunjangan	xxxx	
5.1.1.xx	Beban Pembulatan	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Beban dan Belanja Pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU (pembayaran lembur dan honorarium) dimana pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui uang persediaan, tahap-tahap transaksi yang harus dijurnal oleh PPK-SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Pada saat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan belanja yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran maka dibuat Surat Pengesahan Pertanggung-jawaban SPJ. Berdasarkan Surat Pengesahan Pertanggung-jawaban SPJ, PPK-SKPD membuat jurnal :

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.1.xx	Beban Uang Lembur	xxxx	
9.1.1.xx	Beban Honorarium	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx

- 2) Pada saat Bendahara Pengeluaran mengajukan ganti uang persediaan atas pengesahan SPJ diatas melalui SPP dan SPM-GU, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-GU. Berdasarkan dokumen SP2D-GU, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.2.1.xx	Belanja Uang Lembur	xxxx	
5.2.1.xx	Belanja Honorarium	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

- 3) Pada saat Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan belanja yang telah dikeluarkan melalui Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Fungsi Akuntansi mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan setelah dilakukan verifikasi oleh fungsi perbendaharaan pada Bidang Anggaran Seksi Perbendaharaan dan Gaji. Berdasarkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang sudah disahkan maka PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
5.2.1.xx	Belanja Uang Lembur	xxxx	
5.2.1.xx	Belanja Honorarium	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

- 4) Transaksi Panjar di SKPD

Dalam pengelolaan belanja melalui mekanisme UP/GU dimungkinkan adanya transaksi internal SKPD dalam bentuk pemberian panjar dari Bendahara Pengeluaran kepada PPTK. Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK maka dibuat Bukti Pemberian Panjar. Berdasarkan bukti tersebut PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.4.xx	Panjar Kegiatan	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar kepada Bendahara Pengeluaran maka Bendahara Pengeluaran membuat Bukti Pertanggungjawaban Panjar untuk bagian uang yang dibelanjakan dan pengembalian sisa panjar yang belum digunakan. Berdasarkan bukti tersebut PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.4xx	Uang Muka Operasional	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
1.1.4.xx	Panjar Kegiatan		xxxx

Berdasarkan SPJ panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ untuk disahkan oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen pengesahan SPJ tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.x.xx	Beban	xxxx	
9.1.x.xx	Beban	xxxx	
1.1.4.xx	Uang Muka Operasional		xxxx

Pengeluaran tersebut akan dicatat dalam jurnal LRA pada saat Bendahara Pengeluaran mengajukan ganti uang persediaan atas pengesahan SPJ melalui SPP dan SPM-GU dan BUD/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D GU.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.2.1.xx	Belanja	xxxx	
5.2.1.xx	Belanja	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu:

- 1) Pendekatan Beban; dan
- 2) Pendekatan Aset.

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera.

Pendekatan Aset akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan Jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga jaga.

- 1) Pendekatan Beban

Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa berupa ATK, sebagai contoh, yang akan langsung digunakan pada pelaksanaan kegiatan, serta pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran, tapi barang tersebut telah diterima dan telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

Berdasarkan BAST dan dokumen kelengkapan SPJ, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.2.1.xx	Beban Persediaan ATK	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja ATK		xxxx

Selanjutnya berdasarkan BAST dan kelengkapan dokumen lainnya, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP/SPM-LS untuk ditandatangani Pengguna Anggaran. SPP/SPM-LS yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D-LS. Berdasarkan SP2D-LS yang diterima dari Bendahara Umum Daerah, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut :

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja ATK	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.2.1.xx	Belanja ATK	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja ATK	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx
5.2.1.xx	Belanja ATK	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang dan jasa (persediaan) yang telah dibeli dan belum digunakan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF). Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan ini PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	Persediaan ATK	xxxx	
9.1.2.xx	Beban ATK		xxxx

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah, PPK-SKPD akan mencatat dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.x.xx	Beban Sewa	xxxx	
9.1.x.xx	Beban Sewa Dibayar di Muka	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
9.1.x.xx	Beban		xxxx

Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
5.2.x.xx	Belanja		xxxx

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
9.1.x.xx	Beban		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
5.2.x.xx	Belanja		xxxx

Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dimana Fungsi Akuntansi PPKD mencatat dengan jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Kas Daerah	xxxx	
8.1.x.xx	Pendapatan Lainnya-LO		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.x.xx	Pendapatan Lainnya-LRA		xxxx

2) Pendekatan Aset

Pada saat terjadi pembelian barang dan jasa (obat-obatan sebagai contoh) yang belum dilakukan pembayaran dan telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dari Rekanan, PPK-SKPD membuat jurnal :

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	Persediaan Obat-Obatan	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Obat - Obatan		xxxx

Pada saat dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D-LS, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Obat-Obatan	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.1.2.xx	Belanja Obat-Obatan	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Pada saat terjadi pembelian barang dan jasa (obat-obatan sebagai contoh) yang pembayarannya dilakukan melalui uang persediaan maka Bendahara Pengeluaran akan membuat SPJ Pengeluaran. Berdasarkan dokumen pengesahan SPJ, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Obat-Obatan	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx

Pada saat dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D-GU, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.1.2.xx	Belanja Obat-Obatan	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, dan berdasarkan hasil *stock opname* tersebut jurnal standar:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.2.1.xx	Beban Obat-obatan	xxxx	
1.1.7.xx	Persediaan Obat-obatan		xxxx

c. Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang

1) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian barang yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan barang tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari rekanan kepada SKPD, tetapi belum dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut langsung diserahkan kepenerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditandatangani.

Berdasarkan BAST dan dokumen pengesahan SPJ serta NPHD atau dokumen yang sah ditandatangani, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.2.xx	Beban Barang...yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Barang...yang akan diserahkan kpd Masyarakat		xxxx

Selanjutnya berdasarkan BAST dan kelengkapan dokumen lainnya, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP/SPM-LS untuk ditandatangani Pengguna Anggaran. SPP/SPM-LS yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D-LS. Berdasarkan SP2D-LS yang diterima dari Bendahara Umum Daerah, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Barang...yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.1.2.xx	Belanja Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
2.1.5.xx	Perubahan SAL		xxxx

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	Persediaan...yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
9.1.2.xx	Beban Barang...yang akan diserahkan kpd Masyarakat		xxxx

2) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian barang yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan barang tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari rekanan kepada SKPD, tetapi belum dilakukan pembayaran. NPHD atau dokumen yang dipersamakan telah ditandatangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke penerima hibah.

Berdasarkan BAST dan dokumen pengesahan SPJ, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	Persediaan Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
2.1.5.xx	Utang-Utang Belanja Barang...yang akan diserahkan kpd Masyarakat		xxxx

Selanjutnya berdasarkan BAST dan kelengkapan dokumen lainnya, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP/SPM-LS untuk ditandatangani Pengguna Anggaran. SPP/SPM-LS yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D-LS.

Berdasarkan SP2D-LS yang diterima dari Bendahara Umum Daerah, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Barang...yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.1.2.xx	Belanja Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh kepala SKPD diserahkan kepada penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan NPHD/dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.2.xx	Belanja Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
1.1.7.xx	Persediaan Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat		xxxx

- 3) Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga tetapi barang tersebut belum diserahkan, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan (BAPF). Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Fisik Persediaan ini PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	Persediaan Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	xxxx	
9.1.2.xx	Belanja Barang ... yang akan diserahkan kpd Masyarakat		xxxx

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD jurnal standar:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.x.x.xx	Beban Penyusutan ...	xxxx	
1.x.x.xx	Akm Penyusutan ...		xxxx

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya (tidak tertagihkan) dimasa yang akan datang dari entitas lain baik perorangan maupun korporasi. Besarnya penyisihan piutang dihitung berdasarkan tingkat kolektibilitas piutang yang dimiliki SKPD.

Berdasarkan Bukti Memorial dan Daftar aging Piutang, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.8.xx	Beban Penyisihan Piutang	xxxx	
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang		xxxx

D. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Piutang adalah merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat piutang SKPD.

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

2. Pihak Yang Terkait

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam Sistem Akuntansi Piutang SKPD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal, dan Neraca;
 - 2) Melakukan posting transaksi piutang ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
 - 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Bendahara Penerimaan SKPD
- Dalam Sistem Akuntansi Piutang SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai tugas dan fungsi:
- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD;
 - 2) Membuat SPJ atas pendapatan.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- c. Bukti Memorial;
- d. Dokumen lain yang dipersamakan.

4. Jurnal Standar

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen yang belum diterima pembayarannya pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.xx	Piutang Pendapatan	xxxx	
8.1.1.xx	Pendapatan Pajak LO		xxxx

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah diakui tahun sebelumnya, Bendahara Penerimaan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Rekapitulasi Harian TBP. Berdasarkan tembusan TBP/Rekapitulasi Harian TBP yang

diterima dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
1.1.3.xx	Piutang Pendapatan		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.1.xx	Pendapatan Pajak - LRA		xxxx

- b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.4.xx	Bagian Lancar Tagihan	xxxx	
1.5.1.xx	Tagihan Jangka Panjang LO		xxxx

- c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.8.xx	Beban Penyisihan Piutang ...	xxxx	
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang ...		xxxx

- d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang. Sedangkan untuk penghapus tagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang ...	xxxx	
9.1.8.xx	Beban Penyisihan Piutang ...	xxxx	
1.1.5.xx	Piutang		xxxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.5.xx	Penyisihan Piutang ...	xxxx	
1.1.3.xx	Piutang ...		xxxx

E. SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD adalah merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset tetap SKPD.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

2. Pihak Yang Terkait

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mencatat transaksi aset tetap berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal, dan Neraca;
- 2) Melakukan posting transaksi aset tetap ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);
- 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran atas pengadaan aset tetap;

- 2) Mencatat dan membukukan semua pengeluaran belanja modal ke dalam BKU;
 - 3) Membuat SPJ pengeluaran atas belanja modal.
- c. **Pengurus Barang**
 Dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD, Pengurus Barang mempunyai tugas pokok dan fungsi:
- 1) Menyiapkan dan menyampaikan dokumen pengelolaan aset tetap;
 - 2) Membuat Laporan Mutasi Barang, Kartu Inventaris Barang dan Buku Inventaris Barang SKPD;
- d. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**
 Dalam sistem akuntansi aset tetap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.
- e. **Pengguna Anggaran (PA)**
 Dalam sistem akuntansi aset tetap, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan fungsi :
- 1) Menandatangani SPM;
 - 2) Menandatangani/mengesahkan dokumen SPJ;
 - 3) Menandatangani Laporan Keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BAST);
- b. Faktur dan Kwitansi Pembayaran;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS;
- d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
- e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset;
- f. Berita Acara Penyerahan Barang antar SKPD;
- g. Bukti Memorial atau dokumen lain yang dipersamakan.

4. Jurnal Standar

- a. **Penambahan Aset Tetap**

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait.

Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran.

Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD mengakui penambahan aset tetap dengan membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.1.xx	Aset Tetap ...	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Belanja Modal ...		xxxx

Selanjutnya dilaksanakan proses pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D-LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS yang diterima dari Kuasa Bendahara Umum Daerah PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Modal ...	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD ...		xxxx
1.1.5.xx	Belanja Modal ...	xxxx	
1.1.3.xx	Perubahan SAL		xxxx

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.1.xx	Aset Tetap ...	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendhara Pengeluaran...		xxxx

Pada saat bendahara Pengeluaran melakukan permintaan ganti uang persediaan dengan mengajukan SPP/SPM-GU kepada Bendahara Umum Daerah. Berdasarkan tembusan SP2D-GU dari Bendahara Umum Daerah, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD ...		xxxx
5.2.3.xx	Belanja Modal ...	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

b. Penerimaan barang hibah

Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.1.xx	Aset Tetap ...	xxxx	
8.3.1.xx	Pendapatan Hibah – LO		xxxx

c. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tukar-menukar, mutasi antar SKPD, hibah, penyertaan modal, pemusnahan atau karena sebab lainnya.

Untuk penghapusan aset tetap dimulai dari Surat Permohonan Kepala SKPD, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial berdasarkan Surat Permohonan penghapusan aset tetap, seperti penjualan, perpindahan SKPD maupun pemusnahan aset tetap yang telah disampaikan kepada Walikota Bima melalui Pengelola Barang. Berdasarkan bukti memorial penghapusan, PPK-SPKD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxxx	
1.5.4.xx	Aset Lain-lain ...	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap ...		xxxx

Selanjutnya, apabila telah terbit Surat Keputusan Walikota Bima tentang penjualan/perpindahan SKPD/pemusnahan aset tetap, PPK- SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.3.1.xx	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxxx	
1.5.4.xx	Aset Lain-lain ...		xxxx

Untuk pelepasan aset tetap karena perpindahan SKPD, maka dibuat Berita Acara Penyerahan Barang dengan SKPD Penerima. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang tersebut PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap		xxxx

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang, PPK-SKPD penerima membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.x.xx	Aset Tetap	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxxx

Untuk pelepasan karena penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang akan dijual atau dipertukarkan masa awal tahun sampai dengan bulan penjualan dan membukukan dalam jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.7.xx	Beban Penyusutan	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan		xxxx

Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap		xxxx
8.4.1.xx	Surplus Penjualan Aset Tetap LO		xxxx

Pencatatan hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.4.xx	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan-LRA ...		xxxx

Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxxx	
9.3.1.xx	Defisit Penjualan Aset Tetap LO	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap		xxxx

Untuk pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.x.xx	Aset Tetap (yang masuk)	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar)	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap (yang keluar)	xxxx	
8.4.1.xx	Surplus Penjualan Aset Tetap-LO		xxxx

Pemberian hibah atas aset tetap yang belum disusutkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.5.xx	Beban Hibah	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap		xxxx

Pemberian hibah atas aset tetap yang sudah disusutkan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar)	xxxx	
9.1.5.xx	Beban Hibah	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap		xxxx

d. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang telah ditentukan. Penyusutan merupakan penurunan nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai maupun penurunan kapasitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tidak semua Aset tetap disusutkan, karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai yaitu untuk aset tetap tanah, demikian pula untuk konstruksi dalam pengerjaan belum disusutkan. Karena KDP tersebut adalah Aset Tetap yang belum dapat difungsikan secara penuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah.

Sedangkan untuk Amortisasi Aset pada dasarnya adalah sama dengan Penyusutan, istilah amortisasi diperuntukkan untuk aset yang tidak berwujud, tetapi mempunyai masa manfaat yang panjang (lebih dari 12 bulan) untuk mendukung tugas pemerintahan punya nilai dan dapat diukur, misalnya software aplikasi, hak paten, hak cipta, dan sejenisnya.

Beban Penyusutan diakui setiap akhir periode pelaporan. berdasarkan daftar inventaris barang, PPK-SKPD menghitung besarnya penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dan membuat bukti memorial.

Berdasarkan Bukti Memorial penyusutan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.7.xx	Beban Penyusutan	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan		xxxx

Akumulasi Penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah menjadi beban setiap tahun.

Akumulasi Penyusutan akan menjadi pengurang nilai aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca. Harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi menjadi nilai buku (*book value*).

F. SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Aset Lainnya SKPD merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat aset lainnya SKPD.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari piutang angsuran penjualan, tuntutan ganti kerugian, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

2. Pihak Yang Terkait

a. Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

- 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam sistem akuntansi aset lainnya PA/KPA, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD).
 - 2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan;
- b. Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan;
- c. Kontrak/Perjanjian-Sewa/ yang Dipersamakan;
- d. Kontrak/Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan/ dokumen yang Dipersamakan;
- e. Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT/Dokumen yang Dipersamakan;
- f. Kontrak/Perjanjian Kerjasama-Bangun Guna Serah (BOT) & BAST/Dokumen yang Dipersamakan;
- g. Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan;
- h. Surat Lisensi dan Frenchise/Ijin dari pemegang Hak Cipta, Paten/Dokumen yang Dipersamakan;
- i. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

4. Jurnal Standar

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain:

- a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal. Pada saat

terjadi penjualan kendaraan operasional, panitia mengusulkan penetapan pemenang lelang. Berdasarkan Surat Keputusan mengenai penjualan kendaraan dan penetapan pemenang lelang, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut, PPKSKPD membuat jurnal:

1) Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.1.xx	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
1.3.7.xx	Akm.Penyusutan Kendaraan Bermotor ...	xxx	
8.4.1.xx	Surplus Penjualan Aset LO		xxx
1.3.2.xx	Kendaraan Bermotor		xxx

2) Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.1.xx	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
1.3.7.xx	Akm.Penyusutan Kendaraan Bermotor ...	xxx	
8.4.1.xx	Defisit Penjualan Aset LO	xxx	
1.3.2.xx	Kendaraan Bermotor		xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menerima angsuran penjualan kendaraan maka dibuat Tanda Bukti Pembayaran. Berdasarkan TBP dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
1.5.1.xx	Tagihan Penjualan Angsuran		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
4.1.4.xx	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA		xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan tagihan penjualan angsuran ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

b. Tuntutan Ganti Kerugian

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM).

Pada saat Tim menetapkan terjadinya kerugian daerah dan menerbitkan SKTM untuk pegawai yang terkait kerugian daerah, PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.2.xx	Tagihan Kerugian Daerah	xxx	
8.1.4.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO		xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menerima angsuran ganti rugi maka dibuat Tanda Bukti Pembayaran. Berdasarkan TBP dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
1.5.2.xx	Tagihan Penjualan Angsuran		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
4.1.4.xx	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA		xxx

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan tagihan tuntutan kerugian daerah ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS dari Bendahara Penerimaan, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxx

c. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa**

Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, PPK SKPD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke “Aset Lain-lain Kemitraan dengan Pihak Ketiga” dan membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap ...		xxxx
1.1.1.xx	Aset Lain-Lain Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxxx	
2.1.7.xx	Akm. Penyusutan Aset Lain-Lain		xxxx

Dalam hal aset yang digunakan sebagai obyek kerjasama berupa tanah maka penggunaan akun akumulasi penyusutan tidak diperlukan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.

3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*)

BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Berdasarkan Berita Acara serah Terima Barang (BAST), PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.2.xx	Bangun Guna Serah	xxx	
1.3.1.xx	Aset Tetap Tanah		xxx

Pada Saat berakhirnya perjanjian BGS, Bangunan beserta fasilitasnya diserahkan oleh mitra kerja berdasarkan hasil audit dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan berdasarkan BASTB ini PPK SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.2.xx	Bangun Guna Serah	xxx	
8.1.4.xx	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BGS-LO		xxx

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*)

BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST tanah milik Pemerintah Daerah untuk dikerjasamakan. Berdasarkan BAST tersebut PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.2.xx	Bangun Serah Guna	xxx	
1.3.1.xx	Aset Tetap Tanah		Xxx

Pada Saat Bangunan BSG siap digunakan/dioperasikan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan BASTB ini PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.2.xx	Bangun Serah Guna	xxx	
2.2.2.xx	Utang Jangka Panjang Lainnya		Xxx

Setiap akhir periode, Bangunan dan fasilitas hasil perjanjian BSG disusutkan dengan masa manfaat sama dengan masa kerjasama. Pada akhir periode, PPK-SKPD membuat jurnal penyusutan sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.7.xx	Beban Penyusutan Aset lainnya-Kemitraan	xxx	
1.5.4.xx	Akm. Penyusutan Aset Lain-lain		xxx

Dengan berakhirnya masa pemanfaatan baik untuk perjanjian BSG, BGS, sewa maupun KSP Kepala SKPD melaporkan dan mengusulkan status penggunaannya kepada Walikota Bima. Berdasarkan SK Walikota Bima

tentang status penggunaan aset PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.x.xx	Aset Tetap ...	xxxx	
1.5.2.xx	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		xxxx
1.5.4.xx	Akm. Penyusutan Aset Lain-lain	xxxx	
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxxx

Pengakuan Pendapatan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Berdasarkan perjanjian sewa, dibuat Surat Tagihan Sewa oleh Pengelola Barang/kepala SKPD sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Surat Tagihan Sewa ini PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.4.x	Piutang Sewa ...	xxxx	
8.1.4.xx	Pendapatan Sewa-LO		xxxx

Pada saat diterima uang tagihan sewa ini dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan. Berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
1.1.3.4.x	Piutang Sewa		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.4.2x	Pendapatan Sewa - LRA		xxxx

Hasil penerimaan sewa ini disetorkan ke BUD dengan Surat Tanda Setoran (STS) dan berdasarkan STS ini PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan		xxxx

b) Penagihan Kontribusi Tahunan

Berdasarkan perjanjian BSG atau BGS, Kerjasama Pemanfaatan dibuat surat Tagihan Kontribusi Tahunan oleh Pengelola Barang/Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan Tagihan Kontribusi Tetap ini PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.3.4.x	Piutang Lain-Lain PAD yang sah ...	xxxx	
8.1.4.xx	Pendapatan BSG/BGS - LO		xxxx

Pada saat diterima uang tagihan Kontribusi Tahunan ini dibuatkan Bukti Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerima dan Berdasarkan bukti penerimaan ini PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
1.1.3.4.x	Piutang Lain-Lain		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
4.1.4.xx	Pendapatan Lain PAD yg Sah - LRA		xxxx

Hasil penerimaan Kontribusi Tetap ini disetorkan ke BUD dengan Surat Tanda Setoran (STS) dan berdasarkan STS ini PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Sewa		xxxx

d. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- 1) Goodwill;
- 2) Hak Paten atau Hak Cipta;
- 3) Royalti;
- 4) Software;
- 5) Lisensi;
- 6) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya;
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka PPK SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat “Aset Tidak Berwujud” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (UP/GU/TU) atau “RK-

PPKD” di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Pembelian aset tidak berwujud dalam batasan tertentu dan bersifat non kontraktual dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU. Apabila pembelian aset tidak berwujud dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU oleh Bendahara Pengeluaran, maka pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan Pengesahan SPJ pengeluaran atas belanja modal, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.5.3.xx	Aset Tidak Berwujud	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx

Pada saat bendahara Pengeluaran melakukan permintaan ganti uang persediaan dengan mengajukan SPP/SPM-GU kepada Bendahara Umum Daerah. Berdasarkan tembusan SP2D-GU dari Bendahara Umum Daerah, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.2.x.xx	Belanja Modal	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatatat “Beban Amortisasi” di debet dan “Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud” di kredit.

e. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan

ke dalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK SKPD akan membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.7.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxxx	
1.5.4.xx	Aset Lain-Lain	xxxx	
1.3.x.xx	Aset Tetap		xxxx

G. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Ruang Lingkup

Sistem Akuntansi Kewajiban SKPD merupakan teknik pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mencatat kewajiban SKPD.

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban SKPD dapat muncul akibat perikatan dengan pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Sistem Akuntansi Kewajiban SKPD adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai dengan proses penyelesaian/pembayaran atas utang yang bersangkutan.

2. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Kewajiban di SKPD adalah PPTK, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran, yaitu sebagai berikut:

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam Sistem Akuntansi Kewajiban PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang dan jasa, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Secara sendiri, bersama dan atau oleh Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa dengan menggunakan nota pesanan/SPK/Dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Secara sendiri, bersama dan atau oleh Tim Penerima/Pemeriksa barang menerima barang berdasarkan

pada nota pesanan/SPK/Dokumen lain yang dipersamakan dan didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

3) Menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam Sistem Akuntansi Kewajiban SKPD, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal Umum;

2) Mencatat posting jurnal-jurnal transaksi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian obyek);

3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran (PA/KPA)

Dalam sistem Akuntansi Kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi Akuntansi SKPD.

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban SKPD, meliputi dan tidak terbatas pada:

a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi;

b. Nota Pesanan;

c. Berita Acara Serah Terima (BAST)

d. Surat Tagihan;

e. Surat Perjanjian Kerja/SPK/Kontrak/Faktur;

f. Kwitansi;

g. SP2D UP/GU/TU;

h. SP2D LS;

i. Surat Pernyataan PA/KPA tentang tanggungjawab PA terhadap Laporan Keuangan SKPD.

4. Jurnal Standar

Akuntansi Kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan terjadinya utang dan pembayaran utang.

a. Pengakuan beban pegawai belum dibayar

Ketika terdapat belanja pegawai dimana yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya dan sesuai ketentuan berhak mendapatkan pembayaran maka PPK-SKPD membuat Bukti Memorial. Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.1.xx	Beban pegawai	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Beban Pegawai		xxxx

b. Pengakuan beban barang yang belum dibayar

Ketika SKPD melakukan transaksi pembelian barang dan pembayaran belum dilakukan serta didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Berdasarkan BAST PPK-SKPD akan mengakui adanya utang.

Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa berupa ATK, sebagai contoh, yang belum dilakukan pembayaran, tapi barang tersebut telah diterima dan telah didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Berdasarkan BAST dan dokumen kelengkapan SPJ, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

1) Jika menggunakan pendekatan beban

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
9.1.2.xx	Beban Persediaan ATK	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Beban Barang dan Jasa		xxxx

2) Jika menggunakan pendekatan aset

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.7.xx	Persediaan ATK	xxxx	
2.1.5.xx	Utang Beban Barng dan Jasa		xxxx

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat adalah:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Barang dan Jasa	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx
5.2.2.xx	Belanja ATK	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

d. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat adalah:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.5.xx	Utang Belanja Barang dan Jasa	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.2.2.xx	Belanja ATK	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

H. KOREKSI KESALAHAN

1. Ruang Lingkup

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik serta kesalahan yang tidak berulang.

2. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan koreksi dan penyesuaian adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- b. Bendahara Penerimaan;
- c. Bendahara Pengeluaran;
- d. Pengurus Barang;
- e. Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran

3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan koreksi dan penyesuaian meliputi dan tidak terbatas pada:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) dalam hal terjadi kelebihan penyetoran pajak daerah;
- b. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) kembali belanja;
- c. Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi pendapatan;
- d. Bukti Memorial atas pergeseran dan koreksi belanja;
- e. Bukti Memorial atas kesalahan pencatatan aset.

4. Jurnal Standar

a. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak

1) Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu

Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan tahun sebelumnya, PPK-SKPD melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak/retribusi dan pendapatan lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD membuat bukti memorial kelebihan pendapatan. Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.1.xx	Ekuitas	xxxx	
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya		xxxx

Dalam kasus tertentu kelebihan pembayaran pajak daerah didahului dengan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB), dalam kondisi demikian PPK-SKPD dapat menggunakan dokumen tersebut secara langsung sebagai dasar pencatatan.

Pada saat dilakukan realisasi pengembalian pendapatan maka PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS pembayaran kelebihan pendapatan untuk diajukan kepada BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-SKPD, BUD menerbitkan SP2D-LS untuk dibayarkan kepada pihak penerima. Berdasarkan dokumen SP2D-LS, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya ...	xxxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxxx
5.3.1.xx	Belanja Tak Terduga	xxxx	
7.3.4.xx	Perubahan SAL		xxxx

2) Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Dalam hal terjadi pengembalian Pendapatan tahun berjalan, PPK-SKPD melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung yang menunjukkan adalah kelebihan pembayaran pajak/retribusi dan pendapatan lainnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD membuat bukti memorial kelebihan pendapatan. Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.1.1.xx	Pendapatan -LO	xxxx	
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya		xxxx

Pada saat dilakukan realisasi pengembalian pendapatan maka PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS pembayaran kelebihan pendapatan untuk diajukan kepada BUD. Berdasarkan SPM-LS dari PPK-SKPD, BUD menerbitkan SP2D-LS untuk dibayarkan kepada pihak penerima.

Berdasarkan dokumen SP2D-LS, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.6.xx	Utang Jangka Pendek Lainnya ...	xxx	
2.1.7.xx	R/K PPKD		xxx
5.3.1.xx	Belanja Tidak Terduga	xxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxx

Atas transaksi tersebut harus dilakukan penyesuaian sehingga pendapatan LRA mencerminkan jumlah penerimaan pendapatan yang secara riil masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan bukti memorial dan dokumen pendukungnya, PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
4.1.1.xx	Pendapatan - LRA	xxx	
5.3.1.xx	Belanja Tidak Terduga		xxx

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang

Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode-periode sebelumnya.

1) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

Sebagai contoh terjadi pengembalian belanja pegawai tahun berjalan karena salah perhitungan jumlah gaji. Pada saat menerima pengembalian kelebihan gaji, Bendahara Pengeluaran membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan TBP pengembalian belanja, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
9.1.1.xx	Beban Pegawai		xxxx

Pada saat pengembalian belanja tahun berjalan tersebut di setorkan ke Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan bukti STS pengembalian belanja, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
7.3.4.xx	Perubahan SAL	xxx	
5.1.1.xx	Belanja Pegawai		xxx

Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

2) Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya

a) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

- (1) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- (2) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

b) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

- (1) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
- (2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Ekuitas.

Sebagai contoh terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji. Pada saat menerima pengembalian kelebihan gaji, Bendahara Pengeluaran membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan TBP pengembalian belanja, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
3.1.1.xx	Ekuitas		xxxx

Pada saat pengembalian belanja tahun lalu tersebut di setorkan ke Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran membuat Surat Tanda Bukti Setoran (STS). Berdasarkan bukti STS pengembalian belanja, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.7.xx	R/K PPKD	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx
1.1.7.xx	Perubahan SAL	xxxx	
2.1.5.xx	Lain-lain PAD yg Sah-LRA		xxxx

- (3) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan Saldo Anggaran Lebih.

Atas kesalahan kekurangan pengeluaran beban, PPK-SKPD membuat jurnal:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.1.xx	Ekuitas	xxxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx
7.3.1.xx	Surplus/Defisit	xxxx	
7.3.4.xx	Perubahan SAL		xxxx

- (4) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan Saldo Anggaran Lebih.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
3.1.1.xx	Ekuitas		xxxx
7.3.4.xx	Perubahan SAL	xxxx	
7.3.1.xx	Surplus/Defisit LRA		xxxx

- (5) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan Saldo Anggaran Lebih.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.1.xx	Ekuitas	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
7.3.1.xx	Surplus/Defisit	xxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxx

- (6) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Saldo Anggaran Lebih, dan akun Aset bersangkutan.

- (a) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
1.3.1.xx	Tanah Kantor		xxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxx	
7.3.1.xx	Surplus/Defisit LRA		xxxx

- (b) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.3.1.xx	Peralatan Kantor	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
7.3.1.xx	Surplus/Defisit	xxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxx

- (7) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Saldo Anggaran Lebih, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
1.3.1.xx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxxx
3.1.2.xx	Perubahan SAL	xxxx	
7.3.1.xx	Surplus/Defisit LRA		xxxx

- (b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
2.1.3.xx	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	
1.1.1.xx	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
7.3.1.xx	Surplus/Defisit LRA	xxxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxxx

I. JURNAL, BUKU BESAR DAN NERACA SALDO

1. Jurnal SKPD

Jurnal di SKPD dilaksanakan dengan menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang sifatnya sejenis, berulang dan volumenya sangat tinggi. Sedangkan transaksi yang sifatnya tidak sejenis dan frekuensinya jarang diinput melalui jurnal umum. Penggolongan jurnal ini untuk mempermudah proses jurnal dan mengurangi kesalahan.

Jurnal khusus yang digunakan dalam sistem akuntansi SKPD dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jurnal penerimaan, digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan SKPD
- b. Jurnal pengeluaran, digunakan untuk mencatat transaksi belanja dan beban SKPD

Dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi jurnal khusus tersebut dapat diotomatisasi melalui dokumen penerimaan dan pengeluaran yang digunakan dalam penatausahaan keuangan daerah.

Transaksi lain yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam jurnal umum SKPD. Format buku jurnal yang digunakan dalam sistem akuntansi SKPD Pemerintah Kota Bima adalah:

PEMERINTAH KOTA BIMA
BUKU JURNAL

SKPD :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit

Raba Bima,

PPK-SKPD

ttd

Nama

NIP.....

2. Buku Besar

Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum diposting ke dalam Buku Besar. Transaksi akun-akun yang sejenis digolongkan dalam satu rekening buku besar sehingga diperoleh saldo untuk setiap masing-masing rekening buku besar. Misalnya akun Buku Besar belanja listrik berisi hasil posting dari transaksi-transaksi pembayaran rekening listrik mulai dari bulan Januari s/d Desember.

PEMERINTAH KOTA BIMA
BUKU SALDO

SKPD :

Kode Rekening	Nomor Rekening	Debet	Kredit	Saldo

Raba Bima,

PPK-SKPD

ttd

Nama

NIP.....

J. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. KETENTUAN UMUM

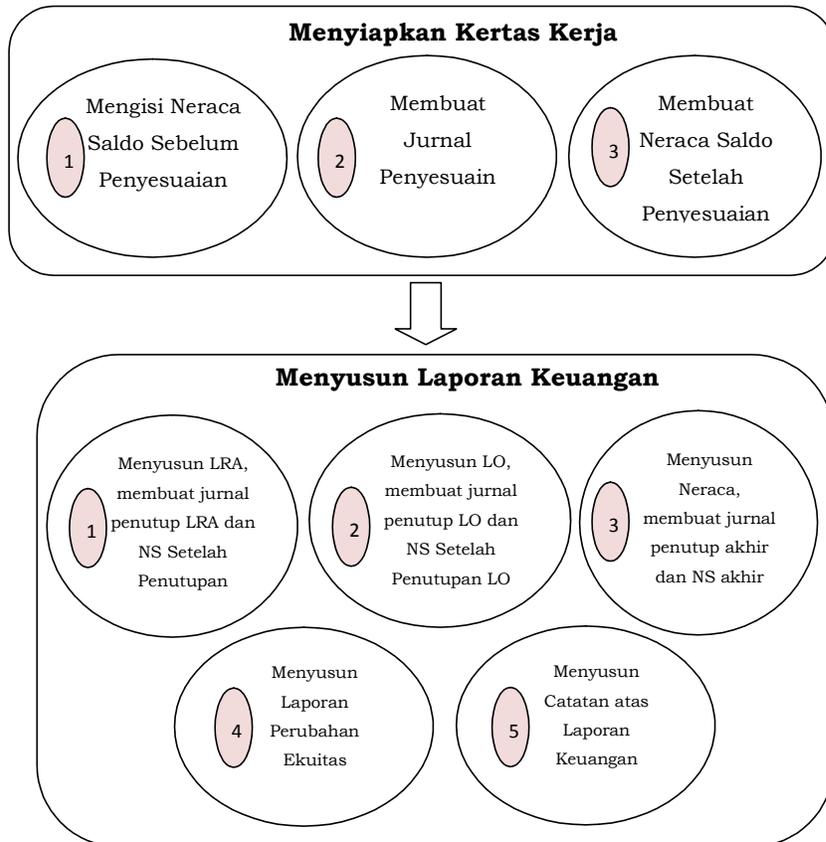
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD diperoleh melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SKPD hanya wajib membuat 5 Laporan Keuangan, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Ke 5 Laporan Keuangan ini disampaikan kepada Walikota Bima selambat-lambatnya 15 hari setelah Tahun Anggaran berakhir dan ditembuskan kepada SKPD yang diberi tugas sebagai PPKD.

Bagan berikut menunjukkan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD:



2. Pihak Yang Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
- b. Pengguna Anggaran

3. Langkah-Langkah Teknis

- a. Menyiapkan Kertas Kerja

PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo (NS)		Penyesuaian		NS Setelah Penyesuaian	
		D	K	D	K	D	K

1) Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada Kertas Kerja.

2) Membuat Jurnal Penyesuaian

PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja. Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
- b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

b. Menyusun Laporan Keuangan

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- a) Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran

dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

- b) Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Berikut ini contoh jurnal penutup LRA.
- c) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-LRA.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
4.x.x.xx	Pendapatan – LRA	Xxx	
5.x.x.xx	Belanja		xxx
3.1.2.xx	Surplus/Defisit-LRA		xxx

- d) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.2.xx	Surplus Defisit-LRA	Xxx	
3.1.2.xx	Perubahan SAL		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2) Menyusun Laporan Operasional (LO)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0 (nol).

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

- a) Untuk SKPD yang memiliki Pendapatan-LO lebih besar dari pada Beban

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.x.x.xx	Pendapatan – LO	xxx	
3.1.2.xx	Surplus – LO		xxx
9.x.x.xx	Beban		xxx

- b) Untuk SKPD yang memiliki beban lebih besar daripada Pendapatan-LO

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
8.x.x.xx	Pendapatan – LO	xxx	
3.1.2.xx	Defisit – LO	xxx	
9.x.x.xx	Beban		xxx

Contoh Format Laporan Operasional (LO) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional (LO)

3) Menyusun Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit)–LO ke akun Ekuitas.

Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

- a) Untuk SKPD yang memiliki Pendapatan-LO lebih besar daripada Beban

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.2.xx	Surplus/Defisit – LO	xxx	
3.1.2.xx	Ekuitas		xxx

- b) Untuk SKPD yang memiliki beban lebih besar daripada Pendapatan-LO

Kode	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
3.1.2.xx	Ekuitas	xxx	
3.1.2.xx	Surplus/Defisit – LO		xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Contoh Format Neraca dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Neraca.

4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat di lihat pada Lampiran Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi, khususnya Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Rincian dalam bentuk angka disajikan secara komparatif dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima mengacu pada format CALK yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima.

WALIKOTA BIMA,

M. QURAI H. ABIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 31 TAHUN 2015
 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI
 PEMERINTAH KOTA BIMA

**PEMERINTAH KOTA BIMA
 BAGAN AKUN STANDAR**

KODE AKUN					URAIAN
1					ASET
1	1				ASET LANCAR
1	1	1			Kas
1	1	1	1		Kas di Kas Daerah
1	1	1	1	1	Kas di Kas Daerah Bank NTB
1	1	1	1	2	Kas di Kas Daerah Bank BNI
1	1	1	1	3	Kas di Kas Daerah Bank BRI
1	1	1	1	4	Kas di Kas Daerah Bank BRI - 2
1	1	1	1	5	Kas di Kas Daerah Bank BRI - 3
1	1	1	1	6	Kas di Kas Daerah Bank BRI - 4
1	1	1	1	7	Kas di Kas Daerah Bank BNI - 2
1	1	1	1	8	Kas di Kas Daerah Bank BNI - 3
1	1	1	1	9	Kas di Kas Daerah Bank BNI - 4
1	1	1	1	10	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 2
1	1	1	1	11	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 3
1	1	1	1	12	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 4
1	1	1	1	15	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 5
1	1	1	1	16	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 6
1	1	1	1	17	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 7
1	1	1	1	18	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 7
1	1	1	1	19	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 8
1	1	1	1	20	Kas di Kas Daerah Bank NTB - 9
1	1	1	1	21	Dst.....
1	1	1	2		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	2	1	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	3		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	3	1	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank
1	1	1	3	2	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai
1	1	1	4		Kas di BLUD
1	1	1	4	1	Kas di BLUD

1	1	1	5		Kas Lainnya
1	1	1	5	1	Kas Lainnya
1	1	1	6		Setara Kas
1	1	1	6	1	Setara Kas
1	1	1	6	2	Dst.....
1	1	2			Investasi Jangka Pendek
1	1	2	1		Investasi dalam Saham
1	1	2	1	1	Investasi dalam Saham
1	1	2	1	2	Dst.....
1	1	2	2		Investasi dalam Deposito
1	1	2	2	1	Deposito Jangka Pendek
1	1	2	3		Investasi Dalam SUN
1	1	2	3	1	Investasi Dalam SUN
1	1	2	4		Investasi Dalam SBI
1	1	2	4	1	Investasi Dalam SBI
1	1	2	5		Investasi Dalam SPN
1	1	2	5	1	Investasi Dalam SPN
1	1	2	6		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	6	1	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	7		Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	2	7	1	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	3			Piutang Pendapatan
1	1	3	1		Piutang Pajak Daerah
1	1	3	1	1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	3	1	2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	3	1	3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	3	1	4	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	3	1	5	Piutang Pajak Rokok
1	1	3	1	6	Piutang Pajak Hotel
1	1	3	1	7	Piutang Pajak Restoran
1	1	3	1	8	Piutang Pajak Hiburan
1	1	3	1	9	Piutang Pajak Reklame
1	1	3	1	10	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	3	1	11	Piutang Pajak Parkir
1	1	3	1	12	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	3	1	13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	1	14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	3	1	15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1	1	3	1	16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	1	3	1	17	Piutang Pajak Lingkungan

1	1	3	1	18	Dst.....
1	1	3	2		Piutang Retribusi
1	1	3	2	1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	3	2	2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1	1	3	2	3	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
1	1	3	2	4	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	3	2	5	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	3	2	6	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	3	2	7	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	3	2	8	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	3	2	9	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	3	2	10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	3	2	11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	3	2	12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	3	2	13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	3	2	14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	3	2	15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	3	2	16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
1	1	3	2	17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	3	2	18	Piutang Retribusi Terminal
1	1	3	2	19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	3	2	20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1	1	3	2	21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	3	2	22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1	1	3	2	23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
1	1	3	2	24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air
1	1	3	2	25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	3	2	26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	3	2	27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	3	2	28	Piutang Retribusi Izin Gangguan
1	1	3	2	29	Piutang Retribusi Izin Trayek
1	1	3	2	30	Piutang Retribusi Izin Perikanan
1	1	3	2	31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	3	2	32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	3	2	33	Dst.....
1	1	3	3		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	3	1	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1	1	3	3	2	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1	1	3	3	3	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	3	3	4	Dst.....
1	1	3	4		Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	3	4	1	Piutang Jasa Giro
1	1	3	4	2	Piutang Bunga deposito

1	1	3	4	3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	3	4	4	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1	1	3	4	5	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	3	4	6	Piutang Denda Pajak
1	1	3	4	7	Piutang Denda Retribusi
1	1	3	4	8	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	3	4	9	Piutang dari Pengembalian
1	1	3	4	10	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1	1	3	4	11	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1	1	3	4	12	Piutang Zakat
1	1	3	4	13	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1	1	3	4	14	Piutang BLUD
1	1	3	4	15	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1	1	3	4	16	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	3	4	17	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	3	4	18	Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda
1	1	3	4	19	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1	1	3	4	20	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya
1	1	3	4	21	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN
1	1	3	4	22	Dst.....
1	1	3	5		Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1	1	3	5	1	Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	3	5	2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1	1	3	5	3	Piutang Dana Alokasi Umum
1	1	3	5	4	Piutang Dana Alokasi Khusus
1	1	3	5	5	Dst.....
1	1	3	6		Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
1	1	3	6	1	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur
1	1	3	6	2	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus
1	1	3	6	3	Piutang Transfer Dana Keistimewaan
1	1	3	6	4	Piutang Transfer Dana Penyesuaian
1	1	3	6	5	Dst.....
1	1	3	7		Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	3	7	1	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
1	1	3	7	2	Piutang Transfer Lainnya...
1	1	3	7	3	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
1	1	3	7	4	Piutang Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
1	1	3	7	5	Piutang Bagi Hasil Dari dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
1	1	3	7	6	Piutang Bagi Hasil Dari dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA
1	1	3	7	7	Piutang Bagi Hasil dari Air Permukaan - LRA
1	1	3	7	8	Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA
1	1	3	7	9	Dst.....
1	1	3	8		Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	3	8	1	Piutang Pendapatan Lainnya....
1	1	3	8	2	Dst.....

1	1	4			Piutang Lainnya
1	1	4	1		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	4	1	1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	4	1	2	Dst.....
1	1	4	2		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	4	2	1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Milik Negara
1	1	4	2	2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	1	4	2	3	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah
1	1	4	2	4	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	4	2	5	Dst.....
1	1	4	3		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	4	3	1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	1	4	3	2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	4	3	3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah
1	1	4	3	4	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Bermotor
1	1	4	3	5	Dst.....
1	1	4	4		Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	4	4	1	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	4	4	2	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1	1	4	5		Uang Muka
1	1	4	5	1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	4	5	2	Dst.....
1	1	4	6		Panjar Kegiatan
1	1	4	6	1	Panjar Kegiatan
1	1	4	6	2	Dst.....
1	1	5			Penyisihan Piutang
1	1	5	1		Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	5	1	1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	5	1	2	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	5	1	3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	5	1	4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	5	1	5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1	1	5	1	6	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	5	1	7	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	5	1	8	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya
1	1	5	1	9	Dst.....

1	1	5	2		Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	5	2	1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	5	2	2	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	5	2	3	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	5	2	4	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian
1	1	5	2	5	Penyisihan Uang Muka
1	1	5	2	6	Penyisihan Piutang Ganti Rugi atas kekayaan Daerah
1	1	5	2	7	Dst.....
1	1	6			Beban Dibayar Dimuka
1	1	6	1		Beban Pegawai Dibayar Dimuka
1	1	6	1	1	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
1	1	6	1	2	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka
1	1	6	1	3	Dst.....
1	1	6	2		Beban Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	2	1	Beban Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	2	2	Dst.....
1	1	6	3		Beban Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	3	1	Beban Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	3	2	Beban Sewa Dibayar Dimuka
1	1	6	3	3	Dst.....
1	1	6	4		Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	4	1	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	4	2	Dst.....
1	1	6	5		Beban Lainnya Dibayar Dimuka (Beban Lainnya)
1	1	6	5	1	Beban Lainnya Dibayar Dimuka (Beban Lainnya
1	1	6	5	2	Dst.....
1	1	7			Persediaan
1	1	7	1		Persediaan Bahan Pakai Habis
1	1	7	1	1	Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	7	1	2	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	7	1	3	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1	1	7	1	4	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1	1	7	1	5	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1	1	7	1	6	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1	1	7	1	7	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1	1	7	1	8	Persediaan Isi tabung gas
1	1	7	1	9	Persediaan Isi Tabung Oksigen
1	1	7	1	10	Persediaan Bahan Medis Pakai Habis
1	1	7	1	11	Persediaan Obat-obat
1	1	7	1	12	Persediaan Pakai Habis Laboratorium/Radiologi
1	1	7	1	13	Persediaan Duke (Linen)
1	1	7	1	14	Persediaan Bahan Penunjang Diagnostik

1	1	7	1	15	Persediaan Habis Pakai Lainnya
1	1	7	1	16	Dst.....
1	1	7	2		Persediaan Bahan/Material
1	1	7	2	1	Persediaan Bahan baku bangunan
1	1	7	2	2	Persediaan Bahan/bibit tanaman
1	1	7	2	3	Persediaan Bibit ternak
1	1	7	2	4	Persediaan Bahan obat-obatan
1	1	7	2	5	Persediaan Bahan kimia
1	1	7	2	6	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1	1	7	2	7	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
1	1	7	2	8	Persediaan Bahan/Alat Kesehatan Lainnya
1	1	7	2	9	Persediaan Bahan Habis Pakai Lainnya
1	1	7	2	10	Dst.....
1	1	7	3		Persediaan Barang Lainnya
1	1	7	3	1	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga
1	1	7	3	2	Dst.....
1	1	8			Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	8	1		R/K SKPD
1	1	8	1	1	R/K SKPD
1	1	8	1	2	Dst.....
1	2				INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	1			Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	1	1		Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	2	1	1	1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	1	1	2	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	1	1	3	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	1	1	4	Investasi kepada Pemerintah Pusat
1	2	1	1	5	Investasi kepada Pemerintah Daerah
1	2	1	1	6	Dst.....
1	2	1	2		Investasi dalam Obligasi
1	2	1	2	1	Investasi dalam Obligasi.....
1	2	1	2	2	Dst.....
1	2	1	3		Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	3	1	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	3	2	Dst.....
1	2	1	4		Dana Bergulir
1	2	1	4	1	Dana Bergulir
1	2	1	4	2	Dst.....
1	2	1	5		Deposito Jangka Panjang

1	2	1	5	1	Deposito Jangka Panjang
1	2	1	5	2	Dst.....
1	2	1	6		Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	6	1	Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	6	2	Dst.....
1	2	2			Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	2	1		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1	2	2	1	1	Penyertaan Modal Kepada BUMN
1	2	2	1	2	Penyertaan Modal Kepada BUMD
1	2	2	1	3	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1	2	2	1	4	Dst.....
1	2	2	2		Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	2	1	Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	2	2	Dst.....
1	3				ASET TETAP
1	3	1			Tanah
1	3	1	1		Tanah Perkampungan
1	3	1	1	1	Tanah Kampung
1	3	1	1	2	Tanah Emplasmen
1	3	1	1	3	Tanah Kuburan
1	3	1	1	4	Dst.....
1	3	1	2		Tanah Pertanian
1	3	1	2	1	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1	3	1	2	2	Tanah Tegalan
1	3	1	2	3	Tanah Ladang
1	3	1	2	4	Dst.....
1	3	1	3		Tanah Perkebunan
1	3	1	3	1	Tanah Perkebunan
1	3	1	3	2	Dst.....
1	3	1	4		Kebun Campuran
1	3	1	4	1	Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1	3	1	4	2	Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1	3	1	4	3	Dst.....
1	3	1	5		Hutan
1	3	1	5	1	Hutan Lebat
1	3	1	5	2	Hutan Belukar
1	3	1	5	3	Hutan Tanaman Jenis
1	3	1	5	4	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1	3	1	5	5	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1	3	1	5	6	Dst.....

1	3	1	6		Kolam Ikan
1	3	1	6	1	Kolam Ikan Tambak
1	3	1	6	2	Kolam Ikan Air Tawar
1	3	1	6	3	Dst.....
1	3	1	7		Danau/Rawa
1	3	1	7	1	Tanah Rawa
1	3	1	7	2	Tanah Danau
1	3	1	8		Tanah Tandus/Rusak
1	3	1	8	1	Tanah Tandus
1	3	1	8	2	Tanah Rusak
1	3	1	9		Alang-alang dan Padang Rumput
1	3	1	9	1	Tanah Alang-alang
1	3	1	9	2	Tanah Padang Rumput
1	3	1	10		Tanah Pengguna Lain
1	3	1	10	1	Tanah Penggalian
1	3	1	10	2	Tanah Pengguna Lain...
1	3	1	10	3	Dst.....
1	3	1	11		Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	1	11	1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	1	11	2	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	1	11	3	Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	11	4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1	3	1	11	5	Tanah Kosong
1	3	1	11	6	Tanah Peternakan
1	3	1	11	7	Tanah Bangunan Pengairan
1	3	1	11	8	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1	3	1	11	9	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1	3	1	11	10	Dst.....
1	3	1	12		Tanah Pertambangan
1	3	1	12	1	Tanah Pertambangan
1	3	1	12	2	Dst.....
1	3	1	13		Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1	3	1	13	1	Tanah Lapangan Olah Raga
1	3	1	13	2	Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	13	3	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1	3	1	13	4	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	1	13	5	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	1	13	6	Tanah Lapangan Terbang
1	3	1	13	7	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1	3	1	13	8	Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	1	13	9	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	13	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	13	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	1	13	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga

1	3	1	13	13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	1	13	14	Dst.....
1	3	2			Peralatan dan Mesin
1	3	2	1		Alat-Alat Besar Darat
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat Tractor
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Darat Grader
1	3	2	1	3	Alat-Alat Besar Darat Excavator
1	3	2	1	4	Alat-Alat Besar Darat Pile Driver
1	3	2	1	5	Alat-Alat Besar Darat Hauler
1	3	2	1	6	Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment
1	3	2	1	7	Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment
1	3	2	1	8	Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment
1	3	2	1	9	Alat-Alat Besar Darat Loader
1	3	2	1	10	Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat
1	3	2	1	11	Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses
1	3	2	1	12	Dst.....
1	3	2	2		Alat-Alat Besar Apung
1	3	2	2	1	Alat-Alat Besar Apung Dredger
1	3	2	2	2	Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator
1	3	2	2	3	Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger
1	3	2	2	4	Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik
1	3	2	2	5	Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung
1	3	2	2	6	Dst.....
1	3	2	3		Alat-alat Bantu
1	3	2	3	1	Alat-alat Bantu Alat Penarik
1	3	2	3	2	Alat-alat Bantu Feeder
1	3	2	3	3	Alat-alat Bantu Compressor
1	3	2	3	4	Alat-alat Bantu Electric Generating Set
1	3	2	3	5	Alat-alat Bantu Pompa
1	3	2	3	6	Alat-alat Bantu Mesin Bor
1	3	2	3	7	Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	2	3	8	Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	2	3	9	Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1	3	2	3	10	Dst.....
1	3	2	4		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	4	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	2	4	2	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	2	4	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	4	4	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	2	4	5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	2	4	6	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	2	4	7	Dst.....
1	3	2	5		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	2	5	1	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

1	3	2	5	2	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1	3	2	5	3	Kendaraan Tak Bermotor Khusus
1	3	2	5	4	Dst.....
1	3	2	6		Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	2	6	1	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1	3	2	6	2	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1	3	2	6	3	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1	3	2	7		Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	2	7	1	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1	3	2	7	2	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1	3	2	7	3	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	2	8		Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	2	8	1	Kapal Terbang
1	3	2	8	2	Dst.....
1	3	2	9		Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	9	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1	3	2	9	2	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1	3	2	9	3	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	9	4	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	9	5	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	2	9	6	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	2	9	7	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	2	9	8	Peralatan Las
1	3	2	9	9	Perkakas Pabrik Es
1	3	2	9	10	Dst.....
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	10	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	2	10	2	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	10	3	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	10	4	Perkakas Pengangkat
1	3	2	10	5	Perkakas Standar (Standart Tool)
1	3	2	10	6	Perkakas Khusus (Special Tool)
1	3	2	10	7	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	2	10	8	Peralatan Tukang-tukang Besi
1	3	2	10	9	Peralatan Tukang Kayu
1	3	2	10	10	Peralatan Tukang Kulit
1	3	2	10	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1	3	2	10	12	Dst.....
1	3	2	11		Alat Ukur
1	3	2	11	1	Alat Ukur universal
1	3	2	11	2	Alat Ukur/Test Intelegensia
1	3	2	11	3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	2	11	4	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1	3	2	11	5	Alat Calibrasi
1	3	2	11	6	Alat Ukur Oscilloscope

1	3	2	11	7	Alat Ukur Universal Tester
1	3	2	11	8	Alat Ukur/Pembanding
1	3	2	11	9	Alat Ukur Lainnya
1	3	2	11	10	Alat Timbangan/Blora
1	3	2	11	11	Anak Timbangan/Biasa
1	3	2	11	12	Takaran Kering
1	3	2	11	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1	3	2	11	14	Takaran Latex/Getah Susu
1	3	2	11	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas
1	3	2	11	16	Dst.....
1	3	2	12		Alat Pengolahan
1	3	2	12	1	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	2	12	2	Alat Panen/Pengolahan
1	3	2	12	3	Alat-Alat Peternakan
1	3	2	12	4	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	2	12	5	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	12	6	Alat Prosesing
1	3	2	12	7	Alat Pasca Panen
1	3	2	12	8	Alat Produksi Perikanan
1	3	2	12	9	Dst.....
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1	3	2	13	1	Alat Pemeliharaan Tanaman
1	3	2	13	2	Alat Panen
1	3	2	13	3	Alat Penyimpanan
1	3	2	13	4	Alat Laboratorium
1	3	2	13	5	Alat Penangkap Ikan
1	3	2	13	6	Dst.....
1	3	2	14		Alat Kantor
1	3	2	14	1	Mesin Tik
1	3	2	14	2	Mesin Hitung/Jumlah
1	3	2	14	3	Alat Reproduksi (Pengganda)
1	3	2	14	4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1	3	2	14	5	Alat Kantor Lainnya
1	3	2	14	6	Dst.....
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga
1	3	2	15	1	Meubelair
1	3	2	15	2	Alat Pengukur Waktu
1	3	2	15	3	Alat Pembersih
1	3	2	15	4	Alat Pendingin
1	3	2	15	5	Alat Dapur
1	3	2	15	6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	2	15	7	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	2	15	8	Dst.....
1	3	2	16		Komputer
1	3	2	16	1	Komputer Unit/Jaringan
1	3	2	16	2	Personal Komputer

1	3	2	16	3	Peralatan Komputer Mainframe
1	3	2	16	4	Peralatan Mini Komputer
1	3	2	16	5	Peralatan Personal Komputer
1	3	2	16	6	Peralatan Jaringan
1	3	2	16	7	Dst.....
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	17	1	Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	2	Meja Rapat Pejabat
1	3	2	17	3	Kursi Kerja Pejabat
1	3	2	17	4	Kursi Rapat Pejabat
1	3	2	17	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	6	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	2	17	7	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	2	17	8	Dst.....
1	3	2	18		Alat Studio
1	3	2	18	1	Peralatan Studio Visual
1	3	2	18	2	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	2	18	3	Peralatan Studio Video dan Film A
1	3	2	18	4	Peralatan Cetak
1	3	2	18	5	Peralatan Computing
1	3	2	18	6	Peralatan Pemetaan Ukur
1	3	2	18	7	Dst.....
1	3	2	19		Alat Komunikasi
1	3	2	19	1	Alat Komunikasi Telephone
1	3	2	19	2	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	2	19	3	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	2	19	4	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	2	19	5	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	2	19	6	Alat Komunikasi Sosial
1	3	2	19	7	Alat-alat Sandi
1	3	2	19	8	Dst.....
1	3	2	20		Peralatan Pemancar
1	3	2	20	1	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	2	20	2	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	2	20	3	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	2	20	4	Peralatan Pemancar UHF
1	3	2	20	5	Peralatan Pemancar SHF
1	3	2	20	6	Peralatan Antena MF/MW
1	3	2	20	7	Peralatan Antena HF/SW
1	3	2	20	8	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	2	20	9	Peralatan Antena UHF
1	3	2	20	10	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	2	20	11	Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	2	20	12	Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	2	20	13	Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	2	20	14	Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	2	20	15	Peralatan Microvawe FPU

1	3	2	20	16	Peralatan Microvawe Terrestrial
1	3	2	20	17	Peralatan Microvawe TVRO
1	3	2	20	18	Peralatan Dummy Load
1	3	2	20	19	Switcher Antena
1	3	2	20	20	Switcher/Menara Antena
1	3	2	20	21	Feeder
1	3	2	20	22	Humidity Control
1	3	2	20	23	Program Input Equipment
1	3	2	20	24	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	2	20	25	Dst.....
1	3	2	21		Alat Kedokteran
1	3	2	21	1	Alat Kedokteran Umum
1	3	2	21	2	Alat Kedokteran Gigi
1	3	2	21	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	2	21	4	Alat Kedokteran Mata
1	3	2	21	5	Alat Kedokteran T.H.T
1	3	2	21	6	Alat Rotgen
1	3	2	21	7	Alat Farmasi
1	3	2	21	8	Alat Kedokteran Bedah
1	3	2	21	9	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	2	21	10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
1	3	2	21	11	Alat Kedokteran Mortuary
1	3	2	21	12	Alat Kesehatan Anak
1	3	2	21	13	Alat Kedokteran Poliklinik Set
1	3	2	21	14	Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
1	3	2	21	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1	3	2	21	16	Alat Kedokteran Jantung
1	3	2	21	17	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	2	21	18	Alat Kedokteran Radiologi
1	3	2	21	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	2	21	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	2	21	21	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	2	21	22	Alat Kedokteran Hewan
1	3	2	21	23	Dst.....
1	3	2	22		Alat Kesehatan
1	3	2	22	1	Alat Kesehatan Perawatan
1	3	2	22	2	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	2	22	3	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	2	22	4	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	2	22	5	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1	3	2	22	6	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	2	22	7	Dst.....
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium
1	3	2	23	1	Alat Laboratorium Kimia Air
1	3	2	23	2	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	3	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	3	2	23	4	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1	3	2	23	5	Alat laboratorium Buatan/Geologi

1	3	2	23	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	2	23	7	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1	3	2	23	8	Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
1	3	2	23	9	Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	3	2	23	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1	3	2	23	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1	3	2	23	12	Alat Laboratorium Umum
1	3	2	23	13	Alat Laboratorium Umum A
1	3	2	23	14	Alat Laboratorium Kedokteran
1	3	2	23	15	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	16	Alat Laboratorium Kimia
1	3	2	23	17	Alat Laboratorium Microbiologi A
1	3	2	23	18	Alat Laboratorium Patologi
1	3	2	23	19	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	2	23	20	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	2	23	21	Alat Laboratorium Film
1	3	2	23	22	Alat Laboratorium Makanan
1	3	2	23	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	23	24	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	2	23	25	Alat Laboratorium Fisika
1	3	2	23	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	23	27	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	2	23	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	2	23	29	Alat Laboratorium Pasir
1	3	2	23	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	2	23	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	3	2	23	32	Alat Laboratorium Metalography
1	3	2	23	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	2	23	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	2	23	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	2	23	36	Alat Laboratorium Matrologie
1	3	2	23	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1	3	2	23	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	2	23	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1	3	2	23	40	Alat Laboratorium Uji Tekstel
1	3	2	23	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	2	23	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	3	2	23	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	2	23	44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	2	23	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	2	23	46	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	23	47	Alat Laboratorium Pertanian A
1	3	2	23	48	Alat Laboratorium Pertanian B
1	3	2	23	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	2	23	50	Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	2	23	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	2	23	52	Alat Laboratorium Oceanografi
1	3	2	23	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	2	23	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1	3	2	23	55	Alat Laboratorium Biologi
1	3	2	23	56	Alat Laboratorium Geofisika

1	3	2	23	57	Alat Laboratorium Tambang
1	3	2	23	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	2	23	59	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	2	23	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	2	23	61	Laboratorium Kearsipan
1	3	2	23	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1	3	2	23	63	Alat Laboratorium Lainnya
1	3	2	23	64	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1	3	2	23	65	Dst.....
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	2	24	1	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1	3	2	24	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika
1	3	2	24	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar
1	3	2	24	4	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan
1	3	2	24	5	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah
1	3	2	24	6	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas
1	3	2	24	7	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS
1	3	2	24	8	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam
1	3	2	24	9	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Ketrampilan
1	3	2	24	10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian
1	3	2	24	11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga
1	3	2	24	12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP
1	3	2	24	13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1	3	2	24	14	Dst.....
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	25	1	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument
1	3	2	25	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor
1	3	2	25	3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool
1	3	2	25	4	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A
1	3	2	25	5	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils
1	3	2	25	6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment
1	3	2	25	7	Dst.....
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	2	26	1	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector
1	3	2	26	2	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scientific
1	3	2	26	3	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System
1	3	2	26	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display
1	3	2	26	5	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply
1	3	2	26	6	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device
1	3	2	26	7	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics

1	3	2	26	8	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator
1	3	2	26	9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Experimental System
1	3	2	26	10	Dst.....
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	1	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	2	27	2	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja
1	3	2	27	3	Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	4	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment
1	3	2	27	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi
1	3	2	27	6	Dst.....
1	3	2	28		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	2	28	1	Radiation Application Equipment
1	3	2	28	2	Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	2	28	3	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1	3	2	28	4	Peralatan Hidrologi
1	3	2	28	5	Dst.....
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	29	1	Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	2	29	2	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	2	29	3	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	2	29	4	Laboratorium Lingkungan
1	3	2	29	5	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang
1	3	2	29	6	Dst.....
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	30	1	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
1	3	2	30	2	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
1	3	2	30	3	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and Analyzing System
1	3	2	30	4	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel
1	3	2	30	5	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes
1	3	2	30	6	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum
1	3	2	30	7	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop
1	3	2	30	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop
1	3	2	30	9	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop
1	3	2	30	10	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1	3	2	30	11	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop
1	3	2	30	12	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1	3	2	30	13	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop
1	3	2	30	14	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB
1	3	2	30	15	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment

1	3	2	30	16	Dst.....
1	3	2	31		Senjata Api
1	3	2	31	1	Senjata Genggam
1	3	2	31	2	Senjata Pinggang
1	3	2	31	3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1	3	2	31	4	Senapan Mesin
1	3	2	31	5	Senjata Api Mortir
1	3	2	31	6	Senjata Api Anti Lapis Baja
1	3	2	31	7	Senjata Api Artileri Medan (Armed)
1	3	2	31	8	Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	2	31	9	Senjata Api Peluru Kendali/Rudal
1	3	2	31	10	Senjata Api Kavaleri
1	3	2	31	11	Senjata Lain-lain
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api
1	3	2	32	1	Alat Keamanan
1	3	2	32	2	Non Senjata Api
1	3	2	33		Amunisi
1	3	2	33	1	Amunisi Umum
1	3	2	33	2	Amunisi Darat
1	3	2	33	3	Dst.....
1	3	2	34		Senjata Sinar
1	3	2	34	1	Senjata Sinar Laser
1	3	2	34	2	Dst.....
1	3	2	35		Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	2	35	1	Alat Bantu Kemanan
1	3	2	35	2	Alat Perlindungan
1	3	2	35	3	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1	3	2	35	4	Dst.....
1	3	3			Gedung dan Bangunan
1	3	3	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Kantor
1	3	3	1	2	Bangunan Gudang
1	3	3	1	3	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1	3	3	1	4	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	3	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	3	1	6	Bangunan Kesehatan
1	3	3	1	7	Bangunan Oceanarium/Observatorium
1	3	3	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	3	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	3	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	3	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1	3	3	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	3	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1	3	3	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool

1	3	3	1	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1	3	3	1	16	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	3	1	17	Bangunan Stasiun Bus
1	3	3	1	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1	3	3	1	19	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	3	1	20	Bangunan Gedung Museum
1	3	3	1	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1	3	3	1	22	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	3	1	23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan
1	3	3	1	24	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	3	1	25	Bangunan Gedung Kramatorium
1	3	3	1	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	3	1	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	3	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	2	1	Rumah Negara Golongan I
1	3	3	2	2	Rumah Negara Golongan II
1	3	3	2	3	Rumah Negara Golongan III
1	3	3	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	3	2	5	Asrama
1	3	3	2	6	Hotel
1	3	3	2	7	Motel
1	3	3	2	8	Flat/Rumah Susun
1	3	3	2	9	Dst.....
1	3	3	3		Bangunan Menara
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1	3	3	3	2	Bangunan Perambut Penerangan Pantai
1	3	3	3	3	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	3	3	4	Dst.....
1	3	3	4		Bangunan Bersejarah
1	3	3	4	1	Istana Peringatan
1	3	3	4	2	Rumah Adat
1	3	3	4	3	Rumah Peninggalan Sejarah
1	3	3	4	4	Makam Sejarah
1	3	3	4	5	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1	3	3	4	6	Dst.....
1	3	3	5		Tugu Peringatan
1	3	3	5	1	Tugu Kemerdekaan
1	3	3	5	2	Tugu Pembangunan
1	3	3	5	3	Tugu Peringatan Lainnya
1	3	3	6		Candi
1	3	3	6	1	Candi Hindhu
1	3	3	6	2	Candi Budha
1	3	3	6	3	Candi Lainnya
1	3	3	7		Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	3	7	1	Bangunan Bersejarah Lainnya

1	3	3	8		Tugu Peringatan
1	3	3	8	1	Tugu Peringatan
1	3	3	9		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	9	1	Tugu/Tanda Batas
1	3	3	9	2	Dst.....
1	3	3	10		Rambu-Rambu
1	3	3	10	1	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1	3	3	10	2	Rambu Tidak Bersuar
1	3	3	10	3	Dst.....
1	3	3	11		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	3	11	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light
1	3	3	11	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	3	11	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light
1	3	3	11	4	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)
1	3	3	11	5	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal
1	3	3	11	6	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light
1	3	3	11	7	Dst.....
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	3	4	1		Jalan
1	3	4	1	1	Jalan Negara/Nasional
1	3	4	1	2	Jalan Propinsi
1	3	4	1	3	Jalan Kabupaten/Kota
1	3	4	1	4	Jalan Desa
1	3	4	1	5	Jalan Khusus
1	3	4	1	6	Jalan Tol
1	3	4	1	7	Jalan Kereta
1	3	4	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	1	9	Dst.....
1	3	4	2		Jembatan
1	3	4	2	1	Jembatan Negara/Nasional
1	3	4	2	2	Jembatan Propinsi
1	3	4	2	3	Jembatan Kabupaten/Kota
1	3	4	2	4	Jembatan Desa
1	3	4	2	5	Jembatan Khusus
1	3	4	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol
1	3	4	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1	3	4	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	2	9	Jembatan Penyeberangan
1	3	4	2	10	Dst.....
1	3	4	3		Bangunan Air Irigasi
1	3	4	3	1	Bangunan Waduk Irigasi
1	3	4	3	2	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	4	3	3	Bangunan Pembawa Irigasi

1	3	4	3	4	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	4	3	5	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	4	3	6	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	4	3	7	Dst.....
1	3	4	4		Bangunan Air Pasang Surut
1	3	4	4	1	Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	4	4	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	4	4	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	4	4	4	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1	3	4	4	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	4	4	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	4	4	7	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	4	4	8	Dst.....
1	3	4	5		Bangunan Air Rawa
1	3	4	5	1	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1	3	4	5	2	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1	3	4	5	3	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1	3	4	5	4	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1	3	4	5	5	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1	3	4	5	6	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1	3	4	5	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	4	5	8	Dst.....
1	3	4	6		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	6	1	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1	3	4	6	2	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1	3	4	6	3	Bangunan Pembuang Pengaman
1	3	4	6	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	4	6	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1	3	4	6	6	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1	3	4	6	7	Dst.....
1	3	4	7		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	7	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	4	7	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	7	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	4	7	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	4	7	5	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	7	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	4	7	7	Dst.....
1	3	4	8		Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	4	8	1	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	4	8	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1	3	4	8	3	Bangunan Pembawa Air Bersih
1	3	4	8	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	4	8	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	4	8	6	Dst.....

1	3	4	9		Bangunan Air Kotor
1	3	4	9	1	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	4	9	2	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	4	9	3	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1	3	4	9	4	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	4	9	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	4	9	6	Dst.....
1	3	4	10		Bangunan Air
1	3	4	10	1	Bangunan Air Laut
1	3	4	10	2	Bangunan Air Tawar
1	3	4	10	3	Dst.....
1	3	4	11		Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	4	11	1	Instalasi Air Muka Tanah
1	3	4	11	2	Instalasi Air Sumber /Mata Air
1	3	4	11	3	Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	4	11	4	Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	4	11	5	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	4	11	6	Dst.....
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	1	Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	2	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	4	12	3	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	4	12	4	Dst.....
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1	3	4	13	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	4	13	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	2	Dst.....
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	15	1	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	4	15	2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	4	15	3	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1	3	4	15	4	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	4	15	5	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	4	15	6	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	4	15	7	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	4	15	8	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	4	15	9	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	4	15	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	4	15	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1	3	4	15	12	Dst.....
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik

1	3	4	16	1	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	4	16	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	4	16	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	4	16	4	Dst.....
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan
1	3	4	17	1	Instalasi Pertahanan Di Darat
1	3	4	17	2	Dst.....
1	3	4	18		Instalasi Gas
1	3	4	18	1	Instalasi Gardu Gas
1	3	4	18	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	4	19		Instalasi Pengaman
1	3	4	19	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	4	19	2	Dst.....
1	3	4	20		Jaringan Air Minum
1	3	4	20	1	Jaringan Pembawa
1	3	4	20	2	Jaringan Induk Distribusi
1	3	4	20	3	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	4	20	4	Jaringan Sambungan ke rumah
1	3	4	20	5	Dst.....
1	3	4	21		Jaringan Listrik
1	3	4	21	1	Jaringan Transmisi
1	3	4	21	2	Jaringan Distribusi
1	3	4	22		Jaringan Telepon
1	3	4	22	1	Jaringan Telepon Di atas Tanah
1	3	4	22	2	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1	3	4	22	3	Jaringan Telepon Didalam Air
1	3	4	23		Jaringan Gas
1	3	4	23	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	4	23	2	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	4	23	3	Jaringan Pipa Dinas
1	3	4	23	4	Jaringan BBM
1	3	4	23	5	Dst.....
1	3	5			Aset Tetap Lainnya
1	3	5	1		Buku
1	3	5	1	1	Buku Umum
1	3	5	1	2	Buku Filsafat
1	3	5	1	3	Buku Agama
1	3	5	1	4	Buku Ilmu Sosial
1	3	5	1	5	Buku Ilmu Bahasa
1	3	5	1	6	Buku Matematika & Pengetahuan alam
1	3	5	1	7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	5	1	8	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1	3	5	1	9	Buku Geografi, Biografi, Sejarah

1	3	5	1	10	Dst.....
1	3	5	2		Terbitan
1	3	5	2	1	Terbitan Berkala
1	3	5	2	2	Terbitan Buku Laporan
1	3	5	2	3	Dst.....
1	3	5	3		Barang-Barang Perpustakaan
1	3	5	3	1	Barang-Barang Perpustakaan Peta
1	3	5	3	2	Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
1	3	5	3	3	Barang-Barang Perpustakaan Musik
1	3	5	3	4	Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	5	3	5	Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
1	3	5	3	6	Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
1	3	5	3	7	Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording
1	3	5	3	8	Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
1	3	5	3	9	Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
1	3	5	3	10	Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
1	3	5	3	11	Dst.....
1	3	5	4		Barang Bercorak Kebudayaan
1	3	5	4	1	Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan
1	3	5	4	2	Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan
1	3	5	4	3	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian
1	3	5	4	4	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga
1	3	5	4	5	Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan
1	3	5	4	6	Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen
1	3	5	4	7	Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah
1	3	5	4	8	Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
1	3	5	4	9	Dst.....
1	3	5	5		Alat Olah Raga Lainnya
1	3	5	5	1	Alat Olah Raga Lainnya-Senam
1	3	5	5	2	Alat Olah Raga Air
1	3	5	5	3	Alat Olah Raga Udara
1	3	5	5	4	Alat Olah Raga Lainnya
1	3	5	6		Hewan
1	3	5	6	1	Binatang Ternak
1	3	5	6	2	Binatang Unggas
1	3	5	6	3	Binatang Melata
1	3	5	6	4	Binatang Ikan
1	3	5	6	5	Hewan Kebun Binatang
1	3	5	6	6	Hewan Pengamanan
1	3	5	6	7	Dst.....
1	3	5	7		Tanaman
1	3	5	7	1	Tanaman Perkebunan

1	3	5	7	2	Tanaman Holtikultura
1	3	5	7	3	Tanaman Kehutanan
1	3	5	7	4	Tanaman Hias
1	3	5	7	5	Tanaman Obat dan Kosmetika
1	3	5	7	6	Dst.....
1	3	5	8		Aset Tetap Renovasi
1	3	5	8	1	Aset Tetap Renovasi
1	3	5	8	2	Dst.....
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	1		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan
1	3	6	1	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung
1	3	6	1	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Emplasmen
1	3	6	1	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kuburan
1	3	6	2		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian
1	3	6	2	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1	3	6	2	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan
1	3	6	2	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Ladang
1	3	6	3		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan
1	3	6	3	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan
1	3	6	4		Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran
1	3	6	4	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1	3	6	4	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1	3	6	5		Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan
1	3	6	5	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Lebat
1	3	6	5	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Belukar
1	3	6	5	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Tanaman Jenis
1	3	6	5	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1	3	6	5	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1	3	6	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan
1	3	6	6	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Tambak
1	3	6	6	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan Air Tawar
1	3	6	7		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau/Rawa
1	3	6	7	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rawa
1	3	6	7	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau
1	3	6	8		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak
1	3	6	8	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus
1	3	6	8	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Rusak

1	3	6	9		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
1	3	6	9	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang
1	3	6	9	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Padang Rumput
1	3	6	10		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain
1	3	6	10	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Penggalian
1	3	6	11		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	6	11	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	6	11	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	6	11	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	6	11	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1	3	6	11	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kosong
1	3	6	11	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Peternakan
1	3	6	11	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Pengairan
1	3	6	11	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1	3	6	11	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1	3	6	12		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan
1	3	6	12	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertambangan
1	3	6	13		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1	3	6	13	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Olah Raga
1	3	6	13	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Parkir
1	3	6	13	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
1	3	6	13	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	6	13	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	6	13	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Terbang
1	3	6	13	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
1	3	6	13	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	6	13	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	6	13	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	6	13	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	6	13	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1	3	6	13	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	6	14		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat
1	3	6	14	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Tractor
1	3	6	14	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Grader
1	3	6	14	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Excavator

1	3	6	14	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Pile Driver
1	3	6	14	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Hauler
1	3	6	14	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Asphalt Equipment
1	3	6	14	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Compacting Equipment
1	3	6	14	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Aggregate Concrete Equipment
1	3	6	14	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Loader
1	3	6	14	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Alat Pengangkat
1	3	6	14	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses
1	3	6	15		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung
1	3	6	15	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Dredger
1	3	6	15	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Floating Excavator
1	3	6	15	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Amphibi Dredger
1	3	6	15	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Kapal Tarik
1	3	6	15	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung Mesin Proses Agung
1	3	6	16		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu
1	3	6	16	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Penarik
1	3	6	16	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Feeder
1	3	6	16	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Compressor
1	3	6	16	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set
1	3	6	16	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pompa
1	3	6	16	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Mesin Bor
1	3	6	16	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	6	16	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	6	16	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1	3	6	17		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	6	17	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	6	17	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	6	17	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	6	17	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	6	17	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	6	17	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	6	18		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	6	18	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	6	18	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

1	3	6	19		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	6	19	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1	3	6	19	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1	3	6	19	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1	3	6	20		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	6	20	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1	3	6	20	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1	3	6	20	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	6	21		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	6	21	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kapal Terbang
1	3	6	22		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin
1	3	6	22	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1	3	6	22	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1	3	6	22	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik
1	3	6	22	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service
1	3	6	22	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	6	22	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kayu
1	3	6	22	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Khusus
1	3	6	22	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Las
1	3	6	22	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pabrik Es
1	3	6	23		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	6	23	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	6	23	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Listrik
1	3	6	23	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Service
1	3	6	23	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Pengangkat
1	3	6	23	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Standar (Standart Tool)
1	3	6	23	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Khusus (Special Tool)
1	3	6	23	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Perkakas Bengkel Kerja
1	3	6	23	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang-tukang Besi
1	3	6	23	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kayu
1	3	6	23	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Tukang Kulit
1	3	6	23	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
1	3	6	24		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur
1	3	6	24	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur universal
1	3	6	24	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Intelegensia
1	3	6	24	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	6	24	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
1	3	6	24	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Calibrasi

1	3	6	24	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Oscilloscope
1	3	6	24	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Universal Tester
1	3	6	24	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur/Pembanding
1	3	6	24	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur Lainnya
1	3	6	24	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Timbangan/Blora
1	3	6	24	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Anak Timbangan/Biasa
1	3	6	24	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Kering
1	3	6	24	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1	3	6	24	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Takaran Latex/Getah Susu
1	3	6	24	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
1	3	6	25		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan
1	3	6	25	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	6	25	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen/Pengolahan
1	3	6	25	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Peternakan
1	3	6	25	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	6	25	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian
1	3	6	25	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Prosesing
1	3	6	25	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pasca Panen
1	3	6	25	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Produksi Perikanan
1	3	6	26		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1	3	6	26	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman
1	3	6	26	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Panen
1	3	6	26	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan
1	3	6	26	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium
1	3	6	26	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penangkap Ikan
1	3	6	27		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor
1	3	6	27	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Tik
1	3	6	27	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mesin Hitung/Jumlah
1	3	6	27	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Reproduksi (Pengganda)
1	3	6	27	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1	3	6	27	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor Lainnya
1	3	6	28		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga
1	3	6	28	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meubelair
1	3	6	28	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengukur Waktu
1	3	6	28	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pembersih
1	3	6	28	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pendingin
1	3	6	28	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Dapur
1	3	6	28	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	6	28	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemadam Kebakaran
1	3	6	29		Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer
1	3	6	29	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer Unit/Jaringan
1	3	6	29	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Personal Komputer

1	3	6	29	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Komputer Mainframe
1	3	6	29	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Mini Komputer
1	3	6	29	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Personal Komputer
1	3	6	29	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Jaringan
1	3	6	30		Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	6	30	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Kerja Pejabat
1	3	6	30	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Rapat Pejabat
1	3	6	30	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Kerja Pejabat
1	3	6	30	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Rapat Pejabat
1	3	6	30	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	6	30	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
1	3	6	30	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	6	31		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio
1	3	6	31	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Visual
1	3	6	31	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film
1	3	6	31	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Studio Video dan Film A
1	3	6	31	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Cetak
1	3	6	31	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Computing
1	3	6	31	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemetaan Ukur
1	3	6	32		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi
1	3	6	32	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Telephone
1	3	6	32	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	6	32	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	6	32	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	6	32	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	6	32	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi Sosial
1	3	6	32	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Sandi
1	3	6	33		Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar
1	3	6	33	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	6	33	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	6	33	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	6	33	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar UHF
1	3	6	33	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar SHF
1	3	6	33	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena MF/MW
1	3	6	33	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena HF/SW
1	3	6	33	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena VHF/FM
1	3	6	33	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena UHF
1	3	6	33	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	6	33	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	6	33	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	6	33	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator VHF/UHF

1	3	6	33	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	6	33	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe FPU
1	3	6	33	16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe Terestrial
1	3	6	33	17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Microvawe TVRO
1	3	6	33	18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Dummy Load
1	3	6	33	19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher Antena
1	3	6	33	20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Switcher/Menara Antena
1	3	6	33	21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Feeder
1	3	6	33	22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Humidity Control
1	3	6	33	23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Program Input Equipment
1	3	6	33	24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	6	34		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran
1	3	6	34	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Umum
1	3	6	34	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gigi
1	3	6	34	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	6	34	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mata
1	3	6	34	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran T.H.T
1	3	6	34	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rotgen
1	3	6	34	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Farmasi
1	3	6	34	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bedah
1	3	6	34	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	6	34	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
1	3	6	34	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Mortuary
1	3	6	34	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Anak
1	3	6	34	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Poliklinik Set
1	3	6	34	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
1	3	6	34	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1	3	6	34	16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jantung
1	3	6	34	17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Nuklir
1	3	6	34	18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Radiologi
1	3	6	34	19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	6	34	20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	6	34	21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Jiwa
1	3	6	34	22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran Hewan
1	3	6	35		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan
1	3	6	35	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Perawatan
1	3	6	35	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	6	35	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	6	35	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	6	35	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1	3	6	35	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan Olahraga

1	3	6	36		Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit Laboratorium
1	3	6	36	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia Air
1	3	6	36	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	6	36	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	3	6	36	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1	3	6	36	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
1	3	6	36	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	6	36	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1	3	6	36	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
1	3	6	36	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	3	6	36	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1	3	6	36	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1	3	6	36	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum
1	3	6	36	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Umum A
1	3	6	36	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kedokteran
1	3	6	36	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	6	36	16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kimia
1	3	6	36	17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Microbiologi A
1	3	6	36	18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Patologi
1	3	6	36	19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Immunologi
1	3	6	36	20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hematologi
1	3	6	36	21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Film
1	3	6	36	22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Makanan
1	3	6	36	23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	6	36	24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Farmasi
1	3	6	36	25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika
1	3	6	36	26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	6	36	27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	6	36	28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	6	36	29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pasir
1	3	6	36	30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	6	36	31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	3	6	36	32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Metalography
1	3	6	36	33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	6	36	34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	6	36	35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	6	36	36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Matrologie
1	3	6	36	37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam

1	3	6	36	38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	6	36	39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1	3	6	36	40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
1	3	6	36	41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	6	36	42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	3	6	36	43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	6	36	44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	6	36	45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	6	36	46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian
1	3	6	36	47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian A
1	3	6	36	48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Pertanian B
1	3	6	36	49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	6	36	50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	6	36	51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	6	36	52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Oceanografi
1	3	6	36	53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	6	36	54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1	3	6	36	55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Biologi
1	3	6	36	56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Geofisika
1	3	6	36	57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Tambang
1	3	6	36	58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	6	36	59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	6	36	60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	6	36	61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Kearsipan
1	3	6	36	62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1	3	6	36	63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lainnya
1	3	6	36	64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1	3	6	37		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	6	37	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1	3	6	37	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika
1	3	6	37	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar
1	3	6	37	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan
1	3	6	37	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah
1	3	6	37	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Atas
1	3	6	37	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPS

1	3	6	37	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama Islam
1	3	6	37	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan
1	3	6	37	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian
1	3	6	37	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga
1	3	6	37	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : PMP
1	3	6	37	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1	3	6	38		Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	6	38	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Analytical instrument
1	3	6	38	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor
1	3	6	38	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir General Laboratory Tool
1	3	6	38	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Instrument Probe/Sensor A
1	3	6	38	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Glassware Plastic/Utensils
1	3	6	38	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment
1	3	6	39		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	6	39	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Radiation Detector
1	3	6	39	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Modular Counting and Scientific
1	3	6	39	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Assembly/Accounting System
1	3	6	39	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display
1	3	6	39	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika System/Power Supply
1	3	6	39	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Measuring / Testing Device
1	3	6	39	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Opto Electronics
1	3	6	39	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Accelator
1	3	6	39	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Reactor Expermental System
1	3	6	40		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	6	40	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	6	40	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Alat Kesehatan Kerja
1	3	6	40	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Proteksi Lingkungan
1	3	6	40	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment
1	3	6	40	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi

1	3	6	41		Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	6	41	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application Equipment
1	3	6	41	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	6	41	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1	3	6	41	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Hidrologi
1	3	6	42		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	6	42	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	6	42	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	6	42	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	6	42	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Laboratorium Lingkungan
1	3	6	42	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Penunjang
1	3	6	43		Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	6	43	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
1	3	6	43	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
1	3	6	43	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System
1	3	6	43	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Cavitation Tunnel
1	3	6	43	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes
1	3	6	43	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Peralatan umum
1	3	6	43	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Model Ship Workshop
1	3	6	43	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propeller Model Workshop
1	3	6	43	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Mechanical Workshop
1	3	6	43	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1	3	6	43	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan Painting Shop
1	3	6	43	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1	3	6	43	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Electrical Workshop
1	3	6	43	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika MOB
1	3	6	43	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Photo and Film Equipment
1	3	6	44		Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api
1	3	6	44	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Genggam
1	3	6	44	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Pinggang
1	3	6	44	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang

1	3	6	44	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senapan Mesin
1	3	6	44	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Mortir
1	3	6	44	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Anti Lapis Baja
1	3	6	44	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Medan (Armed)
1	3	6	44	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	6	44	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Peluru Kendali/Rudal
1	3	6	44	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api Kavaleri
1	3	6	44	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Lain-lain
1	3	6	45		Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api
1	3	6	45	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan
1	3	6	45	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Non Senjata Api
1	3	6	46		Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi
1	3	6	46	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Umum
1	3	6	46	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi Darat
1	3	6	47		Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar
1	3	6	47	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar Laser
1	3	6	48		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	6	48	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bantu Kemanan
1	3	6	48	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Perlindungan
1	3	6	49		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	6	49	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor
1	3	6	49	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang
1	3	6	49	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1	3	6	49	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Instalasi
1	3	6	49	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	6	49	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan
1	3	6	49	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Oceanarium/Opervatorium
1	3	6	49	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	6	49	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	6	49	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	6	49	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1	3	6	49	12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	6	49	13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1	3	6	49	14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	6	49	15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1	3	6	49	16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pabrik
1	3	6	49	17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Stasiun Bus

1	3	6	49	18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1	3	6	49	19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	6	49	20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Museum
1	3	6	49	21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1	3	6	49	22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	6	49	23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Lembaga Masyarakat
1	3	6	49	24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rumah Tahanan
1	3	6	49	25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kramatorium
1	3	6	49	26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	6	49	27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	6	50		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	6	50	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan I
1	3	6	50	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan II
1	3	6	50	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Negara Golongan III
1	3	6	50	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	6	50	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Asrama
1	3	6	50	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hotel
1	3	6	50	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Motel
1	3	6	50	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun
1	3	6	51		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara
1	3	6	51	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1	3	6	51	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai
1	3	6	51	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	6	52		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah
1	3	6	52	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Istana Peringatan
1	3	6	52	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Adat
1	3	6	52	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rumah Peninggalan Sejarah
1	3	6	52	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Makam Sejarah
1	3	6	52	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1	3	6	53		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan
1	3	6	53	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Kemerdekaan
1	3	6	53	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan
1	3	6	53	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan Lainnya
1	3	6	54		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Candi
1	3	6	54	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Hindhu
1	3	6	54	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Budha
1	3	6	54	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi Lainnya

1	3	6	55		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
1	3	6	55	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah Lainnya
1	3	6	56		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	6	56	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Peringatan
1	3	6	56	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas
1	3	6	57		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	6	57	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1	3	6	57	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu Tidak Bersuar
1	3	6	58		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	6	58	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway/Threshold Light
1	3	6	58	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	6	58	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Approach Light
1	3	6	58	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Runway Identification Light(Rells)
1	3	6	58	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Signal
1	3	6	58	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Flood Light
1	3	6	59		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan
1	3	6	59	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Negara/Nasional
1	3	6	59	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Propinsi
1	3	6	59	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota
1	3	6	59	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Desa
1	3	6	59	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Khusus
1	3	6	59	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Tol
1	3	6	59	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kereta
1	3	6	59	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	6	60		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan
1	3	6	60	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Negara/Nasional
1	3	6	60	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Propinsi
1	3	6	60	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota
1	3	6	60	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Desa
1	3	6	60	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Khusus
1	3	6	60	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Tol
1	3	6	60	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1	3	6	60	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	6	60	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Penyeberangan
1	3	6	61		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi
1	3	6	61	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi
1	3	6	61	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Irigasi

1	3	6	61	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	6	61	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	6	61	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	6	61	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	6	62		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	6	62	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	6	62	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	6	62	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	6	62	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
1	3	6	62	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	6	62	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	6	62	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	6	63		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa
1	3	6	63	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1	3	6	63	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1	3	6	63	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1	3	6	63	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1	3	6	63	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1	3	6	63	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1	3	6	63	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	6	64		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	6	64	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1	3	6	64	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1	3	6	64	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman
1	3	6	64	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	6	64	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1	3	6	64	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1	3	6	65		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	6	65	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	6	65	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	6	65	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	6	65	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air

1	3	6	65	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1	3	6	65	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	6	66		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	6	66	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	6	66	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1	3	6	66	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih
1	3	6	66	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	6	66	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	6	67		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor
1	3	6	67	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	6	67	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	6	67	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
1	3	6	67	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	6	67	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	6	68		Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air
1	3	6	68	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Laut
1	3	6	68	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Tawar
1	3	6	69		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	6	69	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Muka Tanah
1	3	6	69	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Sumber /Mata Air
1	3	6	69	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	6	69	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	6	69	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	6	70		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor
1	3	6	70	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor
1	3	6	70	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Industri
1	3	6	70	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	6	71		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	6	71	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	6	71	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	6	72		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	6	72	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	6	73		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik

1	3	6	73	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	6	73	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	6	73	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1	3	6	73	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	6	73	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	6	73	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	6	73	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	6	73	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	6	73	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1	3	6	73	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	6	73	11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1	3	6	74		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik
1	3	6	74	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	6	74	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	6	74	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	6	75		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan
1	3	6	75	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan Di Darat
1	3	6	76		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas
1	3	6	76	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Gas
1	3	6	76	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	6	77		Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman
1	3	6	77	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	6	78		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum
1	3	6	78	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pembawa
1	3	6	78	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Induk Distribusi
1	3	6	78	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Cabang Distribusi
1	3	6	78	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Sambungan ke rumah
1	3	6	79		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik
1	3	6	79	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Transmisi
1	3	6	79	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Distribusi
1	3	6	80		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon
1	3	6	80	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
1	3	6	80	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1	3	6	80	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon Didalam Air

1	3	6	81		Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas
1	3	6	81	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	6	81	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Distribusi
1	3	6	81	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Pipa Dinas
1	3	6	81	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan BBM
1	3	6	82		Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku
1	3	6	82	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Umum
1	3	6	82	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Filsafat
1	3	6	82	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Agama
1	3	6	82	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Sosial
1	3	6	82	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Bahasa
1	3	6	82	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
1	3	6	82	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	6	82	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1	3	6	82	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
1	3	6	83		Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan
1	3	6	83	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Berkala
1	3	6	83	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan Buku Laporan
1	3	6	84		Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan
1	3	6	84	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
1	3	6	84	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
1	3	6	84	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
1	3	6	84	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	6	84	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artifacts and Realita
1	3	6	84	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
1	3	6	84	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara Sound Recording
1	3	6	84	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
1	3	6	84	9	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
1	3	6	84	10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
1	3	6	85		Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan
1	3	6	85	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Pahatan
1	3	6	85	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Lukisan
1	3	6	85	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian
1	3	6	85	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Olah Raga
1	3	6	85	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Tanda Penghargaan

1	3	6	85	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Maket dan Foto Dokumen
1	3	6	85	7	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Benda-benda Bersejarah
1	3	6	85	8	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
1	3	6	86		Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya
1	3	6	86	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya-Senam
1	3	6	86	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Air
1	3	6	86	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Udara
1	3	6	86	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya
1	3	6	87		Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan
1	3	6	87	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ternak
1	3	6	87	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Unggas
1	3	6	87	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Melata
1	3	6	87	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Binatang Ikan
1	3	6	87	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Kebun Binatang
1	3	6	87	6	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hewan Pengamanan
1	3	6	88		Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman
1	3	6	88	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Perkebunan
1	3	6	88	2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Holtikultura
1	3	6	88	3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Kehutanan
1	3	6	88	4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Hias
1	3	6	88	5	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman Obat dan Kosmetika
1	3	6	89		Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi
1	3	6	89	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi
1	3	6	90		Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi
1	3	7			Akumulasi Penyusutan
1	3	7	1		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	7	1	1	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1	3	7	1	2	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1	3	7	1	3	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1	3	7	1	4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	7	1	5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	7	1	6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	7	1	7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	7	1	8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	7	1	9	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1	3	7	1	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	7	1	11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1	3	7	1	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan
1	3	7	1	13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1	3	7	1	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1	3	7	1	15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga

1	3	7	1	16	Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	7	1	17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	7	1	18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1	3	7	1	19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1	3	7	1	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1	3	7	1	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1	3	7	1	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1	3	7	1	23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1	3	7	1	24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	7	1	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	7	1	26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	7	1	27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	7	1	28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	7	1	29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	7	1	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	7	1	31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1	3	7	1	32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1	3	7	1	33	Akumulasi Penyusutan Amunisi
1	3	7	1	34	Akumulasi Penyusutan Senjata Sinar
1	3	7	1	35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	7	2		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	7	2	1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	7	2	2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	7	2	3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	2	4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1	3	7	2	5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan
1	3	7	2	6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Candi
1	3	7	2	7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
1	3	7	2	8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	2	9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	7	2	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	7	3		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1	3	7	3	1	Akumulasi Penyusutan Jalan
1	3	7	3	2	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1	3	7	3	3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1	3	7	3	4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	7	3	5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1	3	7	3	6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	7	3	7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	7	3	8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	7	3	9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1	3	7	3	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	3	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	7	3	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor

1	3	7	3	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	7	3	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	7	3	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	7	3	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1	3	7	3	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1	3	7	3	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1	3	7	3	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1	3	7	3	20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum
1	3	7	3	21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1	3	7	3	22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1	3	7	3	23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas
1	3	7	4		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	7	4	1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Renovasi
1	4				DANA CADANGAN
1	4	1			Dana Cadangan
1	4	1	1		Dana Cadangan
1	4	1	1	1	Dana Cadangan
1	4	1	1	2	Dst.....
1	5				ASET LAINNYA
1	5	1			Tagihan Jangka Panjang
1	5	1	1		Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	1	1	1	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	5	1	1	2	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	1	1	3	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah
1	5	1	1	4	Dst.....
1	5	1	2		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	1	2	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	1	2	2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara
1	5	1	2	3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pihak Ketiga
1	5	2			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	2	1		Sewa
1	5	2	1	1	Sewa
1	5	2	1	2	Dst.....
1	5	2	2		Kerjasama Pemanfaatan
1	5	2	2	1	Kerjasama Pemanfaatan
1	5	2	2	2	Dst.....
1	5	2	3		Bangun guna serah

1	5	2	3	1	Bangun guna serah
1	5	2	3	2	Dst.....
1	5	2	4		Bangun serah guna
1	5	2	4	1	Bangun serah guna
1	5	2	4	2	Dst.....
1	5	3			Aset Tidak Berwujud
1	5	3	1		Goodwill
1	5	3	1	1	Goodwill
1	5	3	1	2	Dst.....
1	5	3	2		Lisensi dan frenchise
1	5	3	2	1	Lisensi dan frenchise
1	5	3	2	2	Dst.....
1	5	3	3		Hak Cipta
1	5	3	3	1	Hak Cipta
1	5	3	3	2	Dst.....
1	5	3	4		Paten
1	5	3	4	1	Paten
1	5	3	4	2	Dst.....
1	5	3	5		Aset Tidat Berwujud Lainnya
1	5	3	5	1	Software
1	5	3	5	2	Kajian
1	5	3	5	3	Dst.....
1	5	3	6		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	3	6	1	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1	5	3	6	2	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1	5	3	6	3	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1	5	3	6	4	Akumulasi Amortisasi Paten
1	5	3	6	5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya
1	5	4			Aset Lain-lain
1	5	4	1		Aset Lain-lain
1	5	4	1	1	Aset Lain-lain.....
1	5	4	1	2	Aset Dalam Usulan Penghapusan
1	5	4	1	3	Dst.....
1	5	4	2		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
1	5	4	2	1	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat
1	5	4	2	2	Dst.....
2					KEWAJIBAN
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2	1	1			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	1	1		Utang Taspen
2	1	1	1	1	Utang Taspen
2	1	1	1	2	Dst.....
2	1	1	2		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	1	2	1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	1	2	2	Dst.....
2	1	1	3		Utang PPh Pusat
2	1	1	3	1	Utang PPh 21
2	1	1	3	2	Utang PPh 22
2	1	1	3	3	Utang PPh 23
2	1	1	3	4	Utang PPh 25
2	1	1	3	5	Utang PPh Ps 4 (2)
2	1	1	3	6	Utang PPh 15
2	1	1	3	7	Utang PPh 26
2	1	1	4		Utang PPN Pusat
2	1	1	4	1	Utang PPN Pusat
2	1	1	4	2	Dst.....
2	1	1	5		Utang Taperum
2	1	1	5	1	Utang Taperum
2	1	1	5	2	Dst.....
2	1	1	6		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	6	1	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	6	2	Dst.....
2	1	1	7		Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	7	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	7	2	Utang Sewa Rumah
2	1	1	7	3	Utang Beras (BULOG)
2	1	1	8		Utang Jaminan
2	1	1	8	1	Utang Jaminan Bongkar Reklame
2	1	1	8	2	Utang Jaminan Pekerjaan
2	1	1	8	3	Dst.....
2	1	2			Utang Bunga
2	1	2	1		Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	1	1	Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	1	2	Dst.....
2	1	2	2		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	2	1	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	2	2	Dst.....

2	1	2	3		Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2	1	2	3	1	Utang Bunga Kepada BUMN
2	1	2	3	2	Utang Bunga Kepada BUMD
2	1	2	3	3	Dst.....
2	1	2	4		Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	4	1	Utang Bunga kepada Bank
2	1	2	4	2	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	4	3	Dst.....
2	1	2	5		Utang Bunga Obligasi
2	1	2	5	1	Utang Bunga Obligasi.....
2	1	2	5	2	Dst.....
2	1	2	6		Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	6	1	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	6	2	Dst.....
2	1	2	7		Utang Bunga Luar Negeri
2	1	2	7	1	Utang Bunga Luar Negeri
2	1	2	7	2	Dst.....
2	1	3			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	3	1		Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	1	1	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	1	2	Dst.....
2	1	3	2		Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	2	1	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	2	2	Dst.....
2	1	3	3		Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	3	1	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	3	2	Dst.....
2	1	3	4		Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	4	1	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	4	2	Dst.....
2	1	3	5		Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	5	1	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	5	2	Dst.....
2	1	4			Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	4	1		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	1	1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	1	2	Dst.....

2	1	4	2		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	2	1	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	2	2	Dst.....
2	1	4	3		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	3	1	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	3	2	Dst.....
2	1	4	4		Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2	1	4	4	1	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2	1	4	4	2	Dst.....
2	1	5			Utang Belanja
2	1	5	1		Utang Belanja Pegawai
2	1	5	1	1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2	1	5	1	2	Utang Belanja Honorarium Pegawai Honoror/Tiak tetap
2	1	5	1	3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2	1	5	1	4	Utang Belanja Uang Lembur
2	1	5	1	5	Dst.....
2	1	5	2		Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	2	1	Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	2	2	Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	5	2	3	Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	5	2	4	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2	1	5	2	5	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS
2	1	5	2	6	Dst.....
2	1	5	3		Utang Belanja Modal
2	1	5	3	1	Utang Belanja Modal Tanah
2	1	5	3	2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	5	3	3	Utang Belanja Gedung dan Bangunan
2	1	5	3	4	Utang Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan
2	1	5	3	5	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2	1	5	4		Utang Belanja Bunga
2	1	5	4	1	Utang Belanja Bunga
2	1	5	4	2	Dst.....
2	1	5	5		Utang Belanja Subsidi
2	1	5	5	1	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	5	5	1	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	5	5	1	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
2	1	5	5	1	Dst.....
2	1	5	6		Utang Belanja Hibah
2	1	5	6	1	Utang Belanja Hibah
2	1	5	6	2	Dst.....

2	1	5	7		Utang Belanja Bantuan Sosial
2	1	5	7	1	Utang Belanja Bantuan Sosial
2	1	5	7	2	Dst.....
2	1	5	8		Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	5	8	1	Utang Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
2	1	5	8	2	Utang Belanja Transfer Lainnya
2	1	5	8	3	Dst.....
2	1	5	9		Utang Belanja Lain-lain
2	1	5	9	1	Utang Belanja Lain-lain
2	1	5	9	2	Dst.....
2	1	6			Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	1		Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	6	1	1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	6	1	2	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	6	1	3	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2	1	6	1	4	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah
2	1	6	2		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	6	2	1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
2	1	6	2	2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
2	1	6	2	3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	2	4	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	3		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah
2	1	6	3	1	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	6	3	2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
2	1	6	4		Utang Transfer
2	1	6	4	1	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
2	1	6	4	2	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2	1	6	4	3	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya
2	1	6	4	4	Utang Transfer Bantuan kepada Partai Politik
2	1	6	4	5	Dst.....
2	1	6	5		Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	5	1	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	5	2	Dst.....
2	1	6	6		Utang Pengadaan Aset Tetap
2	1	6	6	1	Utang Pengadaan Aset Tetap

2	1	6	7		Utang Pembiayaan
2	1	6	7	1	Utang Pembiayaan
2	1	7			Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
2	1	7	1		R/K PPKD
2	1	7	1	1	R/K PPKD
2	2				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	1			Utang Dalam Negeri
2	2	1	1		Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	1	1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	2		Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	2	1	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	3		Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	3	1	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	4		Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	4	1	Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	5		Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	5	1	Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2	2	1	6		Utang Dalam Negeri Lainnya
2	2	1	6	1	Utang Dalam Negeri Lainnya
2	2	2			Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	2	1		Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	2	1	1	Utang Jangka Panjang Lainnya
3					EKUITAS
3	1				EKUITAS
3	1	1			Ekuitas
3	1	1	1		Ekuitas
3	1	1	1	1	Ekuitas
3	1	1	2		Surplus/Defisit-LO
3	1	1	2	1	Surplus/Defisit-LO
3	1	1	3		Koreksi Ekuitas
3	1	1	3	1	Koreksi Nilai Persediaan
3	1	1	3	2	Selisih Revaluasi Aset Tetap
3	1	1	3	3	Koreksi ekuitas lainnya

3	1	2			Ekuitas SAL
3	1	2	1		Estimasi Pendapatan
3	1	2	1	1	Estimasi Pendapatan
3	1	2	2		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	2	1	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	2	3		Apropriari Belanja
3	1	2	3	1	Apropriari Belanja
3	1	2	4		Apropriari Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	4	1	Apropriari Pengeluaran Pembiayaan
3	1	2	5		Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	5	1	Estimasi Perubahan SAL
3	1	2	6		Surplus/Defisit LRA
3	1	2	6	1	Surplus/Defisit LRA
3	1	2	7		Pembiayaan Netto
3	1	2	7	1	Pembiayaan Netto
3	1	2	8		SILPA/SIKPA
3	1	2	8	1	SILPA/SIKPA
3	1	2	9		Perubahan SAL
3	1	2	9	1	Perubahan SAL
3	1	3			Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	3	1		RK PPKD
3	1	3	1	1	RK PPKD
4					PENDAPATAN - LRA
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4	1	1	1		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4	1	1	1	1	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	1	2	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	1	3	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	1	4	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	1	1	5	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	1	6	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	1	7	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	1	8	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	1	9	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	1	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA

4	1	1	1	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	1	12	Dst.....
4	1	1	2		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4	1	1	2	1	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	2	2	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	2	3	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	2	4	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	1	2	5	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	2	6	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	2	7	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	2	8	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	2	9	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	2	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	2	11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	2	12	Dst.....
4	1	1	3		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	1	3	1	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4	1	1	3	2	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA
4	1	1	3	3	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA
4	1	1	3	4	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4	1	1	3	5	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4	1	1	3	6	Dst
4	1	1	4		Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	4	1	Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	5		Pajak Rokok - LRA
4	1	1	5	1	Pajak Rokok - LRA
4	1	1	6		Pajak Hotel - LRA
4	1	1	6	1	Hotel - LRA
4	1	1	6	2	Motel - LRA
4	1	1	6	3	Losmen - LRA
4	1	1	6	4	Gubuk Pariwisata - LRA
4	1	1	6	5	Wisma Pariwisata - LRA
4	1	1	6	6	Pesanggrahan - LRA
4	1	1	6	7	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LRA
4	1	1	6	8	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA
4	1	1	6	9	Dst.....
4	1	1	7		Pajak Restoran - LRA
4	1	1	7	1	Restoran - LRA
4	1	1	7	2	Rumah Makan - LRA
4	1	1	7	3	Kafetaria - LRA
4	1	1	7	4	Kantin - LRA
4	1	1	7	5	Warung - LRA
4	1	1	7	6	Bar - LRA
4	1	1	7	7	Jasa Boga/ Katering - LRA

4	1	1	7	8	Dst.....
4	1	1	8		Pajak Hiburan - LRA
4	1	1	8	1	Tontonan Film/Bioskop - LRA
4	1	1	8	2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4	1	1	8	3	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LRA
4	1	1	8	4	Pameran - LRA
4	1	1	8	5	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LRA
4	1	1	8	6	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4	1	1	8	7	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA
4	1	1	8	8	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4	1	1	8	9	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) - LRA
4	1	1	8	10	Pertandingan Olahraga - LRA
4	1	1	8	11	Hiburan Anak - LRA
4	1	1	8	12	Dst.....
4	1	1	9		Pajak Reklame - LRA
4	1	1	9	1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4	1	1	9	2	Reklame Kain - LRA
4	1	1	9	3	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4	1	1	9	4	Reklame Selebaran - LRA
4	1	1	9	5	Reklame Berjalan - LRA
4	1	1	9	6	Reklame Udara - LRA
4	1	1	9	7	Reklame Apung - LRA
4	1	1	9	8	Reklame Suara - LRA
4	1	1	9	9	Reklame Film/Slide - LRA
4	1	1	9	10	Reklame Peragaan - LRA
4	1	1	9	11	Reklame Cat - LRA
4	1	1	9	12	Dst.....
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	1	10	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA
4	1	1	10	2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA
4	1	1	11		Pajak Parkir - LRA
4	1	1	11	1	Pajak Parkir - LRA
4	1	1	12		Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	12	1	Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	13	1	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	1	14	1	Asbes - LRA
4	1	1	14	2	Batu Tulis - LRA
4	1	1	14	3	Batu Setengah Permata - LRA
4	1	1	14	4	Batu Kapur - LRA
4	1	1	14	5	Batu Apung - LRA
4	1	1	14	6	Batu Permata - LRA

4	1	1	14	7	Bentonit - LRA
4	1	1	14	8	Dolomit - LRA
4	1	1	14	9	Feldspar - LRA
4	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LRA
4	1	1	14	11	Grafit - LRA
4	1	1	14	12	Granit/Andesit - LRA
4	1	1	14	13	Gips - LRA
4	1	1	14	14	Kalsit - LRA
4	1	1	14	15	Kaolin - LRA
4	1	1	14	16	Leusit - LRA
4	1	1	14	17	Magnesit - LRA
4	1	1	14	18	Mika - LRA
4	1	1	14	19	Marmer - LRA
4	1	1	14	20	Nitrat - LRA
4	1	1	14	21	Opsidien - LRA
4	1	1	14	22	Oker - LRA
4	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LRA
4	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LRA
4	1	1	14	25	Perlit - LRA
4	1	1	14	26	Phospat - LRA
4	1	1	14	27	Talk - LRA
4	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4	1	1	14	29	Tanah Diatome - LRA
4	1	1	14	30	Tanah Liat - LRA
4	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LRA
4	1	1	14	32	Tras - LRA
4	1	1	14	33	Yarosif - LRA
4	1	1	14	34	Zeolit - LRA
4	1	1	14	35	Basal - LRA
4	1	1	14	36	Trakit - LRA
4	1	1	14	37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	15	1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4	1	1	16	1	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4	1	1	16	2	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
4	1	1	17		Pajak Lingkungan - LRA
4	1	1	17	1	Pajak Lingkungan - LRA
4	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4	1	2	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	2	1	1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4	1	2	1	2	Puskesmas keliling - LRA
4	1	2	1	3	Puskesmas pembantu - LRA
4	1	2	1	4	Balai Pengobatan - LRA
4	1	2	1	5	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA

4	1	2	1	6	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA
4	1	2	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	2	2	1	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA
4	1	2	2	2	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	2	3	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	3		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	3	1	Kartu Tanda Penduduk - LRA
4	1	2	3	2	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4	1	2	3	3	Kartu Identitas Kerja - LRA
4	1	2	3	4	Kartu Penduduk Sementara - LRA
4	1	2	3	5	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
4	1	2	3	6	Kartu Keluarga - LRA
4	1	2	3	7	Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	4		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	4	1	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
4	1	2	4	2	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	5		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	5	1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	6		Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	2	6	1	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA
4	1	2	6	2	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA
4	1	2	6	3	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA
4	1	2	7		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	7	1	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	2	7	2	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	2	7	3	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	2	7	4	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	2	7	5	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	2	7	6	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	2	7	7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	2	7	8	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	2	7	9	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	2	7	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	2	7	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	2	7	12	Dst.....
4	1	2	8		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	8	1	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	8	2	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA

4	1	2	8	3	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4	1	2	8	4	Dst.....
4	1	2	9		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	2	9	1	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4	1	2	9	2	Penyediaan Peta Foto - LRA
4	1	2	9	3	Penyediaan Peta Digital - LRA
4	1	2	9	4	Penyediaan Peta Tematik - LRA
4	1	2	9	5	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
4	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	10	1	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	2	11	1	Rumah Tangga - LRA
4	1	2	11	2	Perkantoran - LRA
4	1	2	11	3	Industri - LRA
4	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	2	12	1	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA
4	1	2	12	2	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA
4	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	1	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	2	Pelatihan Teknis - LRA
4	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	14	1	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	2	15	1	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	2	15	2	Laboratorium - LRA
4	1	2	15	3	Ruangan -LRA
4	1	2	15	4	Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	15	5	Pemakaian Alat-alat Berat - LRA
4	1	2	15	6	Dst.....
4	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	2	16	1	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
4	1	2	16	2	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA
4	1	2	16	3	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
4	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	17	1	Pelelangan Ikan - LRA
4	1	2	17	2	pelelangan Ternak - LRA
4	1	2	17	3	Pelelangan Hasil Bumi - LRA
4	1	2	17	4	Pelelangan Hasil Hutan - LRA
4	1	2	17	5	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LRA

4	1	2	18		Retribusi Terminal - LRA
4	1	2	18	1	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4	1	2	18	2	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4	1	2	18	3	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
4	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	19	1	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4	1	2	20	1	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
4	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	2	21	1	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA
4	1	2	21	2	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA
4	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA
4	1	2	22	1	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
4	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4	1	2	23	1	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4	1	2	23	2	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4	1	2	23	3	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4	1	2	24		Retribusi Penyebrangan Air - LRA
4	1	2	24	1	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA
4	1	2	24	2	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA
4	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	25	1	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA
4	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	26	1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA
4	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	27	1	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	2	28	1	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	28	2	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA
4	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	2	29	1	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	29	2	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	2	30	1	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	30	2	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA

4	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	2	31	1	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LRA
4	1	2	31	2	Penggunaan Koridor Tertentu -LRA
4	1	2	31	3	Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LRA
4	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	2	32	1	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
4	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
4	1	3	1		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
4	1	3	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
4	1	3	1	2	Dst
4	1	3	2		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA
4	1	3	2	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA
4	1	3	2	2	Dst
4	1	3	3		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4	1	3	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA
4	1	3	3	2	Dst
4	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
4	1	4	1		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4	1	4	1	1	Hasil Penjualan Tanah - LRA
4	1	4	1	2	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA
4	1	4	1	3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4	1	4	1	4	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4	1	4	1	5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
4	1	4	2		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	2	1	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	3		Penerimaan Jasa Giro - LRA
4	1	4	3	1	Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4	1	4	3	2	Jasa Giro Bendahara - LRA
4	1	4	3	3	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
4	1	4	3	4	Jasa Giro Dana Kapitasi - LRA
4	1	4	3	5	Dst
4	1	4	4		Pendapatan Bunga - LRA
4	1	4	4	1	Pendapatan Bunga Deposito - LRA
4	1	4	4	2	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LRA
4	1	4	4	3	Dst

4	1	4	5		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4	1	4	5	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA
4	1	4	5	2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan - LRA
4	1	4	6		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4	1	4	6	1	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4	1	4	6	2	Penerimaan Potongan dari - LRA
4	1	4	6	3	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA
4	1	4	6	4	Dst
4	1	4	7		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4	1	4	7	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA
4	1	4	7	2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA
4	1	4	7	3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA
4	1	4	7	4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA
4	1	4	7	5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA
4	1	4	7	6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA
4	1	4	7	7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA
4	1	4	7	8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	1	4	7	9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA
4	1	4	7	10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA
4	1	4	7	11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA
4	1	4	7	12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA
4	1	4	7	13	Dst...
4	1	4	8		Pendapatan Denda Pajak - LRA
4	1	4	8	1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	8	2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	8	3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	8	4	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	4	8	5	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA
4	1	4	8	6	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4	1	4	8	7	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4	1	4	8	8	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4	1	4	8	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4	1	4	8	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	4	8	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4	1	4	8	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
4	1	4	8	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA

4	1	4	8	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	4	8	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	4	8	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	4	8	17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LRA
4	1	4	9		Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4	1	4	9	1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	4	9	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA
4	1	4	9	3	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	4	9	4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	4	9	5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	4	9	6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	4	9	7	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	9	8	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	4	9	9	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	4	9	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	4	9	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	4	9	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	4	9	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	4	9	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	4	9	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	9	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	4	9	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	4	9	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4	1	4	9	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	4	9	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa - LRA
4	1	4	9	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	4	9	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	4	9	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4	1	4	9	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LRA
4	1	4	9	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	4	9	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	4	9	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	4	9	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	4	9	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	4	9	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	4	9	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	4	9	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	1	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	2	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	3	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	10	4	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	1	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	2	Dst
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4	1	4	12	1	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4	1	4	12	2	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4	1	4	12	3	Dst
4	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	13	1	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4	1	4	13	2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4	1	4	13	3	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4	1	4	13	4	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4	1	4	13	5	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LRA
4	1	4	13	6	Dst.....
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4	1	4	14	1	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4	1	4	14	2	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4	1	4	14	3	Dst
4	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4	1	4	15	1	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4	1	4	15	2	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4	1	4	15	3	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah - LRA
4	1	4	15	4	Dst.....
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	16	1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4	1	4	16	2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA
4	1	4	16	3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	16	4	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	17		Pendapatan BLUD - LRA
4	1	4	17	1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4	1	4	17	2	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4	1	4	17	3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA

4	1	4	17	4	Pendapatan Lain-lain BLUD - LRA
4	1	4	17	5	Dst.....
4	1	4	18		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	1	4	18	1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	1	4	19		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA
4	1	4	19	1	Fasilitas Sosial - LRA
4	1	4	19	2	Fasilitas Umum - LRA
4	1	4	19	3	Dst
4	1	4	20		Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4	1	4	20	1	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA
4	1	4	20	2	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA
4	1	4	20	3	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA
4	1	4	20	4	Dst
4	1	4	21		Hasil dari pengelolaan dana bergulir
4	1	4	21	1	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LRA
4	1	4	21	2	Dst
4	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA
4	1	4	22	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA
4	1	4	22	2	Dst.....
4	2				PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4	2	1	1		Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	1	1	1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4	2	1	1	2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4	2	1	1	3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4	2	1	1	4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
4	2	1	1	5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
4	2	1	1	6	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4	2	1	2	1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
4	2	1	2	2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4	2	1	2	3	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
4	2	1	2	4	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA
4	2	1	2	5	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA
4	2	1	2	6	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
4	2	1	2	7	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4	2	1	2	8	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4	2	1	2	9	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA

4	2	1	2	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4	2	1	2	11	Dst
4	2	1	3		Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4	2	1	3	1	Dana Alokasi Umum - LRA
4	2	1	4		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
4	2	1	4	1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4	2	1	4	2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4	2	1	4	3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
4	2	1	4	4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
4	2	1	4	5	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
4	2	1	4	6	DAK Bidang Kehutanan - LRA
4	2	1	4	7	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA
4	2	1	4	8	DAK Bidang Kesehatan - LRA
4	2	1	4	9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
4	2	1	4	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
4	2	1	4	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
4	2	1	4	12	DAK Bidang Perdagangan - LRA
4	2	1	4	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	2	1	4	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4	2	1	4	15	DAK Bidang Pertanian - LRA
4	2	1	4	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4	2	1	4	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4	2	1	4	18	DAK Bidang Pendidikan - LRA
4	2	1	4	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4	2	1	4	20	Dst.....
4	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4	2	2	1		Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	1	1	Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	1	2	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA
4	2	2	2		Dana Penyesuaian - LRA
4	2	2	2	1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4	2	2	2	2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4	2	2	2	3	Dana Insentif Daerah - LRA
4	2	2	2	4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
4	2	2	2	5	Dst
4	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	2	3	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	1	1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	2	3	1	2	Piutang Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	2	3	1	3	Piutang Bagi Hasil Dari dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	2	3	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA

4	2	3	1	5	Piutang Bagi Hasil dari Air Permukaan - LRA
4	2	3	1	6	Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA
4	2	3	1	7	Dst.....
4	2	3	2		Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4	2	3	2	1	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4	2	3	2	2	Dst
4	2	3	3		Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	3	3	1	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	4			Bantuan Keuangan - LRA
4	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
4	2	4	1	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA
4	2	4	1	2	Dst
4	2	4	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	2	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	2	2	Dst
4	2	4	3		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	2	4	3	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	2	4	3	2	Dst
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4	3	1			Pendapatan Hibah - LRA
4	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	1	2	Dst
4	3	1	2		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	2	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	2	2	Dst
4	3	1	3		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	3	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	3	2	Dst
4	3	1	4		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4	3	1	4	1	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4	3	1	4	2	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA

4	3	1	5		Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA
4	3	1	5	1	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LRA
4	3	1	5	2	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LRA
4	3	1	5	3	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LRA
4	3	2			Dana Darurat - LRA
4	3	2	1		Dana Darurat - LRA
4	3	2	1	1	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4	3	2	1	2	Dst
4	3	3			Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	1		Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	1	1	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
4	3	3	1	2	Dst
5					BELANJA
5	1				BELANJA OPERASI
5	1	1			Belanja Pegawai
5	1	1	1		Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	1	1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5	1	1	1	2	Belanja Tunjangan Keluarga
5	1	1	1	3	Belanja Tunjangan Jabatan
5	1	1	1	4	Belanja Tunjangan Fungsional
5	1	1	1	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	1	6	Belanja Tunjangan Beras
5	1	1	1	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	1	8	Belanja Pembulatan Gaji
5	1	1	1	9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
5	1	1	1	10	Belanja Uang Paket
5	1	1	1	11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	1	12	Belanja Tunjangan Komisi
5	1	1	1	13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	1	14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	1	15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	1	16	Belanja Tunjangan Perumahan
5	1	1	1	17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	1	18	Belanja Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	1	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	1	20	Belanja Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	1	21	BPJS Kesehatan
5	1	1	1	22	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
5	1	1	1	23	Jaminan Kematian (JKM)
5	1	1	1	24	Dst.....
5	1	1	2		Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	2	1	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

5	1	1	2	2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5	1	1	2	3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5	1	1	2	4	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5	1	1	2	5	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5	1	1	2	6	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
5	1	1	2	7	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Pengelola Keuangan Daerah (Tim Anggaran)
5	1	1	2	8	Belanja Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan SKPKD
5	1	1	2	9	Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS
5	1	1	2	10	Tunjangan Profesi Guru PNS
5	1	1	2	11	Dst.....
5	1	1	3		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	3	1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	3	2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	3	3	Dst.....
5	1	1	4		Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5	1	1	4	1	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5	1	1	4	2	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5	1	1	4	3	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5	1	1	4	4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
5	1	1	4	5	Belanja Biaya Pemungutan PBB
5	1	1	5		Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	5	1	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	5	2	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	5	3	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	5	4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5	1	1	5	5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5	1	1	5	6	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5	1	1	5	7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5	1	1	5	8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5	1	1	5	9	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5	1	1	5	10	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5	1	1	5	11	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5	1	1	5	12	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5	1	1	5	13	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5	1	1	5	14	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

5	1	1	5	15	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5	1	1	5	16	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5	1	1	5	17	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	6		Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	6	1	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5	1	1	6	2	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
5	1	1	6	3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
5	1	1	6	4	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5	1	1	6	5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5	1	1	6	6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5	1	1	6	7	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	6	8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5	1	1	6	9	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5	1	1	6	10	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5	1	1	6	11	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA
5	1	1	6	12	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
5	1	1	6	13	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
5	1	1	6	14	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
5	1	1	6	15	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
5	1	1	6	16	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
5	1	1	6	17	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
5	1	1	6	18	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
5	1	1	6	19	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
5	1	1	6	20	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
5	1	1	6	21	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5	1	1	6	22	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA
5	1	1	6	23	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
5	1	1	6	24	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA
5	1	1	6	25	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
5	1	1	6	26	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5	1	1	6	27	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5	1	1	6	28	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA

5	1	1	6	29	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
5	1	1	6	30	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
5	1	1	6	31	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA
5	1	1	6	32	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
5	1	1	7		Belanja Uang Lembur
5	1	1	7	1	Belanja Uang Lembur PNS
5	1	1	7	2	Belanja Uang Lembur Non PNS
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor
5	1	2	1	2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5	1	2	1	3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5	1	2	1	4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5	1	2	1	5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	1	2	1	6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	2	1	7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	2	1	8	Belanja Pengisian Tabung Gas
5	1	2	2		Belanja Bahan/Material
5	1	2	2	1	Belanja Bahan Baku Bangunan
5	1	2	2	2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5	1	2	2	3	Belanja Bibit Ternak
5	1	2	2	4	Belanja Bahan obat-obatan
5	1	2	2	5	Belanja Bahan Kimia
5	1	2	2	6	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5	1	2	2	7	Dst.....
5	1	2	3		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	3	1	Belanja Telepon
5	1	2	3	2	Belanja Air
5	1	2	3	3	Belanja Listrik
5	1	2	3	4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5	1	2	3	5	Belanja Surat Kabar/Majalah
5	1	2	3	6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5	1	2	3	7	Belanja Paket/Pengiriman
5	1	2	3	8	Belanja Sertifikasi
5	1	2	3	9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	1	2	3	10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	1	2	3	11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	2	3	12	Dst.....
5	1	2	4		Belanja Premi Asuransi
5	1	2	4	1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5	1	2	4	2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	2	4	3	Dst.....
5	1	2	5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	5	1	Belanja Jasa Service
5	1	2	5	2	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	2	5	3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5	1	2	5	4	Belanja Jasa KIR
5	1	2	5	5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	5	6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	5	7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5	1	2	5	8	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5	1	2	6		Belanja Cetak dan Penggandaan
5	1	2	6	1	Belanja Cetak
5	1	2	6	2	Belanja Penggandaan
5	1	2	6	3	Dst.....
5	1	2	7		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	7	1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5	1	2	7	2	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
5	1	2	7	3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5	1	2	7	4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
5	1	2	7	5	Belanja Sewa Terminal Dumping dan Instalasi Persampahan
5	1	2	7	6	Belanja Sewa Gelanggang Olah Raga
5	1	2	7	7	Belanja Sewa Lahan/Tanah untuk Prasarana Jalan
5	1	2	7	8	Dst.....
5	1	2	8		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	8	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	8	2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	8	3	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5	1	2	8	4	Dst ...
5	1	2	9		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	2	9	1	Belanja Sewa Eskavator
5	1	2	9	2	Belanja Sewa Bulldoser
5	1	2	9	3	Belanja Sewa Concrete
5	1	2	9	4	Belanja Sewa Alat Pengangkat
5	1	2	9	5	Belanja Sewa Alat Pengaspalan
5	1	2	9	6	Belanja Sewa Hammer
5	1	2	9	7	Belanja Sewa Truck Loader
5	1	2	9	8	Belanja Sewa Vibrator Roller
5	1	2	9	9	Belanja Sewa Wheel Loader
5	1	2	9	10	Belanja Sewa Traktor
5	1	2	9	11	Belanja Sewa Dump Truck
5	1	2	9	12	Belanja Sewa Kendaraan Penyapu Jalan
5	1	2	9	13	Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen
5	1	2	9	14	Belanja Sewa Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
5	1	2	9	15	Belanja Sewa Mesin Generator

5	1	2	9	16	Belanja Sewa Container
5	1	2	9	17	Belanja Sewa Mesin Pengolah Air Kotor
5	1	2	9	18	Belanja Sewa Mesin Ketel Uap
5	1	2	9	19	Belanja Sewa Pompa
5	1	2	9	20	Belanja Sewa Incenerator
5	1	2	9	21	Belanja Sewa Compactor
5	1	2	9	22	Belanja Sewa Stamper
5	1	2	9	23	Belanja Sewa Grader
5	1	2	9	24	Belanja Sewa Pile Driver
5	1	2	9	25	Belanja Sewa Hauler
5	1	2	9	26	Belanja Sewa Compacting Equipment
5	1	2	9	27	Dst ...
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	1	Belanja Sewa Meja Kursi
5	1	2	10	2	Belanja Sewa Komputer dan Printer
5	1	2	10	3	Belanja Sewa Proyektor
5	1	2	10	4	Belanja Sewa Generator
5	1	2	10	5	Belanja Sewa Tenda
5	1	2	10	6	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5	1	2	10	7	Belanja Sewa Peralatan Upacara/Hiburan
5	1	2	10	8	Dst.....
5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	11	1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5	1	2	11	2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	2	11	3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5	1	2	11	4	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
5	1	2	11	5	Dst.....
5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	12	1	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	2	12	2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	2	12	3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	2	12	4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	12	5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	12	6	Dst.....
5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	1	2	13	1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5	1	2	13	2	Dst.....
5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5	1	2	14	1	Belanja Pakaian KORPRI
5	1	2	14	2	Belanja Pakaian adat daerah
5	1	2	14	3	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	1	2	14	4	Belanja Pakaian Olahraga
5	1	2	14	5	Dst.....
5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	15	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5	1	2	15	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	1	2	15	3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	1	2	16	1	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5	1	2	16	2	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	2	17	1	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
5	1	2	17	2	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
5	1	2	17	3	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	18	1	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	18	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	18	3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	18	4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	1	2	18	5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	18	6	Belanja Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan Jalan
5	1	2	18	7	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
5	1	2	18	8	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
5	1	2	18	9	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan
5	1	2	18	10	Dst.....
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	2	19	1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	1	2	19	2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	2	19	3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	1	2	19	4	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
5	1	2	19	5	Dst.....
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	20	1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	20	3	Dst.....
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	21	1	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	2	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21	3	Dst.....
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	22	1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5	1	2	22	2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	2	22	3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	2	22	4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	2	22	5	Dst

5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5	1	2	23	1	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5	1	2	23	2	Belanja Sosialisasi
5	1	2	23	3	Belanja Bimbingan Teknis
5	1	2	23	4	Dst.....
5	1	2	24		Belanja Honorarium Non Pegawai
5	1	2	24	1	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5	1	2	24	2	Belanja Moderator
5	1	2	24	3	Dst.....
5	1	2	25		Belanja Honorarium PNS
5	1	2	25	1	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	2	25	2	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	2	25	3	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	25	4	Belanja Honorarium PNS Lainnya
5	1	2	25	5	Dst.....
5	1	2	26		Belanja Honorarium Non PNS
5	1	2	26	1	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26	2	Belanja Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap
5	1	2	26	3	Dst.....
5	1	2	27		Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	27	1	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	27	2	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
5	1	2	27	3	Dst.....
5	1	2	28		Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
5	1	2	28	1	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS
5	1	2	29		Belanja Barang Dana BOS
5	1	2	29	1	Belanja Barang Dana BOS
5	1	2	30		Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
5	1	2	30	1	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
5	1	2	30	2	Dst.....
5	1	2	31		Penunjang Kinerja Kegiatan
5	1	2	31	1	Uang Kinerja Kegiatan
5	1	2	31	2	Penunjang Operasional Kinerja
5	1	2	31	3	Dst.....
5	1	2	32		Belanja Transport Lokal
5	1	2	32	1	Belanja Transport Lokal
5	1	2	33		Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5	1	2	33	1	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah
5	1	2	33	2	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

5	1	2	34		Belanja Hadiah
5	1	2	34	1	Belanja Pemberian Hadiah
5	1	2	34	2	Dst.....
5	1	2	35		Belanja Jasa Operasional
5	1	2	35	1	Belanja Jasa Tenaga Operasional SKPD
5	1	2	35	2	Belanja Penunjang Tenaga Operasional SKPD
5	1	2	35	3	Belanja Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi
5	1	2	35	4	Dst.....
5	1	3			Belanja Bunga
5	1	3	1		Belanja Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	1	1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	3	1	2	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	3	1	3	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	1	4	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	1	5	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD
5	1	3	1	6	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN
5	1	3	1	7	Belanja Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5	1	3	1	8	Dst.....
5	1	3	2		Belanja Bunga Utang Obligasi
5	1	3	2	1	Belanja Bunga Utang Obligasi
5	1	3	2	2	Dst.....
5	1	4			Belanja Subsidi
5	1	4	1		Belanja Subsidi
5	1	4	1	1	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	1	2	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	1	3	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5	1	5			Belanja Hibah
5	1	5	1		Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	1	1	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	2		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	5	2	1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5	1	5	2	2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5	1	5	2	3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota
5	1	5	3		Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	3	1	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	3	2	Dst.....
5	1	5	4		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	4	1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

5	1	5	4	2	Dst ...
5	1	5	5		Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	5	1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	5	2	Dst ...
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial
5	1	6	1		Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	1	1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	1	2	Dst.....
5	1	6	2		Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5	1	6	2	1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	6	2	2	Dst.....
5	2				BELANJA MODAL
5	2	1			Belanja Modal Tanah
5	2	1	1		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	1	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung
5	2	1	1	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen
5	2	1	1	3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan
5	2	1	1	4	Dst.....
5	2	1	2		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	2	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	1	2	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan
5	2	1	2	3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang
5	2	1	2	4	Dst.....
5	2	1	3		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	3	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	3	2	Dst.....
5	2	1	4		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran
5	2	1	4	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	1	4	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5	2	1	4	3	Dst.....
5	2	1	5		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan
5	2	1	5	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat
5	2	1	5	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar
5	2	1	5	3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5	2	1	5	4	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5	2	1	5	5	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus

5	2	1	5	6	Dst.....
5	2	1	6		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan
5	2	1	6	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak
5	2	1	6	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
5	2	1	6	3	Dst.....
5	2	1	7		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5	2	1	7	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa
5	2	1	7	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau
5	2	1	8		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5	2	1	8	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus
5	2	1	8	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak
5	2	1	9		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5	2	1	9	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang
5	2	1	9	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput
5	2	1	10		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5	2	1	10	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalan
5	2	1	10	2	Dst.....
5	2	1	11		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
5	2	1	11	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	1	11	3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5	2	1	11	4	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5	2	1	11	5	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
5	2	1	11	6	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	1	11	7	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5	2	1	11	8	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	1	11	9	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5	2	1	11	10	Dst.....
5	2	1	12		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5	2	1	12	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5	2	1	12	2	Dst.....
5	2	1	13		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	1	13	1	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	1	13	2	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	1	13	3	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang

5	2	1	13	4	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	1	13	5	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	1	13	6	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	1	13	7	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5	2	1	13	8	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5	2	1	13	9	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5	2	1	13	10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5	2	1	13	11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5	2	1	13	12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5	2	1	13	13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	1	13	14	Dst.....
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	2	1		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5	2	2	1	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
5	2	2	1	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader
5	2	2	1	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
5	2	2	1	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver
5	2	2	1	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler
5	2	2	1	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphalt Equipment
5	2	2	1	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment
5	2	2	1	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5	2	2	1	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader
5	2	2	1	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat
5	2	2	1	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses
5	2	2	1	12	Dst.....
5	2	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	2	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger
5	2	2	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator
5	2	2	2	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger
5	2	2	2	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik
5	2	2	2	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung
5	2	2	2	6	Dst.....
5	2	2	3		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	3	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	3	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder

5	2	2	3	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
5	2	2	3	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5	2	2	3	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
5	2	2	3	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
5	2	2	3	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	2	3	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	2	3	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	2	3	10	Dst.....
5	2	2	4		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	4	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	4	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	4	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	4	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	4	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	4	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	5		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	5	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	5	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5	2	2	6		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	6	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	6	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	6	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5	2	2	7		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5	2	2	7	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	2	7	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	7	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	2	8		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5	2	2	8	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang
5	2	2	8	2	Dst.....
5	2	2	9		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

5	2	2	9	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	9	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	9	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	9	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
5	2	2	9	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	2	9	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	9	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	2	9	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
5	2	2	9	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5	2	2	9	10	Dst.....
5	2	2	10		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	10	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	2	10	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5	2	2	10	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5	2	2	10	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	2	10	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	2	10	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	2	10	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	2	10	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5	2	2	10	12	Dst.....
5	2	2	11		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
5	2	2	11	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5	2	2	11	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	2	11	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5	2	2	11	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5	2	2	11	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5	2	2	11	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
5	2	2	11	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5	2	2	11	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

5	2	2	11	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5	2	2	11	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5	2	2	11	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5	2	2	11	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering
5	2	2	11	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5	2	2	11	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5	2	2	11	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5	2	2	11	16	Dst.....
5	2	2	12		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
5	2	2	12	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	2	12	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	2	12	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5	2	2	12	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	2	12	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	12	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing
5	2	2	12	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen
5	2	2	12	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
5	2	2	12	9	Dst.....
5	2	2	13		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	13	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	13	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5	2	2	13	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5	2	2	13	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5	2	2	13	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5	2	2	13	6	Dst.....
5	2	2	14		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5	2	2	14	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5	2	2	14	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	2	14	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5	2	2	14	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	2	2	14	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5	2	2	14	6	Dst.....
5	2	2	15		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5	2	2	15	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5	2	2	15	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	15	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5	2	2	15	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5	2	2	15	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5	2	2	15	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	2	15	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	15	8	Dst.....
5	2	2	16		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5	2	2	16	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5	2	2	16	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5	2	2	16	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5	2	2	16	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5	2	2	16	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5	2	2	16	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5	2	2	16	7	Dst.....
5	2	2	17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	17	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	2	17	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5	2	2	17	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5	2	2	17	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
5	2	2	17	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	2	17	8	Dst.....
5	2	2	18		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5	2	2	18	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	18	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	18	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5	2	2	18	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5	2	2	18	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
5	2	2	18	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5	2	2	18	7	Dst.....

5	2	2	19		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5	2	2	19	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5	2	2	19	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	2	19	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	2	19	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	2	19	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	2	19	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5	2	2	19	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi
5	2	2	19	8	Dst.....
5	2	2	20		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	2	20	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	2	20	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	2	20	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	2	20	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5	2	2	20	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5	2	2	20	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5	2	2	20	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5	2	2	20	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5	2	2	20	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
5	2	2	20	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	2	20	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5	2	2	20	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5	2	2	20	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5	2	2	20	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5	2	2	20	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave FPU
5	2	2	20	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial
5	2	2	20	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microwave TVRO
5	2	2	20	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load
5	2	2	20	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5	2	2	20	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
5	2	2	20	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5	2	2	20	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control
5	2	2	20	23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment

5	2	2	20	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	2	20	25	Dst.....
5	2	2	21		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5	2	2	21	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	2	21	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	2	21	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	2	21	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5	2	2	21	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5	2	2	21	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen
5	2	2	21	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5	2	2	21	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5	2	2	21	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	2	21	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5	2	2	21	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary
5	2	2	21	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5	2	2	21	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set
5	2	2	21	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5	2	2	21	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5	2	2	21	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5	2	2	21	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5	2	2	21	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5	2	2	21	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	2	21	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	2	21	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5	2	2	21	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5	2	2	21	23	Dst.....
5	2	2	22		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
5	2	2	22	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	2	22	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	2	22	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	2	22	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	2	22	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5	2	2	22	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga

5	2	2	22	7	Dst.....
5	2	2	23		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	2	23	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	2	23	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5	2	2	23	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5	2	2	23	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5	2	2	23	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	2	23	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5	2	2	23	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5	2	2	23	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cokok Tanam
5	2	2	23	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5	2	2	23	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5	2	2	23	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5	2	2	23	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5	2	2	23	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5	2	2	23	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	2	23	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5	2	2	23	17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5	2	2	23	18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5	2	2	23	19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5	2	2	23	20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5	2	2	23	21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film
5	2	2	23	22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5	2	2	23	23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	2	23	24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5	2	2	23	25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5	2	2	23	26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	23	27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	2	23	28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	2	23	29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5	2	2	23	30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan

5	2	2	23	31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5	2	2	23	32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5	2	2	23	33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	2	23	34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	2	23	35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	2	23	36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5	2	2	23	37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5	2	2	23	38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	2	23	39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5	2	2	23	40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5	2	2	23	41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	2	23	42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5	2	2	23	43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	2	2	23	44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	2	23	45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	2	23	46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	23	47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5	2	2	23	48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5	2	2	23	49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	2	23	50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya
5	2	2	23	51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	2	2	23	52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5	2	2	23	53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	2	23	54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5	2	2	23	55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5	2	2	23	56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5	2	2	23	57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5	2	2	23	58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	2	23	59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	2	23	60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	2	23	61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5	2	2	23	62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5	2	2	23	63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

5	2	2	23	64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5	2	2	23	65	Dst.....
5	2	2	24		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5	2	2	24	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5	2	2	24	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5	2	2	24	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5	2	2	24	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5	2	2	24	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5	2	2	24	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5	2	2	24	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5	2	2	24	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5	2	2	24	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5	2	2	24	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5	2	2	24	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5	2	2	24	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5	2	2	24	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5	2	2	24	14	Dst.....
5	2	2	25		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	25	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument
5	2	2	25	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5	2	2	25	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool
5	2	2	25	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5	2	2	25	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5	2	2	25	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5	2	2	25	7	Dst.....
5	2	2	26		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5	2	2	26	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector
5	2	2	26	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scintific
5	2	2	26	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System
5	2	2	26	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display
5	2	2	26	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply
5	2	2	26	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device

5	2	2	26	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics
5	2	2	26	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
5	2	2	26	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Expermental System
5	2	2	26	10	Dst.....
5	2	2	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	2	27	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5	2	2	27	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment
5	2	2	27	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi
5	2	2	27	6	Dst.....
5	2	2	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing
5	2	2	28	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment
5	2	2	28	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	2	28	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5	2	2	28	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi
5	2	2	28	5	Dst.....
5	2	2	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	29	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	2	29	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	2	29	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5	2	2	29	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5	2	2	29	6	Dst.....
5	2	2	30		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	30	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5	2	2	30	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
5	2	2	30	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Accquistion and Analyzing System
5	2	2	30	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel
5	2	2	30	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes
5	2	2	30	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum

5	2	2	30	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5	2	2	30	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5	2	2	30	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5	2	2	30	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5	2	2	30	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5	2	2	30	12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5	2	2	30	13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5	2	2	30	14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB
5	2	2	30	15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment
5	2	2	30	16	Dst.....
5	2	2	31		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api
5	2	2	31	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam
5	2	2	31	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang
5	2	2	31	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5	2	2	31	4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin
5	2	2	31	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir
5	2	2	31	6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja
5	2	2	31	7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Medan (Armed)
5	2	2	31	8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5	2	2	31	9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Peluru Kendali/Rudal
5	2	2	31	10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Kavaleri
5	2	2	31	11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Senjata Lain-lain
5	2	2	32		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5	2	2	32	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
5	2	2	32	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api
5	2	2	33		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi
5	2	2	33	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum
5	2	2	33	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat
5	2	2	34		Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar
5	2	2	34	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser
5	2	2	34	2	Dst.....
5	2	2	35		Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5	2	2	35	1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5	2	2	35	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan

5	2	2	35	3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
5	2	2	35	4	Dst.....
5	2	3			Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	3	1		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	1	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	1	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	1	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	1	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	1	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	1	6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	1	7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opervatorium
5	2	3	1	8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	1	9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	1	10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	1	11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5	2	3	1	12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	1	13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	1	14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	1	15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	1	16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	1	17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5	2	3	1	18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	1	19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	1	20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	1	21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	1	22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	1	23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Masyarakat
5	2	3	1	24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	1	25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5	2	3	1	26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	3	1	27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

5	2	3	2		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	2	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	2	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	2	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	2	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	2	6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	2	7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	2	8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5	2	3	2	9	Dst.....
5	2	3	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	3	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5	2	3	3	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	3	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	3	4	Dst.....
5	2	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	4	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan
5	2	3	4	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat
5	2	3	4	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah
5	2	3	4	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5	2	3	4	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	4	6	Dst.....
5	2	3	5		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5	2	3	5	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	5	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5	2	3	5	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	6		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi
5	2	3	6	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu
5	2	3	6	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha
5	2	3	6	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya

5	2	3	7		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	7	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	8		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5	2	3	8	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5	2	3	9		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	9	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	10		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5	2	3	10	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	10	3	Dst.....
5	2	3	11		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway/Threshold Light
5	2	3	11	2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	3	11	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light
5	2	3	11	4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells)
5	2	3	11	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal
5	2	3	11	6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light
5	2	3	11	7	Dst.....
5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	12	1	Belanja Modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	12	2	Dst.....
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	2	4	1		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
5	2	4	1	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5	2	4	1	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi
5	2	4	1	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5	2	4	1	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
5	2	4	1	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
5	2	4	1	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol
5	2	4	1	7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta

5	2	4	1	8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	1	9	Dst.....
5	2	4	2		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
5	2	4	2	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5	2	4	2	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi
5	2	4	2	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5	2	4	2	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
5	2	4	2	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus
5	2	4	2	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5	2	4	2	7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5	2	4	2	8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	2	9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5	2	4	2	10	Dst.....
5	2	4	3		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5	2	4	3	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi
5	2	4	3	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	4	3	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	4	3	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	4	3	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	4	3	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	4	3	7	Dst.....
5	2	4	4		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5	2	4	4	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut
5	2	4	4	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	4	4	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	4	4	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5	2	4	4	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	4	4	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	4	4	7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	4	4	8	Dst.....
5	2	4	5		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa

5	2	4	5	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder
5	2	4	5	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5	2	4	5	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5	2	4	5	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5	2	4	5	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5	2	4	5	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5	2	4	5	7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	4	5	8	Dst.....
5	2	4	6		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA
5	2	4	6	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	4	6	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	4	6	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5	2	4	6	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	4	6	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5	2	4	6	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5	2	4	6	7	Dst.....
5	2	4	7		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	7	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	7	Dst.....
5	2	4	8		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5	2	4	8	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	4	8	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	4	8	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5	2	4	8	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	4	8	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

5	2	4	8	6	Dst.....
5	2	4	9		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
5	2	4	9	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	4	9	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	4	9	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5	2	4	9	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	4	9	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	4	9	6	Dst.....
5	2	4	10		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5	2	4	10	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5	2	4	10	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
5	2	4	10	3	Dst.....
5	2	4	11		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5	2	4	11	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah
5	2	4	11	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5	2	4	11	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
5	2	4	11	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal
5	2	4	11	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	4	11	6	Dst.....
5	2	4	12		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5	2	4	12	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	4	12	4	Dst.....
5	2	4	13		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	4	13	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	4	13	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	14		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	15		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik

5	2	4	15	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5	2	4	15	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5	2	4	15	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5	2	4	15	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	4	15	5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	4	15	6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	2	4	15	7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	4	15	8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	4	15	9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	2	4	15	10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	4	15	11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSM)
5	2	4	15	12	Dst.....
5	2	4	16		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	16	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	4	16	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	4	16	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	4	16	4	Dst.....
5	2	4	17		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan
5	2	4	17	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5	2	4	17	2	Dst.....
5	2	4	18		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5	2	4	18	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5	2	4	18	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	4	18	3	Dst.....
5	2	4	19		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5	2	4	19	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	4	19	2	Dst.....
5	2	4	20		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum
5	2	4	20	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5	2	4	20	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi

5	2	4	20	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5	2	4	20	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5	2	4	20	5	Dst.....
5	2	4	21		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5	2	4	21	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5	2	4	21	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5	2	4	22		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5	2	4	22	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5	2	4	22	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5	2	4	22	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5	2	4	23		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas
5	2	4	23	1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	4	23	2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5	2	4	23	3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5	2	4	23	4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
5	2	4	23	5	Dst.....
5	2	5			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	5	1		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5	2	5	1	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5	2	5	1	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5	2	5	1	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5	2	5	1	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5	2	5	1	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5	2	5	1	6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5	2	5	1	7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	5	1	8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5	2	5	1	9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5	2	5	1	10	Dst.....
5	2	5	2		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
5	2	5	2	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5	2	5	2	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan

5	2	5	2	3	Dst.....
5	2	5	3		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	3	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5	2	5	3	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
5	2	5	3	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
5	2	5	3	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	5	3	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5	2	5	3	6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
5	2	5	3	7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara
5	2	5	3	8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
5	2	5	3	9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	5	3	10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
5	2	5	3	11	Dst.....
5	2	5	4		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	4	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan
5	2	5	4	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
5	2	5	4	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5	2	5	4	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
5	2	5	4	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan
5	2	5	4	6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	5	4	7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5	2	5	4	8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5	2	5	4	9	Dst.....
5	2	5	5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	5	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5	2	5	5	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5	2	5	5	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5	2	5	5	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	5	5	Dst.....
5	2	5	6		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan

5	2	5	6	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak
5	2	5	6	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas
5	2	5	6	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata
5	2	5	6	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan
5	2	5	6	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	5	6	6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
5	2	5	6	7	Dst.....
5	2	5	7		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
5	2	5	7	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	5	7	2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5	2	5	7	3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5	2	5	7	4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5	2	5	7	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5	2	5	7	6	Dst.....
5	2	5	8		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5	2	5	8	1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5	2	5	9		Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud
5	2	5	9	1	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak
5	2	5	9	2	Belanja Modal Pengadaan Hak Cipta/Paten/Lisensi
5	2	5	9	3	Dst.....
5	2	5	10		Belanja Modal Dana BOS
5	2	5	10	1	Belanja Modal Dana BOS
5	2	5	10	2	Dst.....
5	3				BELANJA TAK TERDUGA
5	3	1			Belanja Tak Terduga
5	3	1	1		Belanja Tak Terduga
5	3	1	1	1	Belanja Tak Terduga
5	3	1	1	2	Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5	3	1	1	3	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya
6					TRANSFER
6	1				TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6	1	1			Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

6	1	1	1		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	1	1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	1	2	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
6	1	1	1	3	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
6	1	1	1	4	Dst.....
6	1	2			Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6	1	2	1		Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
6	1	2	1	1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
6	1	2	1	2	Dst.....
6	2				TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6	2	1			Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	1	1		Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
6	2	1	1	1	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
6	2	1	2		Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	2	1	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	2			Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	1		Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	1	1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	1	2	Dst.....
6	2	3			Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6	2	3	1		Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik
6	2	3	1	1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik
6	2	3	1	2	Dst.....
6	2	4			Transfer Dana Otonomi Khusus
6	2	4	1		Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota
6	2	4	1	1	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota
6	2	4	1	2	Dst.....
7					PEMBIAYAAN
7	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7	1	1			Penggunaan SiLPA
7	1	1	1		Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7	1	1	1	1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya

7	1	1	2		Koreksi SiLPA
7	1	1	2	1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7	1	1	2	2	Lain-lain
7	1	2			Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	1		Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	1	1	Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	1	2	Dst.....
7	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	1	1	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7	1	3	1	2	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
7	1	3	1	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7	1	4			Pinjaman Dalam Negeri
7	1	4	1		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	1	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	1	2	Dst.....
7	1	4	2		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	2	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	3		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	3	1	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	4		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	4	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	5		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	5	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	6		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	4	6	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	5			Penerimaan Kembali Piutang
7	1	5	1		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	1	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	2		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	2	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	3		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	3	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat

7	1	5	4		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	4	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	5		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	5	5	1	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	6			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	1		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	1	1	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	2		Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	2	1	Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	3		Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	3	1	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	4		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	4	1	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	7			Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	1		Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	1	1	Pinjaman Luar Negeri
7	1	8			Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	1		Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	1	1	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	1		Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
7	2	2			Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7	2	2	1		Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	1	1	Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	2		Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	2	1	Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	3		Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	2	3	1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	3			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

7	2	3	1		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	1	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	2		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	2	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	3		Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	3	1	Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	4		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	4	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	5		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	5	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	6		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	3	6	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah
7	2	4	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	2		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	2	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	3		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	3	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	4		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	4	4	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	5			Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	5	1		Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	1	1	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	2		Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	2	1	Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	3		Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	3	1	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	4		Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	5	4	1	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya

7	2	6			Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	1		Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	1	1	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	7			Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	1		Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	1	1	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	3				SALDO ANGGARAN LEBIH
7	3	1			Surplus/Defisit LRA
7	3	1	1		Surplus/Defisit LRA
7	3	1	1	1	Surplus/Defisit LRA
7	3	2			Pembiayaan Netto
7	3	2	1		Pembiayaan Netto
7	3	2	1	1	Pembiayaan Netto
7	3	3			SiLPA/SiKPA
7	3	3	1		SILPA/SIKPA
7	3	3	1	1	SILPA/SIKPA
7	3	4			Perubahan SAL
7	3	4	1		Perubahan SAL
7	3	4	1	1	Perubahan SAL
8					PENDAPATAN - LO
8	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LO
8	1	1	1		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8	1	1	1	1	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	1	2	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	1	3	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	1	4	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	1	1	5	PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	1	6	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	1	1	7	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	1	1	8	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	1	1	9	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	1	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	1	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	1	12	Dst.....

8	1	1	2		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8	1	1	2	1	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	2	2	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	2	3	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	2	4	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	1	2	5	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	2	6	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	1	2	7	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	1	2	8	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	1	2	9	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	2	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	2	11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	2	12	Dst.....
8	1	1	3		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	1	3	1	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8	1	1	3	2	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO
8	1	1	3	3	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO
8	1	1	3	4	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8	1	1	3	5	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8	1	1	3	6	Dst
8	1	1	4		Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	4	1	Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	5		Pajak Rokok - LO
8	1	1	5	1	Pajak Rokok - LO
8	1	1	6		Pajak Hotel - LO
8	1	1	6	1	Hotel - LO
8	1	1	6	2	Motel - LO
8	1	1	6	3	Losmen - LO
8	1	1	6	4	Gubuk Pariwisata - LO
8	1	1	6	5	Wisma Pariwisata - LO
8	1	1	6	6	Pesanggrahan - LO
8	1	1	6	7	Rumah Penginapan dan Sejenisnya - LO
8	1	1	6	8	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8	1	1	6	9	Dst.....
8	1	1	7		Pajak Restoran - LO
8	1	1	7	1	Restoran - LO
8	1	1	7	2	Rumah Makan - LO
8	1	1	7	3	Kafetaria - LO
8	1	1	7	4	Kantin - LO
8	1	1	7	5	Warung - LO
8	1	1	7	6	Bar - LO
8	1	1	7	7	Jasa Boga/ Katering - LO
8	1	1	7	8	Dst.....
8	1	1	8		Pajak Hiburan - LO

8	1	1	8	1	Tontonan Film/Bioskop - LO
8	1	1	8	2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8	1	1	8	3	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya - LO
8	1	1	8	4	Pameran - LO
8	1	1	8	5	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO
8	1	1	8	6	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8	1	1	8	7	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO
8	1	1	8	8	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8	1	1	8	9	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO
8	1	1	8	10	Pertandingan Olahraga - LO
8	1	1	8	11	Hiburan Anak - LO
8	1	1	8	12	Dst.....
8	1	1	9		Pajak Reklame - LO
8	1	1	9	1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8	1	1	9	2	Pajak Reklame Kain - LO
8	1	1	9	3	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8	1	1	9	4	Pajak Reklame Selebaran - LO
8	1	1	9	5	Pajak Reklame Berjalan - LO
8	1	1	9	6	Pajak Reklame Udara - LO
8	1	1	9	7	Pajak Reklame Apung - LO
8	1	1	9	8	Pajak Reklame Suara - LO
8	1	1	9	9	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8	1	1	9	10	Pajak Reklame Peragaan - LO
8	1	1	9	11	Pajak Reklame Cat - LO
8	1	1	9	12	Dst.....
8	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	1	10	1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO
8	1	1	10	2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO
8	1	1	11		Pajak Parkir - LO
8	1	1	11	1	Pajak Parkir - LO
8	1	1	12		Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	12	1	Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	13	1	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	1	14	1	Asbes - LO
8	1	1	14	2	Batu Tulis - LO
8	1	1	14	3	Batu setengah permata - LO
8	1	1	14	4	Batu Kapur - LO
8	1	1	14	5	Batu Apung - LO
8	1	1	14	6	Batu Permata - LO
8	1	1	14	7	Bentonit - LO
8	1	1	14	8	Dolomit - LO
8	1	1	14	9	Feldspar - LO

8	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LO
8	1	1	14	11	Grafit - LO
8	1	1	14	12	Granit/Andesit - LO
8	1	1	14	13	Gips - LO
8	1	1	14	14	Kalsit - LO
8	1	1	14	15	Kaolin - LO
8	1	1	14	16	Leusit - LO
8	1	1	14	17	Magnesit - LO
8	1	1	14	18	Mika - LO
8	1	1	14	19	Marmer - LO
8	1	1	14	20	Nitrat - LO
8	1	1	14	21	Opsidien - LO
8	1	1	14	22	Oker - LO
8	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LO
8	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LO
8	1	1	14	25	Perlit - LO
8	1	1	14	26	Phospat - LO
8	1	1	14	27	Talk - LO
8	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8	1	1	14	29	Tanah Diatome - LO
8	1	1	14	30	Tanah Liat - LO
8	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LO
8	1	1	14	32	Tras - LO
8	1	1	14	33	Yarosif - LO
8	1	1	14	34	Zeolit - LO
8	1	1	14	35	Basal - LO
8	1	1	14	36	Trakit - LO
8	1	1	14	37	Mineral bukan Logam dan Lainnya - LO
8	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	15	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8	1	1	16	1	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8	1	1	16	2	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8	1	1	17		Pajak Lingkungan - LO
8	1	1	17	1	Pajak Lingkungan - LO
8	1	2			Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8	1	2	1		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	2	1	1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8	1	2	1	2	Puskesmas keliling - LO
8	1	2	1	3	Puskesmas pembantu - LO
8	1	2	1	4	Balai Pengobatan - LO
8	1	2	1	5	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8	1	2	1	6	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO
8	1	2	2		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

8	1	2	2	1	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO
8	1	2	2	2	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO
8	1	2	2	3	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8	1	2	3		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	3	1	Kartu Tanda Penduduk - LO
8	1	2	3	2	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8	1	2	3	3	Kartu Identitas Kerja - LO
8	1	2	3	4	Kartu Penduduk Sementara - LO
8	1	2	3	5	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8	1	2	3	6	Kartu Keluarga - LO
8	1	2	3	7	Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	4		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	4	1	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8	1	2	4	2	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	5		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	5	1	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	6		Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	2	6	1	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO
8	1	2	6	2	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO
8	1	2	6	3	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO
8	1	2	7		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	7	1	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	2	7	2	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	2	7	3	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	2	7	4	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	2	7	5	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	2	7	6	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	2	7	7	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	2	7	8	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	2	7	9	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	2	7	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	2	7	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	2	8		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	8	1	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	8	2	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8	1	2	8	3	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8	1	2	9		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	2	9	1	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8	1	2	9	2	Penyediaan Peta Foto - LO

8	1	2	9	3	Penyediaan Peta Digital - LO
8	1	2	9	4	Penyediaan Peta Tematik - LO
8	1	2	9	5	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	10	1	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	2	11	1	Rumah Tangga - LO
8	1	2	11	2	Perkantoran - LO
8	1	2	11	3	Industri - LO
8	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	2	12	1	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO
8	1	2	12	2	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO
8	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	2	13	1	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8	1	2	13	2	Pelatihan Teknis - LO
8	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	2	14	1	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO
8	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	2	15	1	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8	1	2	15	2	Laboratorium - LO
8	1	2	15	3	Ruangan -LO
8	1	2	15	4	Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	15	5	Pemakaian Alat-alat Berat - LO
8	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	2	16	1	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8	1	2	16	2	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8	1	2	16	3	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO
8	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	17	1	Pelelangan Ikan - LO
8	1	2	17	2	pelelangan Ternak - LO
8	1	2	17	3	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8	1	2	17	4	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8	1	2	17	5	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	18		Retribusi Terminal - LO
8	1	2	18	1	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8	1	2	18	2	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8	1	2	18	3	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO

8	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	19	1	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	2	20	1	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	2	21	1	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO
8	1	2	21	2	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO
8	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	2	22	1	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8	1	2	23	1	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8	1	2	23	2	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8	1	2	23	3	Pelayanan Tempat Olahraga - LO
8	1	2	24		Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	2	24	1	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8	1	2	24	2	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	25	1	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	26	1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	27	1	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	2	28	1	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	28	2	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	2	29	1	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	29	2	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	2	30	1	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	30	2	Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LO
8	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	2	31	1	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO
8	1	2	31	2	Penggunaan Koridor Tertentu -LO
8	1	2	31	3	Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO

8	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	2	32	1	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8	1	3			Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8	1	3	1		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8	1	3	1	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah - LO
8	1	3	1	2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO
8	1	3	1	3	Dst
8	1	3	2		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO
8	1	3	2	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO
8	1	3	2	2	Dst
8	1	3	3		Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8	1	3	3	1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8	1	3	3	2	Dst
8	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8	1	4	1		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8	1	4	1	1	Hasil Penjualan Tanah - LO
8	1	4	1	2	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO
8	1	4	1	3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8	1	4	1	4	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8	1	4	1	5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8	1	4	2		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	2	1	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	3		Penerimaan Jasa Giro - LO
8	1	4	3	1	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8	1	4	3	2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8	1	4	3	3	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8	1	4	3	4	Jasa Giro Kapitasi - LO
8	1	4	3	5	Dst
8	1	4	4		Pendapatan Bunga - LO
8	1	4	4	1	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8	1	4	4	2	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO
8	1	4	4	3	Dst
8	1	4	5		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8	1	4	5	1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8	1	4	5	2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO

8	1	4	6		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8	1	4	6	1	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8	1	4	6	2	Penerimaan Potongan dari - LO
8	1	4	6	3	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8	1	4	6	4	Dst
8	1	4	7		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	7	1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO
8	1	4	7	2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO
8	1	4	7	3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO
8	1	4	7	4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO
8	1	4	7	5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO
8	1	4	7	6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
8	1	4	7	7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO
8	1	4	7	8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO
8	1	4	7	9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO
8	1	4	7	10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO
8	1	4	7	11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO
8	1	4	7	12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
8	1	4	7	13	Dst...
8	1	4	8		Pendapatan Denda Pajak - LO
8	1	4	8	1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	8	2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	8	3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	8	4	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8	1	4	8	5	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8	1	4	8	6	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8	1	4	8	7	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8	1	4	8	8	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8	1	4	8	9	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8	1	4	8	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	4	8	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8	1	4	8	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8	1	4	8	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	4	8	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	4	8	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	4	8	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

8	1	4	8	17	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan - LO
8	1	4	9		Pendapatan Denda Retribusi - LO
8	1	4	9	1	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	4	9	2	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	4	9	3	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	4	9	4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	4	9	5	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	4	9	6	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	4	9	7	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	9	8	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	4	9	9	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	4	9	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	4	9	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	4	9	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	4	9	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	4	9	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	4	9	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	9	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	4	9	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	4	9	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8	1	4	9	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	4	9	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	4	9	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	4	9	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO
8	1	4	9	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8	1	4	9	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	4	9	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	4	9	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	4	9	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	4	9	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	4	9	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	4	9	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	4	9	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	4	9	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	1	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8	1	4	10	2	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	3	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO

8	1	4	10	4	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8	1	4	11	1	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8	1	4	11	2	Dst
8	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8	1	4	12	1	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8	1	4	12	2	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8	1	4	12	3	Dst
8	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian -LO
8	1	4	13	1	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8	1	4	13	2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8	1	4	13	3	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8	1	4	13	4	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8	1	4	13	5	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO
8	1	4	13	6	Dst
8	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8	1	4	14	1	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8	1	4	14	2	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8	1	4	14	3	Dst
8	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8	1	4	15	1	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8	1	4	15	2	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8	1	4	15	3	Dst.....
8	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	16	1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8	1	4	16	2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8	1	4	16	3	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	16	4	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	17		Pendapatan BLUD - LO
8	1	4	17	1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8	1	4	17	2	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8	1	4	17	3	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8	1	4	17	4	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO
8	1	4	18		Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	18	1	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	19		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO

8	1	4	19	1	Fasilitas Sosial - LO
8	1	4	19	2	Fasilitas Umum - LO
8	1	4	19	3	Dst
8	1	4	20		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	20	1	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8	1	4	20	2	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	20	3	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8	1	4	20	4	Dst
8	1	4	21		Hasil dari pengelolaan dana bergulir
8	1	4	21	1	Hasil dari pengelolaan dana bergulir dari Kelompok Masyarakat..... - LO
8	1	4	21	2	Dst
8	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8	1	4	22	1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
8	1	4	22	2	Dst.....
8	1	4	23		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	23	1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	23	2	Dst.....
8	2				PENDAPATAN TRANSFER - LO
8	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8	2	1	1		Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	1	1	1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO
8	2	1	1	2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO
8	2	1	1	3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO
8	2	1	1	4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8	2	1	1	5	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO
8	2	1	1	6	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8	2	1	2		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8	2	1	2	1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8	2	1	2	2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8	2	1	2	3	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8	2	1	2	4	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8	2	1	2	5	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
8	2	1	2	6	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8	2	1	2	7	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8	2	1	2	8	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8	2	1	2	9	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8	2	1	2	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8	2	1	2	11	Dst

8	2	1	3		Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8	2	1	3	1	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	4		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8	2	1	4	1	DAK Bidang Infrastruktu Jalan - LO
8	2	1	4	2	DAK Bidang Infrastruktu Irigasi - LO
8	2	1	4	3	DAK Bidang Infrastruktu Air Minum - LO
8	2	1	4	4	DAK Bidang Infrastruktu Sanitasi- LO
8	2	1	4	5	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8	2	1	4	6	DAK Bidang Kehutanan - LO
8	2	1	4	7	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8	2	1	4	8	DAK Bidang Kesehatan - LO
8	2	1	4	9	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8	2	1	4	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8	2	1	4	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8	2	1	4	12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8	2	1	4	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8	2	1	4	14	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8	2	1	4	15	DAK Bidang Pertanian - LO
8	2	1	4	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8	2	1	4	17	DAK Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8	2	1	4	18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8	2	1	4	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8	2	1	4	20	Dst
8	2	2			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8	2	2	1		Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	1	1	Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	1	2	Dana Tambahan Infrastruktur - LO
8	2	2	2		Dana Penyesuaian - LO
8	2	2	2	1	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8	2	2	2	2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8	2	2	2	3	Dana Insentif Daerah - LO
8	2	2	2	4	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8	2	2	2	5	Dst
8	2	3			Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	2	3	1		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	3	1	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	2	3	1	2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8	2	3	1	3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	2	3	1	4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO
8	2	3	1	5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO
8	2	3	1	6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO
8	2	3	1	7	Dst

8	2	3	2		Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8	2	3	2	1	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8	2	3	2	2	Dst
8	2	3	3		Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	3	3	1	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	4			Bantuan Keuangan - LO
8	2	4	1		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8	2	4	1	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO
8	2	4	1	2	Dst
8	2	4	2		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	2	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	2	2	Dst
8	2	4	3		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8	2	4	3	1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO
8	2	4	3	2	Dst
8	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8	3	1			Pendapatan Hibah - LO
8	3	1	1		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	1	2	Dst
8	3	1	2		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	2	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	2	2	Dst
8	3	1	3		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8	3	1	3	1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8	3	1	3	2	Dst
8	3	1	4		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8	3	1	4	1	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8	3	1	4	2	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
8	3	1	5		Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO
8	3	1	5	1	Pendapatan Hibah Dari Bilateral - LO
8	3	1	5	2	Pendapatan Hibah Dari Multilateral - LO
8	3	1	5	3	Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya - LO

8	3	2			Dana Darurat - LO
8	3	2	1		Dana Darurat - LO
8	3	2	1	1	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8	3	2	1	2	Dst
8	3	3			Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	1		Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	1	1	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	1	2	Dst
8	4				SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8	4	1			Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	1		Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	1	1	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8	4	1	1	2	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8	4	1	1	3	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8	4	1	1	4	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8	4	1	1	5	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8	4	1	1	6	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8	4	1	1	7	Dst
8	4	2			Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	1		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	1	1	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8	4	2	1	2	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8	4	2	1	3	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8	4	2	1	4	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8	4	2	1	5	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8	4	2	1	6	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8	4	2	1	7	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8	4	2	1	8	Dst
8	4	3			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	1		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	1	1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	1	2	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
8	5				PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8	5	1			Pendapatan Luar Biasa - LO
8	5	1	1		Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8	5	1	1	1	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

9					BEBAN
9	1				BEBAN OPERASI
9	1	1			Beban Pegawai - LO
9	1	1	1		Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9	1	1	1	1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9	1	1	1	2	Beban Tunjangan Keluarga - LO
9	1	1	1	3	Beban Tunjangan Jabatan - LO
9	1	1	1	4	Beban Tunjangan Fungsional - LO
9	1	1	1	5	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO
9	1	1	1	6	Beban Tunjangan Beras - LO
9	1	1	1	7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9	1	1	1	8	Beban Pembulatan Gaji - LO
9	1	1	1	9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9	1	1	1	10	Beban Uang Paket - LO
9	1	1	1	11	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9	1	1	1	12	Beban Tunjangan Komisi - LO
9	1	1	1	13	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO
9	1	1	1	14	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9	1	1	1	15	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9	1	1	1	16	Beban Tunjangan Perumahan - LO
9	1	1	1	17	Beban Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9	1	1	1	18	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO
9	1	1	1	19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9	1	1	1	20	Beban Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9	1	1	1	21	Beban BPJS Kesehatan - LO
9	1	1	1	22	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja - LO
9	1	1	1	23	Beban Jaminan Kematian - LO
9	1	1	1	24	Dst.....
9	1	1	2		Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9	1	1	2	1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO
9	1	1	2	2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO
9	1	1	2	3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO
9	1	1	2	4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO
9	1	1	2	5	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO
9	1	1	2	6	Dst.....
9	1	1	3		Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9	1	1	3	1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9	1	1	3	2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9	1	1	4		Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9	1	1	4	1	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO

9	1	1	4	2	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9	1	1	4	3	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9	1	1	4	4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan - LO
9	1	1	4	5	Beban Pemungutan PBB - LO
9	1	1	5		Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9	1	1	5	1	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	5	2	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	5	3	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	5	4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9	1	1	5	5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9	1	1	5	6	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9	1	1	5	7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9	1	1	5	8	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9	1	1	5	9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9	1	1	5	10	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9	1	1	5	11	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9	1	1	5	12	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9	1	1	5	13	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9	1	1	5	14	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9	1	1	5	15	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9	1	1	5	16	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9	1	1	5	17	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
9	1	1	6		Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9	1	1	6	1	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9	1	1	6	2	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
9	1	1	6	3	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9	1	1	6	4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9	1	1	6	5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9	1	1	6	6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9	1	1	6	7	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	6	8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9	1	1	6	9	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

9	1	1	6	10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9	1	1	6	11	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9	1	1	6	12	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9	1	1	6	13	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9	1	1	6	14	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9	1	1	6	15	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9	1	1	6	16	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9	1	1	6	17	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9	1	1	6	18	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9	1	1	6	19	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9	1	1	6	20	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9	1	1	6	21	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9	1	1	6	22	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9	1	1	6	23	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
9	1	1	6	24	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9	1	1	6	25	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9	1	1	6	26	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9	1	1	6	27	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9	1	1	6	28	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9	1	1	6	29	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9	1	1	6	30	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9	1	1	6	31	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9	1	1	6	32	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
9	1	1	7		Beban Uang Lembur - LO
9	1	1	7	1	Beban Uang Lembur PNS - LO
9	1	1	7	2	Beban Uang Lembur Non PNS - LO
9	1	2			Beban Barang dan Jasa
9	1	2	1		Beban Bahan Pakai Habis
9	1	2	1	1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
9	1	2	1	2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
9	1	2	1	3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
9	1	2	1	4	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
9	1	2	1	5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

9	1	2	1	6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9	1	2	1	7	Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9	1	2	1	8	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
9	1	2	1	9	Beban Perlengkapan Pertukangan
9	1	2	1	10	Beban Pakai Habis Kedokteran/Perawatan Kesehatan/Laboratorium
9	1	2	1	11	Beban Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman
9	1	2	1	12	Beban Pakai Habis Bendera/Umbul-umbul
9	1	2	1	13	Beban Pakai Habis Perlengkapan Pemadam Kebakaran
9	1	2	1	14	Beban Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
9	1	2	1	15	Beban Pakai Habis Perlengkapan Olah Raga
9	1	2	1	16	Beban Pakai Habis Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga
9	1	2	1	17	Beban Pakai Habis Bahan Laboratorium
9	1	2	1	18	Beban Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek
9	1	2	1	19	Beban Obat-obatan
9	1	2	1	20	Beban Makanan dan Minuman Hewan Ternak
9	1	2	1	21	Dst.....
9	1	2	2		Beban Persediaan Bahan/ Material
9	1	2	2	1	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan
9	1	2	2	2	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
9	1	2	2	3	Beban Persediaan Bibit Ternak
9	1	2	2	4	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
9	1	2	2	5	Beban Persediaan Bahan Kimia
9	1	2	2	6	Beban Persediaan Makanan Pokok
9	1	2	2	7	Beban Peralatan Usaha
9	1	2	2	8	Beban Modul/Pengaturan
9	1	2	2	9	Beban Dokumentasi
9	1	2	2	10	Beban Dekorasi
9	1	2	2	11	Beban Bahan Obat Tanaman
9	1	2	2	12	Dst
9	1	2	3		Beban Jasa Kantor
9	1	2	3	1	Beban Jasa telepon
9	1	2	3	2	Beban Jasa air
9	1	2	3	3	Beban Jasa listrik
9	1	2	3	4	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
9	1	2	3	5	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
9	1	2	3	6	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet
9	1	2	3	7	Beban Jasa Paket/Pengiriman
9	1	2	3	8	Beban Jasa Sertifikasi
9	1	2	3	9	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9	1	2	3	10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9	1	2	3	11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9	1	2	3	12	Beban Jasa Resiko Manajemen
9	1	2	3	13	Beban Jasa Pengujian Laboratorium
9	1	2	3	14	Beban Jasa Publikasi
9	1	2	3	15	Beban Pajak Barang Milik Daerah
9	1	2	3	16	Beban Pengantian Jasa Pelayanan Publik
9	1	2	3	17	Beban Jasa Kesenian dan Olah Raga

9	1	2	3	18	Beban Penggantian Jasa Pelayanan Kesehatan
5	1	2	3	19	Dst
9	1	2	4		Beban Premi Asuransi
9	1	2	4	1	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9	1	2	4	2	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9	1	2	4	3	Beban Premi Asuransi Kehilangan
9	1	2	4	4	Dst.....
9	1	2	5		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9	1	2	5	1	Beban Jasa Service
9	1	2	5	2	Beban Penggantian Suku Cadang
9	1	2	5	3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9	1	2	5	4	Beban Jasa KIR
9	1	2	5	5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9	1	2	5	6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9	1	2	5	7	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9	1	2	5	8	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9	1	2	6		Beban Cetak dan Penggandaan
9	1	2	6	1	Beban Cetak
9	1	2	6	2	Beban Penggandaan
9	1	2	6	3	Beban Penjilidan
9	1	2	6	4	Dst
9	1	2	7		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9	1	2	7	1	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
9	1	2	7	2	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9	1	2	7	3	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9	1	2	7	4	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9	1	2	7	5	Beban Sewa Gelanggang Olah Raga
9	1	2	7	6	Beban Sewa Lahan/Tanah untuk Prasarana Jalan
9	1	2	7	8	Dst
9	1	2	8		Beban Sewa Sarana Mobilitas
9	1	2	8	1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9	1	2	8	2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9	1	2	8	3	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9	1	2	8	4	Dst ...
9	1	2	9		Beban Sewa Alat Berat
9	1	2	9	1	Beban Sewa Eskavator
9	1	2	9	2	Beban Sewa Bulldoser
9	1	2	9	3	Beban Sewa Concrete
9	1	2	9	4	Beban Sewa Alat Pengangkat
9	1	2	9	5	Beban Sewa Alat Pengaspalan
9	1	2	9	6	Beban Sewa Hammer
9	1	2	9	7	Beban Sewa Truck Loader
9	1	2	9	8	Beban Sewa Vibrator Roller
9	1	2	9	9	Beban Sewa Wheel Loader

9	1	2	9	10	Beban Sewa Traktor
9	1	2	9	11	Beban Sewa Dump Truck
9	1	2	9	12	Beban Sewa Kendaraan Penyapu Jalan
9	1	2	9	13	Beban Sewa Mesin Pengolah Semen
9	1	2	9	14	Beban Sewa Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
9	1	2	9	15	Beban Sewa Mesin Generator
9	1	2	9	16	Beban Sewa Mesin Pengolah Air Kotor
9	1	2	9	17	Beban Sewa Mesin Pengolah Air Kotor
9	1	2	9	18	Beban Sewa Pompa
9	1	2	9	19	Dst ...
9	1	2	10		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9	1	2	10	1	Beban Sewa Meja Kursi
9	1	2	10	2	Beban Sewa Komputer dan Printer
9	1	2	10	3	Beban Sewa Proyektor
9	1	2	10	4	Beban Sewa Generator
9	1	2	10	5	Beban Sewa Tenda
9	1	2	10	6	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9	1	2	10	7	Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
9	1	2	10	8	Beban Sewa Peralatan Kerja Lapangan
9	1	2	10	9	Dst
9	1	2	11		Beban Makanan dan Minuman
9	1	2	11	1	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9	1	2	11	2	Beban Makanan dan Minuman Rapat
9	1	2	11	3	Beban Makanan dan Minuman Tamu
9	1	2	11	4	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
9	1	2	11	5	Beban Makanan dan Minuman untuk Masyarakat
9	1	2	11	6	Dst ...
9	1	2	12		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9	1	2	12	1	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9	1	2	12	2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9	1	2	12	3	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9	1	2	12	4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9	1	2	12	5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9	1	2	12	6	Dst ...
9	1	2	13		Beban Pakaian Kerja
9	1	2	13	1	Beban Pakaian kerja lapangan
9	1	2	13	2	Dst ...
9	1	2	14		Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9	1	2	14	1	Beban Pakaian KORPRI
9	1	2	14	2	Beban Pakaian Adat Daerah
9	1	2	14	3	Beban Pakaian Batik Tradisional
9	1	2	14	4	Beban Pakaian Olahraga
9	1	2	14	5	Dst ...
9	1	2	15		Beban Perjalanan Dinas

9	1	2	15	1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9	1	2	15	2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
9	1	2	15	3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
9	1	2	16		Beban Perjalanan Pindah Tugas
9	1	2	16	1	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
9	1	2	16	2	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
9	1	2	17		Beban Pemulangan Pegawai
9	1	2	17	1	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
9	1	2	17	2	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
9	1	2	17	3	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
9	1	2	18		Beban Pemeliharaan
9	1	2	18	1	Beban Pemeliharaan Tanah
9	1	2	18	2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9	1	2	18	3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	1	2	18	4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	2	18	5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9	1	2	18	6	Beban Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan Jalan
9	1	2	18	7	Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
9	1	2	18	8	Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
9	1	2	18	9	Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan
9	1	2	18	10	Dst.....
9	1	2	19		Beban Jasa Konsultasi
9	1	2	19	1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9	1	2	19	2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9	1	2	19	3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9	1	2	19	4	Beban Jasa Konsultansi Manajemen
9	1	2	19	5	Dst ...
9	1	2	20		Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	20	1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9	1	2	20	2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	20	3	Dst.....
9	1	2	21		Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	21	1	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9	1	2	21	2	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	21	3	Dst ...
9	1	2	22		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9	1	2	22	1	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3
9	1	2	22	2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
9	1	2	22	3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
9	1	2	22	4	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
9	1	2	22	5	Dst

9	1	2	23		Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
9	1	2	23	1	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
9	1	2	23	2	Beban Sosialisasi
9	1	2	23	3	Beban Bimbingan Teknis
9	1	2	23	4	Dst
9	1	2	24		Beban Honorarium Non Pegawai
9	1	2	24	1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9	1	2	24	2	Beban Moderator
9	1	2	24	3	Dst.....
9	1	2	25		Beban Honorarium PNS - LO
9	1	2	25	1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
9	1	2	25	2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
9	1	2	25	3	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9	1	2	25	4	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO
9	1	2	25	6	Dst.....
9	1	2	26		Beban Honorarium Non PNS - LO
9	1	2	26	1	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9	1	2	26	2	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO
9	1	2	26	3	Dst.....
9	1	2	27		Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9	1	2	27	1	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9	1	2	27	2	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9	1	2	27	3	Dst.....
9	1	2	28		Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9	1	2	28	1	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
9	1	2	29		Beban Barang Dana BOS
9	1	2	29	1	Beban Barang Dana BOS
9	1	2	30		Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9	1	2	30	1	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
9	1	2	30	2	Dst.....
9	1	3			Beban Bunga
9	1	3	1		Beban Bunga Utang Pinjaman
9	1	3	1	1	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9	1	3	1	2	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9	1	3	1	3	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9	1	3	1	4	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9	1	3	1	5	Beban Bunga Utang Pinjaman Lainnya

9	1	3	1	6	Dst
9	1	3	2		Beban Bunga Utang Obligasi
9	1	3	2	1	Beban Bunga Utang Obligasi
9	1	3	2	2	Dst
9	1	4			Beban Subsidi
9	1	4	1		Beban Subsidi
9	1	4	1	1	Beban Subsidi kepada BUMN
9	1	4	1	2	Beban Subsidi kepada BUMD
9	1	4	1	3	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9	1	4	1	4	Dst
9	1	5			Beban Hibah
9	1	5	1		Beban Hibah kepada Pemerintah
9	1	5	1	1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9	1	5	2		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
9	1	5	2	1	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9	1	5	2	2	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9	1	5	2	3	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9	1	5	3		Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	3	1	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	3	2	Dst.....
9	1	5	4		Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	4	1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	5		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	5	1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	5	2	Dst ...
9	1	6			Beban Bantuan Sosial
9	1	6	1		Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	1	1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9	1	6	1	2	Dst
9	1	6	2		Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9	1	6	2	1	Beban Bantuan Sosial kepada
9	1	6	2	2	Dst
9	1	7			Beban Penyusutan dan Amortisasi
9	1	7	1		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9	1	7	1	1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9	1	7	1	2	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung

9	1	7	1	3	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9	1	7	1	4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9	1	7	1	5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
9	1	7	1	6	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9	1	7	1	7	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9	1	7	1	8	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9	1	7	1	9	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9	1	7	1	10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9	1	7	1	11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9	1	7	1	12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan
9	1	7	1	13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
9	1	7	1	14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9	1	7	1	15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9	1	7	1	16	Beban Penyusutan Komputer
9	1	7	1	17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9	1	7	1	18	Beban Penyusutan Alat Studio
9	1	7	1	19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9	1	7	1	20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9	1	7	1	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9	1	7	1	22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9	1	7	1	23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9	1	7	1	24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9	1	7	1	25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9	1	7	1	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9	1	7	1	27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9	1	7	1	28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9	1	7	1	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9	1	7	1	30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9	1	7	1	31	Beban Penyusutan Senjata Api
9	1	7	1	32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9	1	7	1	33	Beban Penyusutan Amunisi
9	1	7	1	34	Beban Penyusutan Senjata Sinar
9	1	7	1	35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9	1	7	2		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	1	7	2	1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9	1	7	2	2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9	1	7	2	3	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9	1	7	2	4	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9	1	7	2	5	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan
9	1	7	2	6	Beban Penyusutan Bangunan Candi
9	1	7	2	7	Beban Penyusutan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
9	1	7	2	8	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9	1	7	2	9	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9	1	7	2	10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9	1	7	2	11	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Lain
9	1	7	3		Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan

9	1	7	3	1	Beban Penyusutan Jalan
9	1	7	3	2	Beban Penyusutan Jembatan
9	1	7	3	3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9	1	7	3	4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9	1	7	3	5	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9	1	7	3	6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9	1	7	3	7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9	1	7	3	8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9	1	7	3	9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9	1	7	3	10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9	1	7	3	11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9	1	7	3	12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9	1	7	3	13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9	1	7	3	14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9	1	7	3	15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9	1	7	3	16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9	1	7	3	17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan
9	1	7	3	18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9	1	7	3	19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9	1	7	3	20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9	1	7	3	21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9	1	7	3	22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9	1	7	3	23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9	1	7	4		Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
9	1	7	4	1	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi
9	1	7	4	2	Dst..
9	1	7	5		Beban Penyusutan Aset Lainnya
9	1	7	5	1	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat
9	1	7	5	2	Dst..
9	1	7	6		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9	1	7	6	1	Beban Amortisasi Goodwill
9	1	7	6	2	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise
9	1	7	6	3	Beban Amortisasi Hak Cipta
9	1	7	6	4	Beban Amortisasi Paten
9	1	7	6	5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9	1	8			Beban Penyisihan Piutang
9	1	8	1		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9	1	8	1	1	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9	1	8	1	2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9	1	8	1	3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9	1	8	1	4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9	1	8	1	5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9	1	8	1	6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

9	1	8	1	7	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya
9	1	8	1	8	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9	1	8	1	9	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9	1	8	1	10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9	1	8	1	11	Dst.....
9	1	8	2		Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9	1	8	2	1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9	1	8	2	2	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9	1	8	2	3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9	1	8	2	4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
9	1	8	2	5	Beban Penyisihan Uang Muka
9	1	8	2	6	Dst.....
9	1	9			Beban Lain-lain
9	1	9	1		Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	1	1	Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	2		Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	2	1	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	3		Beban Lain-lain
9	1	9	3	1	Beban Lain-lain
9	2				BEBAN TRANSFER
9	2	1			Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9	2	1	1		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	1	1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	1	2	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
9	2	1	1	3	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9	2	1	1	4	Dst.....
9	2	2			Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9	2	2	1		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9	2	2	1	1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9	2	2	1	2	Dst.....
9	2	3			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9	2	3	1		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9	2	3	1	1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi

9	2	3	1	2	Dst.....
9	2	3	2		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9	2	3	2	1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9	2	3	2	2	Dst.....
9	2	4			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	1		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	1	1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	1	2	Dst.....
9	2	5			Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9	2	5	1		Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9	2	5	1	2	Dst.....
9	2	6			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9	2	6	1		Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9	2	6	1	1	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9	2	6	1	2	Dst.....
9	3				DEFISIT NON OPERASIONAL
9	3	1			Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	1		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	1	1	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9	3	1	1	2	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9	3	1	1	3	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9	3	1	1	4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9	3	1	1	5	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9	3	1	1	6	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9	3	1	1	7	Dst
9	3	2			Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	1		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	1	1	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9	3	2	1	2	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9	3	2	1	3	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9	3	2	1	4	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9	3	2	1	5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9	3	2	1	6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9	3	2	1	7	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9	3	2	1	8	Dst
9	3	3			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

9	3	3	1		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	1	1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya
9	3	3	1	2	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9	3	3	1	3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	1	4	Dst
9	4				BEBAN LUAR BIASA
9	4	1			Beban Luar Biasa
9	4	1	1		Beban Luar Biasa
9	4	1	1	1	Beban Tak Terduga
9	4	1	1	2	Beban Bencana Alam
9	4	1	1	3	Beban Luar Biasa Lainnya
9	4	1	1	4	Dst.....

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAIH H. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA

ABD. WAHAB, SH
NIP. 19650903 199803 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BIMA

Konversi Penyajian Pendapatan-LRA

Kodefikasi Akun Anggaran		Kodefikasi Akun Laporan Realisasi Anggaran	
Kode	Uraian	Kode	Uraian
4	PENDAPATAN DAERAH	4	Pendapatan-LRA
4 1	Pendapatan Asli Daerah	4 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
4 1 1	Pajak Daerah	4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA
4 1 2	Retribusi Daerah	4 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA
4 2	Dana Perimbangan	4 2	Pendapatan Transfer-LRA
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak-LRA
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA
4 2 2	Dana Alokasi Umum	4 2 1 03	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	4 2 1 04	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA
4 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA
4 3 1	Pendapatan Hibah	4 2 2 01	Dana Otonomi Khusus-LRA
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4 2 2 03	Dana Penyesuaian - LRA
4 3 1 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	4 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	4 2 3 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan	4 2 3 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LRA
4 3 1 05	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	4 2 4	Bantuan Keuangan-LRA
4 3 2	Dana Darurat	4 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	4 3 1	Pendapatan Hibah-LRA
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA
4 3 3 02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	4 3 1 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
4 3 3 03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LRA
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4 3 1 04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan-LRA
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	4 3 2 01	Dana Darurat-LRA
4 3 4 02	Dana Otonomi Khusus	4 3 3	Pendapatan Lainnya-LRA
4 3 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Kabupaten/Kota Lainnya		

Konversi Penyajian Belanja

Kodefikasi Akun Anggaran		Kodefikasi Akun Laporan Realisasi Anggaran	
Kode	Uraian	Kode	Uraian
5	BELANJA	5	BELANJA
5 1	Belanja Tidak Langsung	5 1	Belanja Operasi
5 1 1	Belanja Pegawai	5 1 1	Belanja Pegawai
5 1 2	Belanja Bunga	5 1 2	Belanja Barang dan Jasa
5 1 3	Belanja Subsidi	5 1 3	Belanja Bunga
5 1 4	Belanja Hibah	5 1 4	Belanja Subsidi
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	5 1 5	Belanja Hibah
5 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Desa	5 1 6	Belanja Bantuan Sosial
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Desa		
5 1 8	Belanja Tak Terduga	5 2	Belanja Modal
5 2	Belanja Langsung	5 2 1	Belanja Modal Tanah
5 2 1	Belanja Pegawai	5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5 2 3	Belanja Modal	5 2 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 2 3 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5 2 3 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	5 3	Belanja Tak Terduga
5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	5 3 1	Belanja Tak Terduga
5 2 3 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	6	TRANSFER
5 2 3 05	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor	6 1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan
5 2 3 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
5 2 3 07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Udara	6 1 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	6 2	Transfer Bantuan Keuangan
5 2 3 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian Dan Peternakan	6 2 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6 2 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 2 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair		
5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		
5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga		
5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio		
5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi		
5 2 3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur		
5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran		
5 2 3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium		
5 2 3 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		
5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan		
5 2 3 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		
5 2 3 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota		
5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon		
5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian*) Bangunan		
5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan		
5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan		
5 2 3 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/ Ternak Dan Tanaman		
5 2 3 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan		

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAIH H. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA

ABD. WAHAB, SH
NIP. 19650903 199803 1 005